

Lanskap Filantropi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia

2025



Lanskap Filantropi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia

2025

Kata Pengantar

Salam sejahtera bagi kita semua,

Kami menyambut baik terbitnya **“Lanskap Filantropi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia Tahun 2025”** yang disusun oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dengan dukungan dari Tanoto Foundation. Publikasi ini hadir pada saat pemerintah memperkuat arah pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka *evidence-informed policymaking*, laporan ini memberikan data dan analisis yang penting bagi pemerintah untuk memahami kontribusi serta dinamika ekosistem filantropi di kedua sektor tersebut.

Sektor filantropi terus berkembang sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong inovasi sosial dan mempercepat pencapaian target pembangunan manusia. Laporan ini memperlihatkan bagaimana berbagai inisiatif filantropi telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemanfaatan pembelajaran digital, penguatan kapasitas guru, serta perluasan layanan kesehatan dasar. Peran filantropi dalam percepatan penurunan *stunting* dan peningkatan gizi ibu-anak juga menjadi contoh sinergi yang mendukung prioritas nasional pengembangan SDM unggul. Temuan laporan ini, yang bersumber dari 19 lembaga filantropi pendidikan dan 16 lembaga filantropi kesehatan, menunjukkan praktik baik dan tantangan nyata dalam pemerataan akses PAUD, penguatan literasi-numerasi, serta layanan kesehatan berbasis komunitas.

Bappenas memandang kolaborasi dengan sektor filantropi sebagai bagian penting dari *whole-of-society approach* dalam pembangunan. Ke depan, Bappenas akan terus memperkuat ekosistem kolaborasi ini melalui penyelarasan program, pemanfaatan data bersama, serta pengembangan skema pendanaan sosial inovatif yang mendorong keberlanjutan. Laporan ini juga akan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan berbasis data, khususnya dalam perencanaan lintas sektor untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial, termasuk penguatan layanan PAUD-HI, peningkatan pemerataan tenaga pendidik, serta percepatan penurunan *stunting*.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada PFI dan Tanoto Foundation atas kontribusinya dalam menghadirkan laporan ini. Harapan kami, publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, dan masyarakat sebagai dasar penguatan kolaborasi dan peningkatan efektivitas intervensi sosial.

Semoga laporan ini memberikan pijakan yang kuat dalam memperkuat ekosistem filantropi yang tangguh, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Pungkas Bahjuri Ali, STP., MS., Ph.D

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dengan dukungan Tanoto Foundation dapat menerbitkan laporan **“Lanskap Filantropi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia Tahun 2025”**. Publikasi ini hadir pada momentum ketika sektor filantropi diharapkan berperan lebih aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus merespons berbagai tantangan pasca-pandemi, khususnya terhadap ketimpangan akses pendidikan, isu kesehatan masyarakat, dan tingginya angka stunting di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan mandat PFI sebagai asosiasi filantropi nasional yang menaungi lebih dari 200 lembaga, yayasan, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil, laporan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika, tren, serta tantangan yang dihadapi sektor filantropi, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. PFI melihat bahwa filantropi memiliki posisi strategis dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, mengisi celah kebijakan, mengembangkan pendekatan baru, dan mendorong tata kelola yang lebih partisipatif.

Dalam konteks pendidikan, lembaga filantropi kini tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan beasiswa atau infrastruktur dasar, tetapi telah bertransformasi menjadi katalis peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kapasitas guru, dan adopsi teknologi pendidikan secara digital. Di bidang kesehatan, lembaga filantropi turut berperan dalam memperluas layanan dasar, mendukung pengentasan stunting, dan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan.

Salah satu temuan penting laporan ini adalah meningkatnya kecenderungan lembaga filantropi untuk membangun kemitraan multi-pihak (*multi-stakeholder partnerships*). Kolaborasi antara

lembaga filantropi, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga akademik semakin berkembang pesat, terutama melalui inisiatif Kluster Filantropi Pendidikan dan Filantropi Hub for Health. Inisiatif tersebut memperlihatkan bagaimana kolaborasi dapat memperluas dampak dan menciptakan inovasi sosial yang lebih berkelanjutan.

Bersumber dari temuan 35 lembaga filantropi, berbagai tantangan tetap perlu menjadi perhatian. Diantaranya mencakup: (1) keterbatasan cakupan program di wilayah timur Indonesia, (2) perlunya pengembangan instrumen pendanaan inovatif seperti impact investing atau blended finance, serta (3) perlunya standarisasi pelaporan dan pengukuran dampak sosial (*social impact measurement*).

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada Tanoto Foundation yang telah mendukung penuh penerbitan publikasi ini, serta seluruh lembaga filantropi anggota maupun non-anggota PFI yang telah berbagi data, gagasan, serta pengalaman berharga selama proses penyusunan laporan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian/Lembaga, dunia usaha, akademisi, dan media yang selama ini mendukung program filantropi di Indonesia. Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan strategis bagi para pembuat kebijakan, lembaga filantropi, akademisi, dan masyarakat luas dalam merancang kebijakan, memperkuat tata kelola, serta memperluas dampak di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kami berharap semangat kolaborasi ini dapat terus tumbuh, sehingga filantropi Indonesia dapat mendukung terciptanya masa depan bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan berkeadilan sosial.

Rizal Algamar

Ketua Badan Pengurus
Perhimpunan Filantropi Indonesia



DOKUMENTASI YAYASAN GURU BELAJAR

Ringkasan Eksekutif

Filantropi di Indonesia terus berkiprah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui laporan "**Lanskap Filantropi di Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia Tahun 2025**," Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga filantropi di Indonesia telah bertransformasi menjadi mitra strategis pembangunan sosial yang berorientasi pada dampak jangka panjang. Dua sektor yang menjadi fokus laporan ini (pendidikan dan kesehatan) merefleksikan prioritas lembaga filantropi Indonesia, sekaligus mencerminkan arah gerakan filantropi menuju tata kelola pembangunan yang lebih kolaboratif, berbasis bukti (*evidence-based*), dan berkelanjutan.

Dalam sektor pendidikan, dinamika filantropi menunjukkan transformasi menuju penguatan mutu pembelajaran dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan. Setelah pandemi COVID-19, filantropi berperan penting dalam memperbaiki kesenjangan pembelajaran (*learning loss*), mengembangkan model pendidikan digital, serta memperkuat kapasitas guru dan lembaga pendidikan lokal. Perkembangan fokus program dan aktivitas lembaga filantropi ini menandai perubahan orientasi dari program berbasis karitas menuju *impact-driven education initiatives*, di mana lembaga filantropi merancang intervensi dengan kerangka *theory of change* dan menggunakan data untuk memantau hasil pembelajaran. Berbagai inisiatif telah dilakukan, mulai dari penyediaan beasiswa, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pendidikan vokasional, hingga pemanfaatan teknologi pembelajaran digital.

Sementara itu, **di sektor kesehatan**, laporan ini menempatkan isu *stunting* sebagai fokus utama kegiatan filantropi. Hal ini sejalan dengan target

nasional terkait penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14,2% pada 2029. Program filantropi di bidang kesehatan umumnya menekankan intervensi gizi ibu dan anak, edukasi kesehatan keluarga, penyediaan makanan tambahan bergizi, serta penguatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan.

Secara umum, hasil kajian terhadap 35 lembaga filantropi menunjukkan bahwa kedua sektor di atas masih menghadapi beberapa tantangan, meliputi pendanaan dan keberlanjutan program, regulasi dan birokrasi, sinkronisasi dan koordinasi antar-lembaga, keterbatasan infrastruktur dan SDM, serta keterbatasan ketersediaan data dan evaluasi dampak.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, laporan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain: pengembangan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan; penyederhanaan regulasi dan pembentukan undang-undang khusus filantropi yang adaptif terhadap perkembangan digital; perluasan jangkauan program ke daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah; serta penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi seperti *e-learning* dan *telemedicine*. Selain itu, peningkatan akurasi data, sistem monitoring dan evaluasi berbasis bukti, serta keterlibatan mitra lokal dinilai penting bagi efektivitas program filantropi ke depan.

Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta, serta dukungan kebijakan yang kondusif, filantropi di Indonesia diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Daftar Isi

01

LANSKAP FILANTROPI PENDIDIKAN & KESEHATAN INDONESIA

1.1. Lanskap dan Tren Filantropi di Indonesia 2021-2024	03
1.2. Ekosistem yang Mendukung Perkembangan Sektor Filantropi di Indonesia	04
1.3. <i>Outlook</i> Filantropi Sektor Pendidikan dan Kesehatan Indonesia	07
1.4. Perkumpulan Filantropi Indonesia sebagai Organisasi Filantropi	12
1.5. Metodologi	14
Referensi	17



02

MEMBANGUN PENDIDIKAN BERKUALITAS MELALUI FILANTROPI DI INDONESIA

2.1. Menuju Pendidikan yang Merata dan Berkualitas	19
2.2. <i>Key Stakeholder</i> Filantropi Pendidikan Indonesia	21
2.3. Studi Kasus dan Analisis Dampak Filantropi di Sektor Pendidikan	29
2.4. Potensi Filantropi Pendidikan di Indonesia	41
Referensi	44

03

DARI DATA KE DAMPAK: PERAN FILANTROPI DALAM MENGATASI *STUNTING* DI INDONESIA

3.1. Sinergi Pemerintah dan Filantropi Guna Mengatasi <i>Stunting</i>	47
3.2. <i>Key Stakeholder</i> Filantropi Pencegahan <i>Stunting</i> Di Indonesia	49
3.3. Studi Kasus dan Analisis Dampak Filantropi di Sektor Kesehatan	59
3.4. Menyiapkan Anak Siap Belajar Dimulai dari Penanganan <i>Stunting</i>	71
3.5. Potensi Filantropi Kesehatan di Indonesia	73
Referensi	74

04

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan	79
4.2. Rekomendasi Kebijakan	83
4.3. Indonesia Emas 2045: Mengarahkan Filantropi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan	85



Daftar Grafik

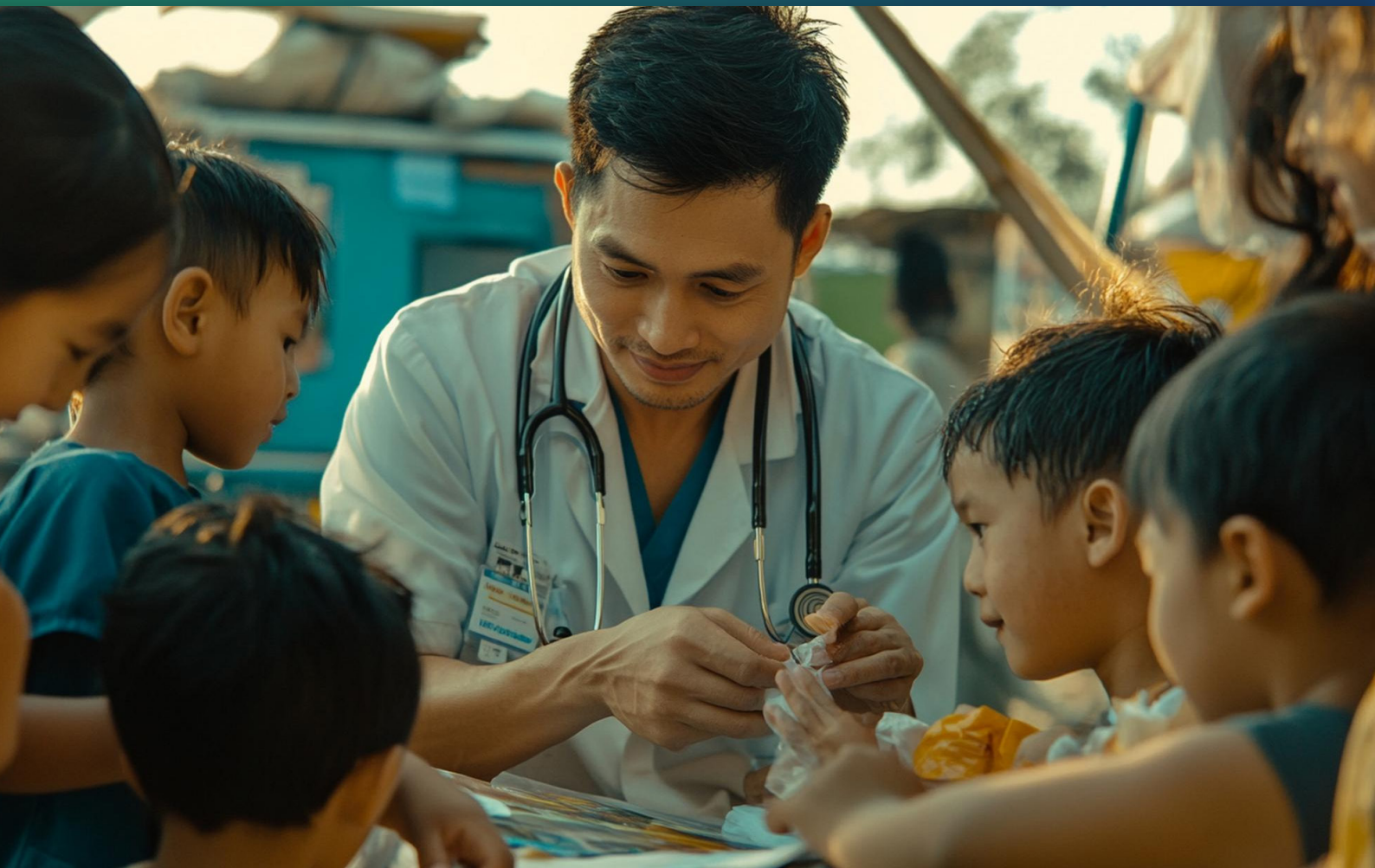
Grafik 1.1.	Jumlah Penyaluran Dana 2018-2020	03
Grafik 1.2.	Program Prioritas Kegiatan Filantropi	04
Grafik 1.3.	Tantangan Kontribusi Terhadap SDGs	07
Grafik 1.4.	Total Dana yang Berkumpul dari Berbagai Lembaga Filantropi	08
Grafik 1.5.	Jangkauan Wilayah Kerja Lembaga Filantropi	09
Grafik 1.6.	Rekomendasi Agenda Bersama	11
Grafik 2.1.	Pendidikan Prioritas Terbesar APBN 2024	19
Grafik 2.2.	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal (2023)	20
Grafik 2.3.	Realisasi Anggaran dan Skor PISA Indonesia	21
Grafik 2.4.	Peta Sebaran Lembaga Filantropi Pendidikan	24
Grafik 2.5.	Angka Partisipasi Kasar PAUD (2019-2023)	30
Grafik 2.6.	Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah (2020-2024)	33
Grafik 2.7.	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	39
Grafik 3.1.	Potret Belanja Anggaran <i>Stunting</i> dan Capaian Prevalensi <i>Stunting</i> (2013-2023)	48
Grafik 3.2.	Peta Persebaran Lembaga Filantropi Kesehatan di Indonesia	52
Grafik 4.1.	Tantangan Program Pendidikan dan Kesehatan <i>Key Stakeholder</i> Filantropi di Indonesia	80
Grafik 4.2.	Peta Persebaran Tantangan Program Pendidikan dan Kesehatan <i>Key Stakeholder</i> Filantropi di Indonesia	80

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	<i>Background</i> Narasumber Organisasi Filantropi di Sektor Pendidikan	22
Tabel 2.2.	Fokus Program <i>Key Stakeholder</i> Filantropi Pendidikan di Indonesia	22
Tabel 3.1.	Tren <i>Stunting</i> Balita Berdasarkan SKI 2023	48
Tabel 3.2.	<i>Background</i> Narasumber Organisasi Filantropi di Sektor Kesehatan	49
Tabel 3.3.	Fokus Program <i>Key Stakeholder</i> Filantropi Kesehatan di Indonesia	50
Tabel 4.1.	Rangkuman Rekomendasi Kebijakan	83

Bab 1

Lanskap Filantropi Pendidikan & Kesehatan Indonesia



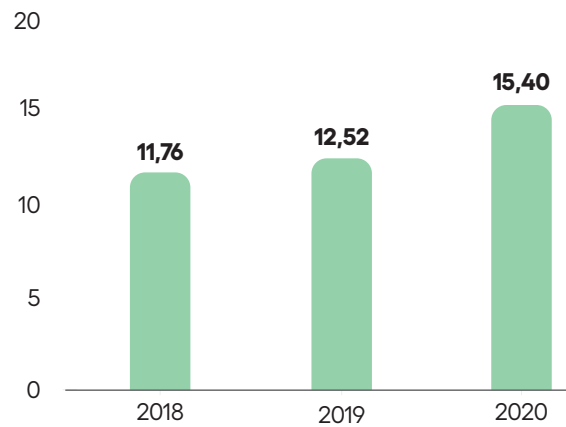
1.1. Lanskap dan Tren Filantropi di Indonesia 2021-2024

Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di dunia pada 2024. Berdasarkan World Giving Index 2024 yang dirilis Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menduduki posisi pertama dengan skor 74 poin, unggul dalam hal donasi uang dan aksi kerelawanan.¹ Hal itu membuat Indonesia menjadi negara paling dermawan selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2018. Tradisi gotong royong dan kepedulian sosial menjadi landasan kuat bagi budaya berbagi di Indonesia. Namun, agar dampaknya lebih besar dan berkelanjutan, kedermawanan masyarakat Indonesia perlu didukung oleh ekosistem filantropi yang sehat dan terstruktur. Ekosistem ini mencakup regulasi yang jelas, infrastruktur yang memadai, lembaga filantropi yang profesional, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana.

Aktivitas filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, ditunjukkan dengan perubahan pola pemberian dana, fokus pada dampak sosial, serta partisipasi yang lebih besar dari berbagai sektor. Perkembangan yang terjadi juga mencerminkan bagaimana aktivitas filantropi di Indonesia semakin berfokus pada keberlanjutan, keterlibatan komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan dampaknya.

COVID-19 menjadi momentum percepatan transformasi filantropi. Pandemi menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya filantropi sebagai alat untuk merespons krisis dan memulihkan keadaan sosial-ekonomi. Menurut laporan *Indonesia Philanthropy Outlook 2022*, penyaluran dana kemanusiaan pada masa awal pandemi mengalami kenaikan 23,05%. Penyaluran dana kemanusiaan pada tingkat global juga turut meningkat. Menurut data dari Center for Disaster Philanthropy (CDP) dan Candid pada laporan *Philanthropy and Covid-19*

Grafik 1.1. Jumlah Penyaluran Dana 2018-2020

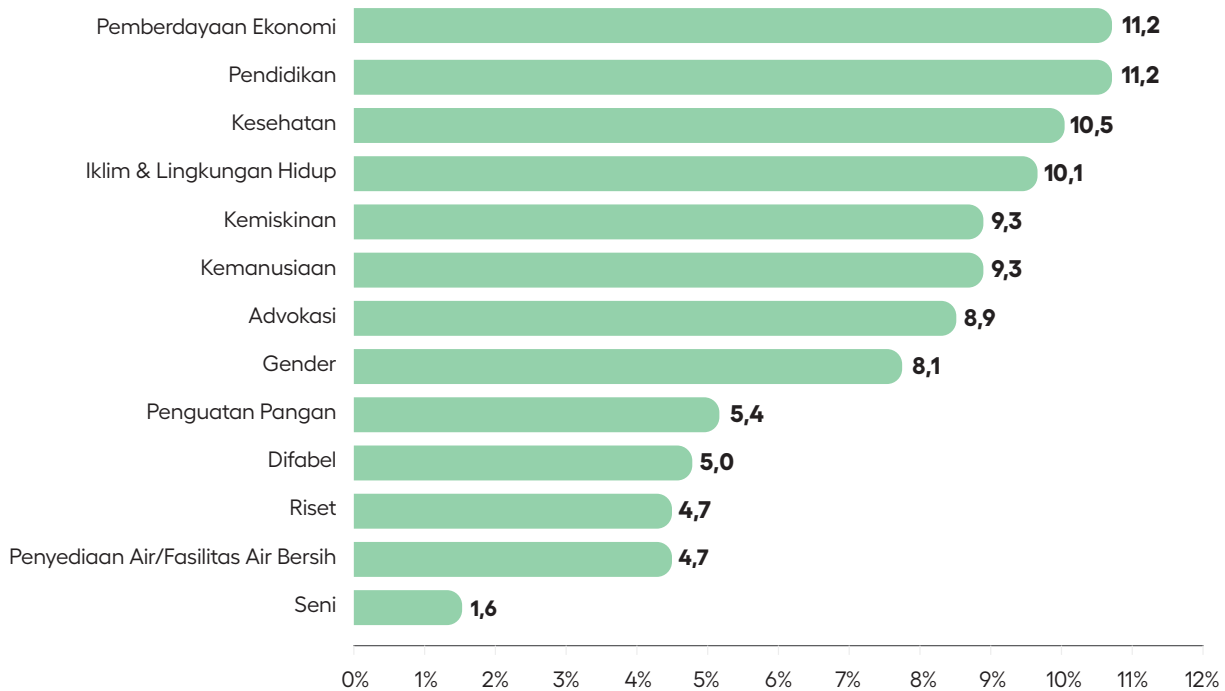


SUMBER: INDONESIA PHILANTHROPY OUTLOOK 2022

in the first half of 2020, pendanaan filantropi global mencapai lebih dari US\$11,9 miliar untuk penanganan Covid-19 pada paruh pertama 2020, korporasi menyumbang hampir dua pertiga pendanaan.² Angka ini meningkat menjadi total US\$20 miliar pada akhir 2020.³

Selain itu, menurut laporan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* saat ini kegiatan filantropi mulai berfokus pada 5 program prioritas, yakni mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, iklim dan lingkungan hidup, serta kemiskinan. Pelaksanaan program juga menitikberatkan pada sisi keberlanjutan. Bantuan tidak lagi hanya bersifat sesaat atau tanggap darurat, tetapi berkembang menjadi program-program yang menciptakan dampak jangka panjang. Sehingga pendekatan-pendekatan seperti peningkatan kapasitas masyarakat, pendampingan, serta penguatan ekonomi lokal konsisten dilakukan.

Dengan pendekatan ini, aktivitas filantropi tidak hanya menanggulangi masalah yang ada, tetapi juga membantu mengurangi risiko di masa depan, sejalan dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada 2024, sekitar 89% lembaga filantropi sudah menyelaraskan program dengan

Grafik 1.2. Program Prioritas Kegiatan Filantropi

SUMBER: INDONESIA PHILANTHROPY OUTLOOK 2024

SDGs, lebih tinggi dari 84,9% yang tercatat di tahun 2022. Selain itu, lebih dari 70% masyarakat menilai bahwa lembaga filantropi telah efektif dalam mendukung program pemerintah.⁴

Penguatan ekosistem filantropi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga, kolaborasi multi-pihak, dan perbaikan regulasi. Transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi yang lebih baik juga didorong untuk memastikan dampak yang terukur. Seiring dengan itu, teknologi semakin dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas filantropi, terutama dalam hal pengumpulan dana dan pengelolaan program. Berbagai platform *crowdfunding* dan filantropi digital seperti Kitabisa.com yang berkembang pesat, memungkinkan individu dan komunitas untuk menggalang dana bagi berbagai inisiatif sosial. Akses digital ini membuat filantropi lebih inklusif, memungkinkan partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Selain itu, transparansi dan

akuntabilitas dalam distribusi dana menjadi lebih mudah dipantau dengan adanya teknologi ini.

1.2. Ekosistem yang Mendukung Perkembangan Sektor Filantropi di Indonesia

Untuk memastikan operasional dan tata laksana program filantropi dilakukan secara efektif, dibutuhkan ekosistem yang mendukung pengembangan sektor filantropi. Beberapa aspek utama yang mendukung sektor ini antara lain adalah kebijakan pemerintah, insentif pajak, kode etik, dan transparansi lembaga filantropi.⁵

1.2.1. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Sektor Filantropi

Dasar hukum filantropi menjadi kerangka untuk menjaga integritas lembaga filantropi, serta untuk melindungi kepentingan publik dalam memastikan bahwa dana yang dikumpulkan oleh



lembaga-lembaga filantropi digunakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, peraturan pelaksanaan filantropi di Indonesia tidak diatur secara spesifik dalam regulasi khusus, melainkan terpecah menjadi beberapa undang-undang dan turunannya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengumpulan Sumbangan di Masyarakat.

Dalam laporan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, sebagian pelaku filantropi di Indonesia merasa interpretasi dan implikasi peraturan di atas tidak selalu jelas. Pada laporan tersebut, 60% responden menganggap peraturan tentang filantropi di Indonesia masih belum sesuai

dan belum memfasilitasi kebutuhan kebijakan akan perkembangan masa kini. Salah satu poin yang menjadi perhatian pelaku filantropi khususnya tentang pengumpulan uang dan barang, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang relevan bagi penggalangan dana filantropi seperti regulasi instrumen insentif pajak dan harmonisasi pengajuan permohonan insentif. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981, hingga Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021, interpretasi dan implementasi dari regulasi tersebut dalam hal penggalangan dana masih menjadi isu bagi banyak lembaga filantropi.

1.2.2. Insentif Pajak

Kemitraan antara pemerintah dan sektor filantropi merupakan kunci dalam mencapai tujuan SDGs 2030. Salah satu instrumen penting yang dapat memperkuat kemitraan ini adalah insentif pajak bagi donasi. Kebijakan insentif pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong aliran dana yang lebih besar ke sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Indonesia telah



menerapkan 2 insentif pajak yaitu *Super Tax Deduction* dan Pengecualian Pajak. Mengutip kajian Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang bertajuk “Pentingnya *Enabling Environment* bagi Filantropi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”, dikemukakan bahwa insentif pajak yang diberikan kepada lembaga filantropi di Indonesia masih sangat terbatas dan bersifat parsial, sehingga hal ini merupakan hambatan bagi pengembangan peran filantropi di Indonesia (*workshop* Direktorat Jenderal Pajak Pusat dan PFI, 2023). Maka dari itu, untuk mencapai potensi penuh dari insentif pajak, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan lembaga filantropi dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan konsisten dengan tujuan pembangunan nasional.

1.2.3. Kode Etik Filantropi

Sebagai respons terhadap potensi pelanggaran etika dalam siklus filantropi yang meliputi penggalangan, pengelolaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana, PFI telah

menginisiasi pengembangan Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) pada tahun 2021.⁶ KEFI hadir sebagai instrumen pengendalian sosial yang penting, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor filantropi melalui penegakan standar etika yang tinggi.

1.2.4. Indonesia Philanthropy Directory

Keberagaman lembaga filantropi di Indonesia menuntut adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. *Indonesia Philanthropy Directory* yang diluncurkan oleh PFI pada awal tahun 2024 menjawab kebutuhan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat dan mendorong lembaga filantropi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaporan dan publikasi. Dengan demikian, *Indonesia Philanthropy Directory* diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap sektor filantropi dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

1.3. Outlook Filantropi Sektor Pendidikan dan Kesehatan Indonesia

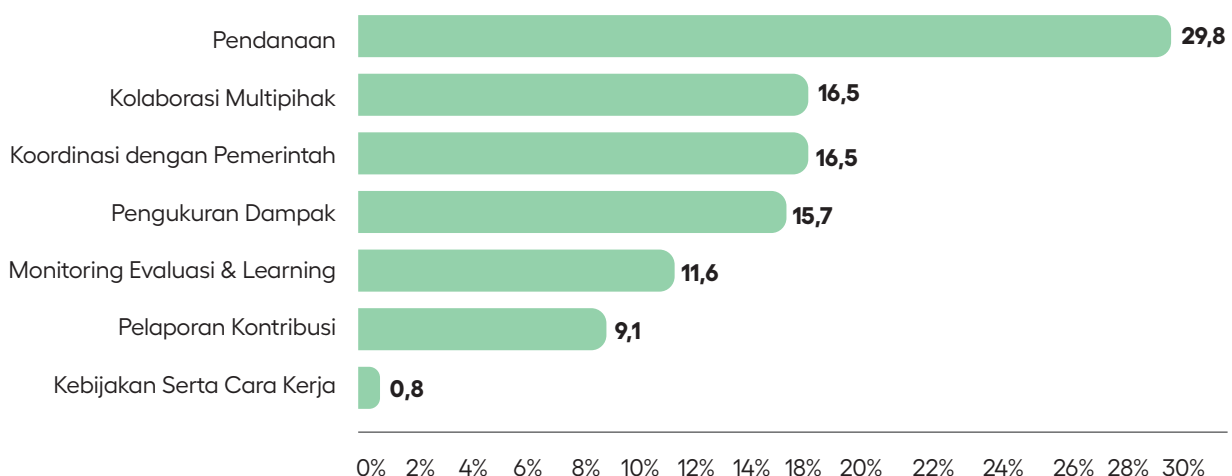
Secara global, filantropi telah menjadi katalisator utama dalam menjembatani kesenjangan pembangunan, dengan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pencapaian SDGs. Data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa filantropi swasta untuk pembangunan mencapai total USD 42 miliar pada periode 2016–2019, menjadikannya bagian penting dari lanskap pembiayaan pembangunan.⁷

Hal ini sejalan dengan peran filantropi di Indonesia yang mendukung upaya pemerintah untuk mencapai SDGs, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan mendukung SDG 4 (pendidikan berkualitas), sementara kesehatan berfokus pada SDG 3 (kesehatan yang lebih baik). Hal ini menunjukkan bahwa para aktor filantropi tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan secara langsung, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya Indonesia mencapai target dalam SDGs.

Lembaga filantropi di Indonesia memiliki sektor prioritas yang beragam, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus utama bagi lebih dari 10% lembaga.⁸ Di bidang pendidikan, filantropi berperan dalam memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan infrastruktur dan tenaga pengajar yang memadai. Berbagai program berbasis teknologi, seperti penyediaan platform *e-learning* dan peningkatan literasi digital, telah dikembangkan oleh lembaga filantropi untuk mengatasi kesenjangan akses ini, yang semakin diperjelas selama masa pandemi COVID-19.

Untuk memperkuat dampak kolektif dari berbagai inisiatif ini, melalui inisiatif “Filantropi Hub”, PFI mengonsolidasikan upaya pemantauan capaian SDGs, mendorong pembiayaan inovatif, serta memperluas jejaring kolaborasi antar-lembaga. Salah satu capaian utama adalah pembentukan Kluster Filantropi Pendidikan (KFP) yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pegiat pendidikan dan memaksimalkan dampak filantropi pada pendidikan Indonesia melalui tiga pilar kerja, antara lain:⁹

Grafik 1.3. Tantangan Kontribusi terhadap SDGs



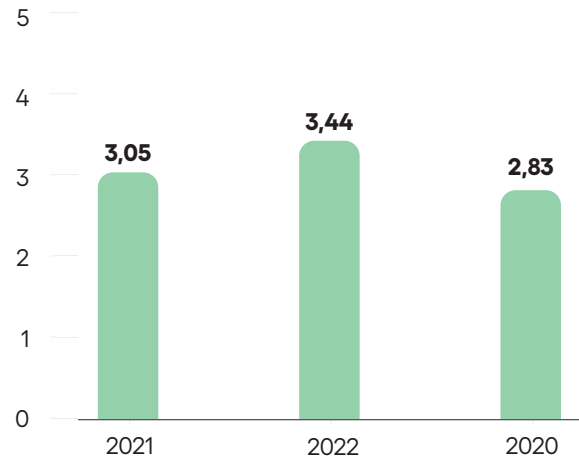
SUMBER: INDONESIA PHILANTHROPY OUTLOOK 2024

- Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kemampuan lembaga filantropi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program untuk mendukung agenda nasional dan global yang berkaitan dengan pendidikan,
- Berbagi Praktik Baik: Menciptakan platform berbagi dan bertukar dokumentasi, praktik baik, serta informasi mengenai program/kegiatan pendidikan, dan
- Advokasi: Secara aktif mengidentifikasi isu-isu dan melaksanakan advokasi terhadap para pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan yang kondusif terkait pendidikan.

Di sektor kesehatan, program filantropi berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Pencegahan *stunting* dan peningkatan kesehatan ibu juga menjadi prioritas, dengan program-program yang mendukung edukasi gizi, penyediaan layanan kesehatan primer, serta akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik di tingkat komunitas. Inisiatif ini sejalan dengan SDG 3 yang menargetkan peningkatan kesehatan global melalui pengurangan angka kematian ibu, pencegahan penyakit menular, dan akses universal ke pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Namun seperti filantropi di sektor lain, filantropi sektor pendidikan dan kesehatan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan dampak yang sejalan dengan pencapaian SDGs, salah satunya fluktuasi pendanaan. Berdasarkan data dari laporan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, total dana yang terkumpul dari lembaga-lembaga filantropi mengalami penurunan signifikan, dari Rp3.048 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2.824 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini berpotensi mengganggu keberlanjutan program-program jangka panjang, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan investasi berkelanjutan.¹⁰

Grafik 1.4. Total Dana yang Terkumpul dari Berbagai Lembaga Filantropi

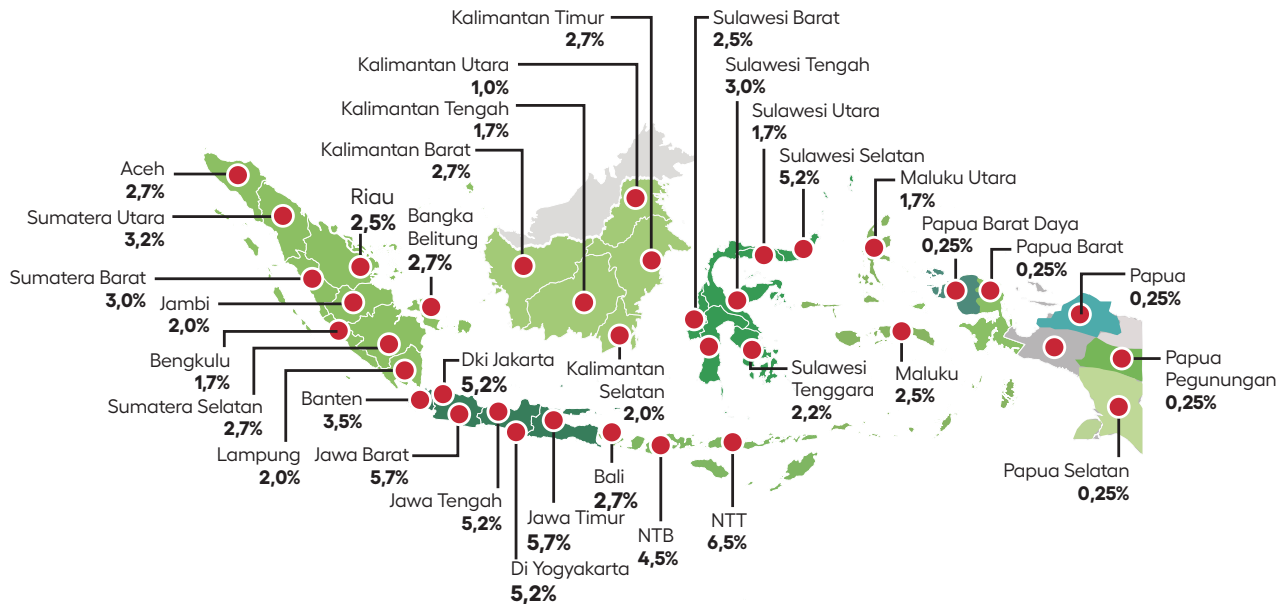


SUMBER: INDONESIA PHILANTHROPY OUTLOOK 2024

Pendanaan sering kali menjadi kendala utama bagi banyak lembaga filantropi. Sebagai contoh, Rumah Zakat menyebutkan tantangan berupa kebutuhan dana besar untuk program kesehatan. Banyak program kesehatan yang memerlukan investasi jangka panjang, terutama dalam pengadaan alat medis, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak, dan pendidikan kesehatan. Kitabisa dan MNC Peduli juga menghadapi gap pendanaan yang membatasi cakupan program, serta tantangan dalam menciptakan kesadaran donasi yang lebih tinggi di sektor kesehatan.

Selain itu, distribusi geografis program prioritas filantropi juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar program masih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lain seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan relatif kurang mendapat perhatian. Wilayah-wilayah ini seringkali menghadapi tantangan akses dan infrastruktur yang terbatas yang menghambat pelaksanaan program filantropi termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa lembaga seperti AMMAN Mineral menghadapi tantangan terkait dengan infrastruktur yang terbatas di daerah terpencil, yang kemudian menjadi kendala utama dalam

Grafik 1.5. Jangkauan Wilayah Kerja Lembaga Filantropi



SUMBER: INDONESIA PHILANTHROPY OUTLOOK 2024

distribusi program. Oleh karena itu, penting untuk mendorong distribusi program yang lebih merata, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar terhadap filantropi di Indonesia, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan. Di satu sisi, pandemi memperburuk ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet atau perangkat teknologi yang memadai. Namun, di sisi lain, pandemi mempercepat adopsi teknologi digital di sektor pendidikan. Filantropi merespons dengan memperluas program *e-learning* dan menyediakan akses internet bagi siswa di daerah-daerah yang kurang terlayani. Hal ini menciptakan peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi di masa depan.

Pada sektor kesehatan, filantropi berperan dalam mendukung riset, inovasi medis, dan

penguatan kapasitas sistem kesehatan nasional maupun regional. Tanoto Foundation, misalnya, mendukung perluasan kapasitas tes COVID-19 dengan menyumbangkan mesin RNA extractor, mesin PCR, serta lebih dari 20 ribu kit uji, termasuk mendukung pemanfaatan PCR *test kit* lokal.¹¹

Dukungan Tanoto Foundation juga mencakup investasi pada riset jangka panjang. Melalui kerja sama dengan Duke-NUS Medical School di Singapura, Tanoto Foundation mendirikan Viral Research and Experimental Medicine Centre (ViREMiCS) yang berperan dalam uji klinis fase I/II kandidat vaksin mRNA COVID-19.¹² Peneliti ViREMiCS yang didukung Tanoto Foundation memimpin evaluasi dampak vaksin terhadap relawan, sekaligus mempublikasikan riset mengenai keamanan vaksin dan pengembangan antibodi terapeutik. Upaya ini melengkapi kontribusi filantropi dalam meningkatkan ketahanan sistem kesehatan sekaligus memperkuat kapasitas penelitian untuk penyakit menular maupun non-menular yang prevalen di Asia, seperti jantung, diabetes, dan kanker.

Selain inisiatif di atas, respon lembaga filantropi terhadap pandemi berfokus pada peningkatan akses ke pelayanan kesehatan dasar, distribusi alat pelindung diri (APD), dan program vaksinasi. Tantangan seperti kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan kurangnya akses ke fasilitas kesehatan yang memadai menjadi lebih jelas selama pandemi, dan inisiatif filantropi berperan penting dalam menjembatani kesenjangan ini.

Saat ini, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah terpencil masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak organisasi filantropi kesehatan. Cita Sehat Foundation menghadapi kesulitan dalam menemukan SDM yang terlatih untuk memahami



dan menjalankan program pencegahan *stunting*.

Adapun birokrasi yang kompleks menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga filantropi internasional seperti MSF Indonesia. Proses perizinan yang panjang sering kali memperlambat respons mereka terhadap kebutuhan kesehatan yang mendesak. Ini menjadi hambatan besar dalam memberikan bantuan kesehatan tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat. Organisasi seperti Dompet Dhuafa juga berbagi bahwa pergantian kebijakan lokal turut memengaruhi fokus pelaksanaan program.

Kesulitan dalam evaluasi dampak yang penting dalam mengukur keberhasilan program filantropi kesehatan juga menghambat implementasi dan peningkatan program. Cita Sehat Foundation menyatakan bahwa keberhasilan dalam program *stunting* sangat bergantung pada pencapaian indikator tertentu yang terkadang sulit untuk diukur dengan cepat. Pengukuran keberhasilan program kesehatan seringkali memerlukan waktu yang panjang, sementara di sisi lain, tantangan validasi data dan pencatatan yang akurat seringkali menghambat kemampuan untuk menilai dampak secara efektif.

Tantangan sosial juga seringkali menghambat implementasi program, terutama yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Bina Swadaya mencatat bahwa kebiasaan buruk seperti merokok yang dilakukan oleh orang tua, keterbatasan pengetahuan tentang gizi, dan kondisi sosial ekonomi yang rendah sering menghambat keberhasilan program pengentasan *stunting*. Rumah Zakat juga mencatat adanya perbedaan persepsi sosial-budaya di beberapa daerah mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan, yang memperlambat pelaksanaan program-program kesehatan di wilayah tertentu.

Ke depan, peluang besar bagi filantropi di sektor pendidikan dan kesehatan terletak pada

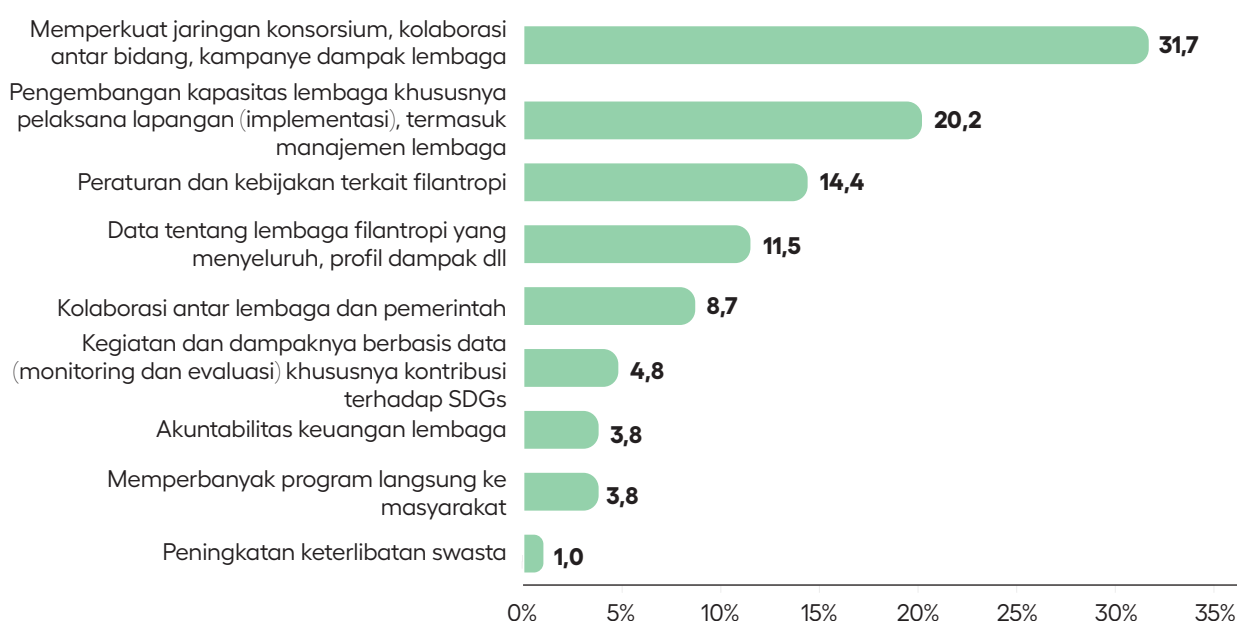
kolaborasi lintas sektor. Kemitraan antara filantropi, pemerintah, dan sektor swasta menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Misalnya, program kolaboratif yang melibatkan lembaga filantropi, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat untuk memperluas akses pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Sebagai contoh, Yayasan Pendidikan Astra–Michael D. Ruslim (YPA-MDR) berkolaborasi dengan B-One Corporation untuk mendukung terbentuknya sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pelatihan bagi para guru binaan. Selain itu, YPA-MDR juga membantu menyediakan sarana dan prasarana TIK yang menjadi elemen penting dalam pengelolaan administrasi serta proses pembelajaran. Penggunaan media TIK ini, sesuai dengan kebutuhan globalisasi yang menuntut pembelajaran siswa dengan akses yang cepat, luas, dan tanpa batas.¹³

Keterlibatan berbagai pihak sudah dimulai sejak tahap peninjauan desain untuk memastikan relevansi program, upaya pengembangan

keberlanjutan program dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah untuk dapat melanjutkan program dan meningkatkan dampak positif yang telah dicapai. Selain itu, kolaborasi antar lembaga filantropi secara umum atau sosial lainnya mampu menyumbang sumber pendanaan sebesar 3%, sehingga memungkinkan implementasi program yang lebih luas bagi masyarakat.¹⁴

Ditambah lagi, perubahan iklim dan isu keberlanjutan mulai menjadi perhatian utama dalam filantropi di Indonesia. Banyak lembaga filantropi yang mulai menyelaraskan program-program mereka dengan agenda global terkait perubahan iklim. Di sektor kesehatan, dampak perubahan iklim dapat memengaruhi prevalensi penyakit dan akses air bersih yang akan menjadi fokus baru bagi program-program filantropi. Di sektor pendidikan, filantropi dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan pendidikan lingkungan yang dapat mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

Grafik 1.6. Rekomendasi Agenda Bersama



SUMBER: INDONESIA PHILANTHROPY OUTLOOK 2024



Menurut laporan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, filantropi di sektor pendidikan dan kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan pendanaan dan distribusi yang perlu diatasi, masih berpotensi untuk menciptakan dampak sosial yang besar. Kolaborasi lintas sektor dan adopsi teknologi dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Melalui dukungan filantropi yang berkelanjutan dan terukur, Indonesia dapat memperkuat sumber daya manusianya dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan adil.

1.4. Perkumpulan Filantropi Indonesia sebagai Organisasi Filantropi

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) didirikan pada tahun 2007 sebagai wadah bagi para filantropis, yayasan, perusahaan, dan lembaga non-pemerintah di Indonesia untuk memfasilitasi serta memperkuat gerakan filantropi nasional. Berangkat dari visi untuk

mewujudkan ekosistem filantropi yang tangguh dan mendukung pencapaian keadilan sosial, keberadaan PFI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga-lembaga filantropi dalam menjalankan peran sosial mereka serta menyelaraskan program-program yang dijalankan dengan agenda pembangunan nasional dan global, terutama SDGs.

PFI memiliki misi untuk meningkatkan jumlah dan kualitas filantropi di Indonesia dengan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga filantropi agar dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam pengembangan masyarakat sipil. PFI juga berkomitmen untuk mendorong kemitraan multi-sektor dalam kegiatan filantropi, khususnya dengan memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam melaksanakan tugasnya, PFI berupaya untuk menciptakan platform yang inklusif, di mana para pelaku filantropi dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, serta strategi untuk memperbesar dampak sosial dari program-program yang mereka jalankan.

Sebagai asosiasi yang berisi lebih dari 200 anggota yang terdiri dari yayasan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, serta individu filantropis, PFI mengemban beberapa fungsi penting. Pertama, PFI berfungsi sebagai fasilitator dalam peningkatan kapasitas lembaga filantropi di Indonesia. Program-program yang difasilitasi oleh PFI berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi dalam manajemen filantropi, dan penguatan tata kelola yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga filantropi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini.

Salah satu program unggulan yang dijalankan oleh PFI adalah *Filantropi Hub*. Program ini dirancang sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara para pelaku filantropi di Indonesia. Melalui *Filantropi Hub*, PFI memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai riset, publikasi, serta inovasi program yang dapat membantu mereka dalam merancang dan mengimplementasikan program yang lebih efektif dan berdampak. *Filantropi Hub* juga menjadi sarana bagi lembaga filantropi untuk saling belajar dari *best practice*, sehingga mereka dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Selain itu, PFI juga memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, PFI berperan sebagai mediator antara lembaga filantropi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan. Kolaborasi ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial yang kompleks dan multidimensi, seperti kemiskinan, ketimpangan pendidikan, serta isu kesehatan masyarakat yang kronis. PFI menyadari bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat



menyelesaikan masalah-masalah ini secara mandiri, sehingga pendekatan kolaboratif diperlukan untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan.

PFI juga sangat aktif dalam mempromosikan penyelarasan program-program filantropi di Indonesia dengan agenda global, khususnya SDGs. Menurut laporan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*,¹⁵ sekitar 89% dari lembaga filantropi yang beroperasi di Indonesia telah menyelaraskan program mereka dengan target-target SDGs, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. PFI berperan sebagai katalis dalam proses ini, dengan memberikan panduan dan dukungan kepada lembaga-lembaga filantropi agar mereka dapat merancang program-program yang tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Adapun buku digital yang telah dipublikasikan sejauh ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan;
2. Buku Saku SDGs;
3. Buku: Berbagi Sehatkan Negeri;
4. Buku: Amil di Era Digital;
5. Pedoman Penyusunan Laporan Berkelanjutan Terintegrasi untuk Sektor Filantropi/Nirlaba;
6. Gambaran Global Baru.

Meskipun PFI telah berhasil menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan kolaboratif, namun tetap ada tantangan yang masih harus dihadapi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PFI adalah bagaimana memastikan bahwa semua anggota lembaga filantropi memiliki kapasitas yang cukup untuk mematuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan oleh publik dan pemerintah. Sebagian besar lembaga filantropi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Untuk itu, PFI terus berupaya meningkatkan program peningkatan kapasitas dan memberikan dukungan teknis kepada anggota-anggotanya.

Ke depan, peran PFI diharapkan semakin penting dalam memperkuat tata kelola filantropi di Indonesia dan memastikan bahwa sektor ini dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat budaya



kolaborasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempromosikan inovasi program, PFI berkomitmen untuk terus mendorong transformasi filantropi di Indonesia menjadi lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

1.5. Metodologi

Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan (Oktober 2024—Juni 2025). Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metode pengumpulan data primer (wawancara mendalam) dan sekunder (studi literatur dan laporan-laporan lembaga filantropi). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu tematik di sektor pendidikan dan kesehatan. Data primer kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan filantropi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi, seperti kebijakan lembaga dan tantangan dalam implementasi program. Data sekunder, yang diperoleh dari laporan lembaga filantropi dan literatur terkait, berfungsi untuk memvalidasi dan melengkapi temuan dari wawancara, serta untuk melakukan triangulasi guna meningkatkan validitas analisis.

Data primer dianalisis melalui proses koding untuk memetakan bentuk operasional dan kelembagaan filantropi dan faktor kunci lainnya. Keseluruhan proses pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola utama dalam kegiatan filantropi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak dan peranannya dalam sektor filantropi di Indonesia.

1.5.1. Wawancara Mendalam Secara Daring

Wawancara mendalam dilaksanakan terhadap 30 lembaga filantropi di Indonesia, yang terbagi menjadi 17 lembaga yang beroperasi dalam sektor kesehatan dan 19 lembaga lainnya dalam sektor pendidikan (terdapat organisasi yang bergerak di dua sektor). Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan representasi



berbagai tipologi lembaga filantropi, distribusi geografis, serta status keanggotaan, baik sebagai anggota PFI maupun bukan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan instansi non-filantropi yang menjalankan kegiatan filantropi, seperti UNESCO dan Yayasan CIPTA, guna memperoleh perspektif yang lebih holistik terkait laporan ini.

Lembaga-lembaga filantropi tersebut dikelompokkan dalam empat kategori utama: (i) filantropi keluarga, (ii) filantropi korporasi, (iii) filantropi independen, dan (iv) filantropi berbasis agama. Filantropi keluarga merujuk pada entitas yang didirikan atau dikelola oleh individu atau kelompok keluarga tertentu, yang biasanya berasal dari tokoh masyarakat atau pengusaha terkemuka. Filantropi korporasi melibatkan entitas perusahaan yang mengalokasikan dana melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau mendirikan yayasan yang menjalankan program filantropi yang terintegrasi dengan kegiatan perusahaan

tersebut. Filantropi independen adalah lembaga yang bersifat otonom dan didirikan oleh individu atau kelompok tanpa afiliasi langsung dengan pihak-pihak lain, bertujuan untuk menjalankan inisiatif filantropi secara mandiri. Filantropi berbasis agama, meskipun berlandaskan prinsip-prinsip keagamaan tertentu, tetap mengimplementasikan program yang tidak terbatas pada komunitas agamanya sendiri, namun meluas untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas.

Proses wawancara ini melibatkan narasumber yang terdiri dari pimpinan lembaga, direktur komunikasi, manajer program, serta pejabat di tingkat direktur dan manajer lainnya.

1.5.2. Studi Literatur

Studi literatur dilaksanakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui kajian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan aktivitas lembaga filantropi di Indonesia. Penyusunan laporan ini mengintegrasikan telaah dan kajian atas 48 publikasi lembaga filantropi, tidak hanya berupa laporan tahunan, tetapi juga laporan khusus inisiatif tematik, misalnya laporan “Dampak Pelayanan Pengasuhan Berbasis Masyarakat pada Tumbuh Kembang Anak” yang diterbitkan oleh Tanoto Foundation dan buku profil PUSPA oleh CISDI. Dokumen dan publikasi lembaga filantropi menjadi rujukan utama untuk memahami prioritas, penjelasan program, pola intervensi, serta komitmen yang diarahkan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu, studi literatur juga mencakup:

1. 115 artikel media nasional dan internasional (Katadata, Media Keuangan, dan lain-lain),
2. 23 hasil penelitian dan publikasi lembaga riset dan universitas, termasuk publikasi OECD, World Bank, UNDP, dan lembaga lainnya
3. 14 dokumen resmi pemerintah (antara lain laporan Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan instansi lainnya).

1.5.3. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam proses pengumpulan data publikasi buku ini mencakup:

Kesulitan dalam memperoleh kesediaan wawancara dari beberapa narasumber, sehingga diperlukan upaya pencarian alternatif informan secara berkelanjutan.

Keterbatasan jumlah informan dari lembaga non-PFI, yang memengaruhi variasi perspektif yang dapat dikumpulkan.

Terbatasnya akses terhadap laporan-laporan lembaga filantropi akibat perbedaan waktu penerbitan laporan antar lembaga, yang berdampak pada kelengkapan data yang tersedia.

Referensi

1. Candid & Center for Disaster Philanthropy. (2020). *Philanthropy and COVID-19 in the first half of 2020*. <http://doi.org/10/gg72df>
2. Candid & Center for Disaster Philanthropy. (2021). *Philanthropy and COVID-19 Measuring one year of giving*. <http://doi.org/10/gh5dzk>
3. Charities Aid Foundation. (2023, November 9). *Indonesia retains top place in World Giving Index with Ukraine climbing to second most generous country*. Charities Aid Foundation. <https://www.cafonline.org/home/about-us/press-office/indonesia-retains-top-place-in-world-giving-index-with-ukraine-climbing-to-second-most-generous-country>
4. Murdaningsih, D. (2018, October 17). Yayasan astra inisiasi sekolah berbasis IT. *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/pgqmf8368/yayasan-astra-inisiasi-sekolah-berbasis-it>
5. OECD. (2024, September 20). *Statement on Philanthropy's vision for the United Nations' Summit of the Future and beyond*. OECD.
6. <https://www.oecd.org/en/about/news/announcements/2024/09/statement-on-philanthropys-vision-for-the-united-nations-summit-of-the-future-and-beyond.html>
7. Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2021a). *Klaster Filantropi Pendidikan*. <https://pendidikan.filantropi.or.id/>
8. Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2021b, March 9). *Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan Pedoman Majelis Etik*. Perhimpunan Filantropi Indonesia.
9. <https://filantropi.or.id/repositori/kode-etik-filantropi-indonesia-kefi/>
10. Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2024a, July 2). *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*. https://filantropi.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Indonesia-Philanthropy-Outlook-2024_INA_compressed.pdf
11. Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2024b, October 21). *Pentingnya Enabling Environment bagi Filantropi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Perhimpunan Filantropi Indonesia. <https://filantropi.or.id/berita-nasional/enabling-environment-filantropi/>

Bab 2

Membangun Pendidikan Berkualitas Melalui Filantropi di Indonesia



2.1. Menuju Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Pendidikan yang berkualitas memainkan peran yang krusial dalam pembangunan bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejatinya, mendapatkan pendidikan yang berkualitas merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tertera pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Amanat ini lebih lanjut diimplementasikan melalui berbagai kebijakan, salah satunya alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah.

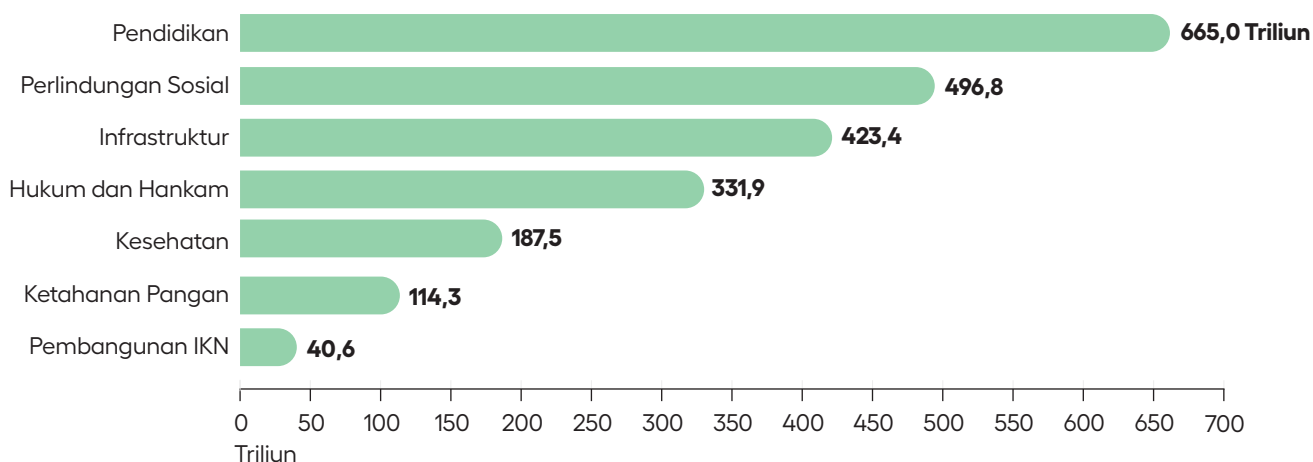
Komitmen pemenuhan 20% Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan telah ditunjukkan oleh pemerintah sejak tahun 2009. Pada 2024, anggaran pendidikan mencapai Rp665 triliun, tertinggi di antara 6 sektor belanja prioritas lainnya, yaitu perlindungan sosial, infrastruktur, hukum dan pertahanan-keamanan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pendidikan masih

menjadi menjadi sektor prioritas. Diketahui anggaran pendidikan yang diusung di 2025 mencapai Rp724,3 triliun, tertinggi sepanjang sejarah.¹ Program prioritas pendidikan Prabowo-Gibran pun tertuang dalam Asta Cita 4 mengenai pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya dipenuhi melalui komitmen terhadap pendidikan yang bermutu. Komitmen tersebut akan dilakukan melalui penguatan sistem pendidikan nasional, yakni dengan membenahi kurikulum pendidikan tinggi, meningkatkan dana riset, menyediakan beasiswa, hingga meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan peneliti. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) juga menekankan pentingnya sistem pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, dengan fokus pada tiga program utama, yaitu revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Unggul Garuda, dan digitalisasi pembelajaran matematika dan saintek.

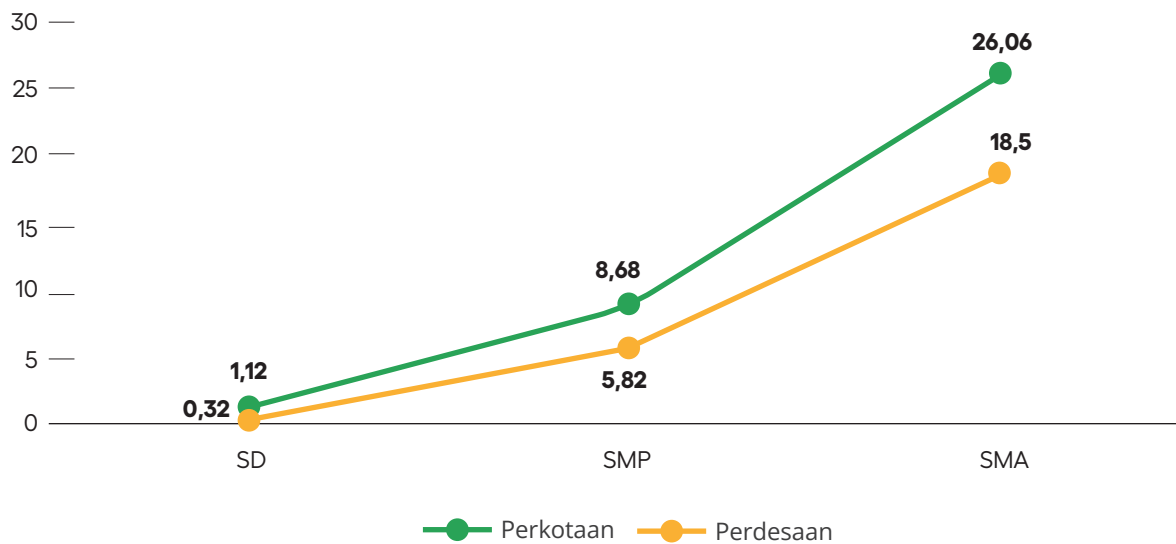
Meskipun Indonesia telah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, anggaran tersebut hanya 2,9% dari produk domestik bruto (PDB). Berbeda dengan Malaysia dan Vietnam yang telah menerapkan lebih dari 3,5% dari PDB negaranya.² Kenyataannya, hasil yang

Grafik 2.1. Pendidikan Prioritas Terbesar APBN 2024



SUMBER: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 2024

Grafik 2.2 Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal (2023)



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK

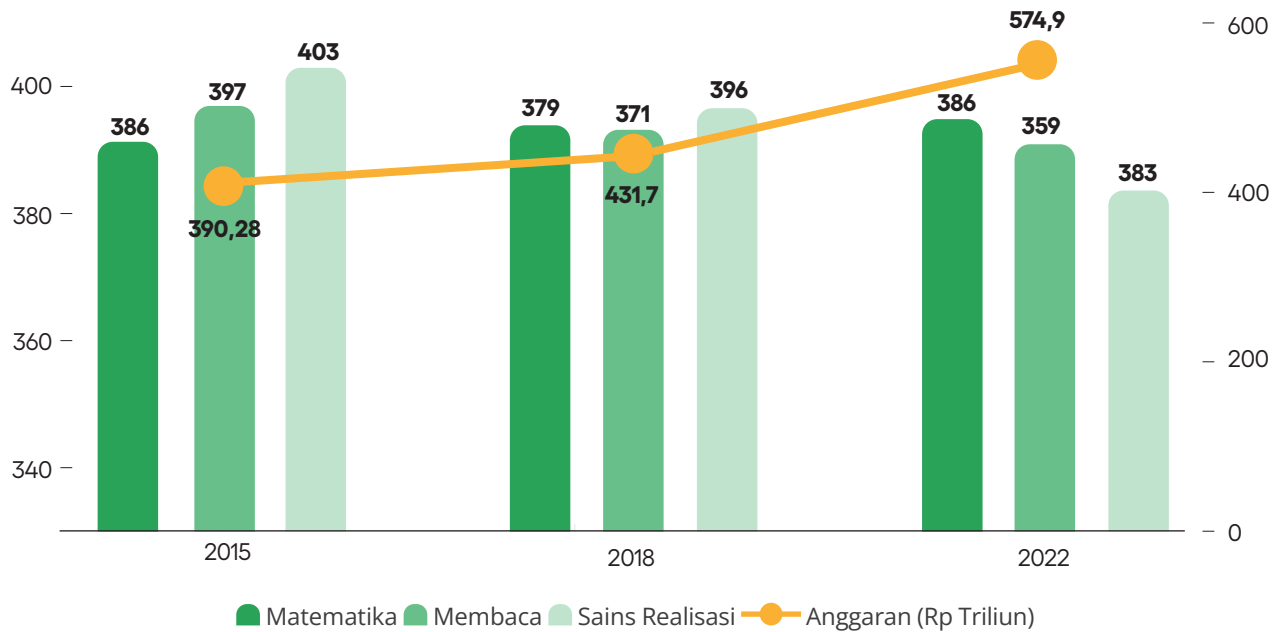
diharapkan dari kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan antara pendidikan di daerah urban dan rural masih sangat lebar. Di banyak daerah pelosok, fasilitas pendidikan yang memadai masih sulit dijangkau, bahkan sekitar 3 juta anak Indonesia belum pernah mengenyam bangku sekolah. Berdasarkan data BPS, angka anak tidak sekolah (ATS) di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan dan semakin tinggi jenjang pendidikan ATS juga semakin tinggi.

Selain itu, jika membandingkan realisasi anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun 2015—2022, nyatanya skor PISA justru menunjukkan penurunan. Kemampuan matematika, sains, dan membaca pelajar di Indonesia semakin menunjukkan penurunan pada PISA 2022. Meskipun negara lain juga turut mengalami penurunan skor pada tahun tersebut, tetapi kemampuan siswa masih di atas rata-rata. Sementara Indonesia, baru sekitar 18% siswa yang mencapai level dua dalam matematika, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD lainnya (69%).³

Berdasarkan data tersebut, kebijakan anggaran ini belum menghasilkan hasil yang optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi, dari pengelolaan yang tidak efektif, ketimpangan akses, dan kurangnya fokus pada kualitas pendidikan. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pendidikan tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Ekosistem filantropi pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitasnya. Berbagai pemangku kepentingan di dalam ekosistem ini seperti lembaga pemerintah, lembaga filantropi, akademisi, sektor swasta, organisasi internasional, maupun masyarakat ikut memiliki andil dalam pelaksanaan filantropi pendidikan.

Kolaborasi antar *stakeholder* ini diharapkan akan mampu mempercepat peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan di Indonesia. Bagian ini akan mengulas *key stakeholder* filantropi di bidang pendidikan, studi kasus dan analisis dampak filantropi di isu pendidikan, serta potensi filantropi pendidikan di Indonesia.

Grafik 2.3. Realisasi Anggaran dan Skor PISA Indonesia



SUMBER: OECD DAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2.2 Key Stakeholder Filantropi Pendidikan Indonesia

Lembaga filantropi memainkan peran penting dalam membangun kesadaran publik mengenai isu-isu pendidikan. Mereka memainkan peran penting dalam mendukung upaya peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan luasnya wilayah dan ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi, menyebabkan banyak daerah di Indonesia yang kemudian masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur pendidikan, kualitas pengajaran, dan akses terhadap fasilitas pendidikan layak. Lembaga filantropi hadir sebagai pelengkap peran pemerintah dalam mempercepat penyediaan sarana belajar dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Untuk itu, kami telah mewawancarai 19 lembaga filantropi di bidang pendidikan dan satu organisasi pendidikan (UNESCO) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Lembaga tersebut rata-rata telah beroperasi

lebih dari tiga tahun dan telah melaksanakan berbagai program pendidikan baik di dalam maupun luar negeri.

Dari proses wawancara tersebut, kami telah mengidentifikasi fokus program dari masing-masing lembaga filantropi ke dalam 11 kategori intervensi pendidikan, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, hingga pemberian beasiswa. Dari 11 kategori tersebut, beberapa program menjadi program populer dari banyak lembaga filantropi yang kami wawancarai, seperti program pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas guru.

Pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah banyak dilakukan karena dinilai memiliki peran penting terhadap kecerdasan anak, baik secara intelektual maupun emosional. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, angka anak yang tidak sekolah masih cukup tinggi bahkan

Tabel 2.1. Background Narasumber Organisasi Filantropi di Sektor Pendidikan

Status Keanggotaan	Cakupan Wilayah	Jenis Organisasi					Grand Total
		Corporate Foundation	CSR	Faith-based Organization	Independent	Family foundation	
Anggota PFI	Nasional			5	3		8
	Regional		1		2	1	4
Anggota PFI Total							12
Non-Anggota PFI	Lokal				2		2
	Nasional	2			1		3
	Nasional dan Internasional						
Non-Anggota PFI Total							5
Grand Total							17

SUMBER: IDI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PFI DAN KATADATA BERSAMA 19 LEMBAGA FILANTROPI BIDANG PENDIDIKAN, 2024:

dari jenjang pendidikan terendah. Seperti yang disampaikan oleh Gunawan Salim, ketua pengurus Yayasan Pendidikan Astra–Michael D. Ruslim dalam sesi wawancara, pemilihan inisiatif sekolah binaan SD, SMP, dan SMA dilakukan karena melihat masih tingginya angka putus

sekolah di berbagai daerah. Motivasi ini lahir dari pengamatan langsung terhadap dampak krisis yang dihadapi banyak anak di Indonesia. Sementara itu, isu kesetaraan gender di wilayah pendidikan belum banyak disinggung secara eksplisit oleh lembaga yang kami wawancarai.



Tabel 2.2 Fokus Program Key Stakeholder Filantropi Pendidikan di Indonesia

Lembaga	Pendidikan Dasar dan Menengah	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Guru dan Manajemen Sekolah	Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Pendidikan Vokasi	Beasiswa	Pendidikan Tinggi	Advokasi	Kesetaraan Gender	Literasi & Numerasi
CT Arsa Foundation (sejak 2005)											
Great Ednesia - Dompot Dhuafa (sejak 1994)											
Gerakan Indonesia Mengajar (sejak 2010)											
Happy Hearts Indonesia (sejak 2013)											
Makadaya (sejak 2021)											
PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (sejak 2016)											
Rumah Zakat (sejak 1998)											
Tanoto Foundation (sejak 1981)											
Wahana Visi Indonesia (sejak 1998)											
William & Lily Foundation (sejak 2009)											
Yatim Mandiri (sejak 1994)											
Yayasan Bakti (sejak 2009)											
Yayasan Balita Sehat (Foundation for Mother and Child Health Indonesia) (sejak 2001)											
Yayasan Buddha Tzu Chi (sejak 1993)											
Yayasan Guru Belajar (sejak 2016)											
Yayasan Indah Berbagi (sejak 2018)											
Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi (YKIP) (sejak 2022)											
Yayasan Kitabisa (sejak 2013)											
Yayasan Pendidikan Astra – Michael D. Ruslim (YPA – MDR) (sejak 2009)											

Grafik 2.4 Peta Sebaran Lembaga Filantropi Pendidikan



SUMBER: LANSKAP FILANTROPI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, 2024

Secara lebih mendetail, fokus program masing-masing lembaga diturunkan ke dalam kegiatan utama dengan lokasi, target populasi, sumber pendanaan, dan bentuk kerja sama yang beragam (Tabel 2.3). Berdasarkan lokasi kerja dan intervensinya, para lembaga filantropi pendidikan ini banyak tersebar di Papua, Jawa, dan Nusa Tenggara (Grafik 2.3). Meskipun seluruh provinsi di Indonesia sudah diintervensi dengan program-program filantropi, tetapi masih diperlukan upaya pemerataan, agar wilayah lain terutama Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mendapatkan akses terhadap program-program filantropi tersebut.

Untuk melaksanakan programnya secara efektif, pendanaan menjadi elemen utama yang diperlukan. Lembaga filantropi biasanya memperoleh satu atau lebih sumber pendanaan, seperti donasi perorangan, dana korporasi, dana lembaga internasional, dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), serta dana pemerintah. Bahkan saat ini beberapa lembaga filantropi telah menjalankan model bisnis sosial (*social enterprise model*) dengan melibatkan

masyarakat setempat, di mana keuntungan dapat digunakan untuk mendanai program. Model pendanaan jangka panjang seperti ini dapat melatih kemandirian masyarakat dan penerima manfaat serta menjadi upaya keberlanjutan program.

Keberlanjutan program juga diupayakan melalui kemitraan strategis yang dijalin dengan berbagai pihak. Berbagai bentuk kemitraan dilakukan seperti dengan pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga kemitraan internasional. Misalnya, Tanoto Foundation selalu berkolaborasi dengan pemerintah, mulai dari proses perencanaan hingga implementasi program. Tanoto tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga aktif terlibat dalam pengembangan kebijakan, mengikuti proses perencanaan pemerintah, dan memberikan kontribusi substantif. Pendekatan ini memungkinkan program yang mereka jalankan menjadi komplementer dan memberikan nilai tambah pada inisiatif pemerintah.

Berikut ringkasan fokus program, kegiatan utama, dan lokasi serta target populasi yang dituju oleh lembaga filantropi pendidikan yang kami wawancarai.

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Kerja Sama
1	CT Arsa Foundation (sejak 2005)	Memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas	PAUD, sekolah di pedalaman, SMA unggulan, beasiswa, Pi Mengajar (Pijar), mobil pintar, mobil multimedia, mobil iqro, mobil netra	Lokasi: Deli Serdang, Sukoharjo, Remote Area (Wamena, Sumba, Lelogama, Nunuanah, Tana Toraja) Target: Anak berprestasi dari keluarga prasejahtera	95% dana mandiri perusahaan dan 5% lembaga donor	Komunitas Arsa, BUMN, Yayasan, Lembaga donor
2	Great Edunesia - Dompot Dhuafa (sejak 1994)	Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pendidikan	Program persekolahan, program vokasi dan perguruan tinggi, advokasi, riset, beasiswa	Lokasi: 38 provinsi Target: Masyarakat dhuafa dan keluarga prasejahtera	Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), CSR, swasta, Crowdfunding	Mitra di kantor cabang, komunitas, individu, lembaga yayasan lokal, alumni
3	Gerakan Indonesia Mengajar (sejak 2010)	Pemerataan pendidikan dengan menciptakan guru-guru yang berkualitas.	Pengiriman Pengajar Muda (PM), peningkatan kapasitas guru, pemberdayaan masyarakat lokal.	Lokasi: 134 desa di 38 kabupaten Target: Sekolah dasar di pelosok Indonesia	Donatur, skema kemitraan, pendanaan publik	Guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah
4	Happy Hearts Indonesia (sejak 2013)	Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas di daerah 3T	Pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah, perpustakaan, dan penyediaan akses air bersih di sekolah, pelatihan manajemen keuangan sekolah	Lokasi: Pulau Jawa, NTB, NTT Target: Sekolah Terdampak Bencana dan Sekolah Daerah 3T yang telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).	Crowdfunding, penggalangan dana di sekolah, penyelenggara-an acara	Donatur, komunitas, pemerintah daerah

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Kerja Sama
5	Makadaya (sejak 2021)	Pendidikan non-formal khususnya kewirausahaan sosial	Makadaya Fellowship	Lokasi: Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB Target: Wirausahawan	Individu, lembaga, lokal, internasional	Makadaya Fellow dan organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan, SDG, serta pengembangan ekonomi
6	PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (sejak 2016)	Human development, economic empowerment, sustainable tourism	Beasiswa vokasi (sekolah menengah kejuruan, diploma)	Lokasi: Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, NTB Target: Lulusan SMP dan SMA di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat	Dana mandiri perusahaan	Pemerintah daerah
7	Rumah Zakat (sejak 1998)	Pemerataan pendidikan dasar, peningkatan keterampilan, dan literasi orang dewasa	Beasiswa Sekolah Juara (SD & SMP), beasiswa hingga tingkat S1, Rumah Vokasi	Lokasi: 33 provinsi Target: Masyarakat dhuafa dan prasejahtera	Dana ZISWAF, donasi individu, komunitas, serta korporasi.	Pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta
8	Tanoto Foundation (sejak 1981)	Mengembangkan potensi individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif.	Pengembangan dan pendidikan anak usia dini, peningkatan sekolah untuk literasi dan numerasi dasar, pendidikan profesi guru prajabatan, pengembangan kepemimpinan, pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu, program professorship dan riset medis.	Lokasi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Singapura, Tiongkok, Brasil Target: Anak usia dini, pendidikan dasar, perguruan tinggi dan generasi muda, aparatur negara.	Dana keluarga Tanoto	Pemerintah, lembaga multilateral, komunitas lokal, lembaga pendidikan dan riset, lembaga filantropi dan CSO, serta sektor swasta

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Kerja Sama
9	Wahana Visi Indonesia (sejak 1998)	Perbaikan akses anak terhadap pendidikan yang berkualitas, pendidikan dasar 9 tahun dengan 3 area besar: cakap membaca, cakap menulis, dan keterampilan hidup.	Pendidikan PAUD, peningkatan literasi, pendidikan karakter kontekstual, pendidikan non-formal, perencanaan berbasis data, pelatihan guru, dan peningkatan kapasitas lokal.	Lokasi: 81 kota/kabupaten di 18 provinsi Target: Wilayah 3T, wilayah interest mitra/donor	50% donasi individu dan 50% dari sumber lain seperti lembaga donor, korporasi, dan pemerintah	World Vision, relawan, gereja lokal, alumni, pemerintah daerah, dan komunitas lokal
10	William & Lily Foundation (sejak 2009)	Pengembangan anak usia dini, literasi dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal	Membangun kapasitas aktor, meningkatkan kapabilitas aktor, mendukung forum dan jaringan pemangku kepentingan, serta mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan melakukan advokasi ke pemerintah kabupaten	Lokasi: Sumba Barat Daya, NTT Target: Anak-anak di wilayah timur Indonesia	Dana keluarga William dan Lily Suryajaya	Guru, posyandu, pemangku kepentingan daerah, mitra lokal dan internasional
11	Yatim Mandiri (sejak 1994)	Pemberdayaan anak yatim dan dhuafa dalam bidang akademik, non-akademik, dan agama	Sanggar Genius, Sanggar Al-Qur'an, Beasiswa Yatim Mandiri, Alat Sekolah Ceria, dan ICMBS	Lokasi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kep Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan Target: Yatim dan dhuafa	Dana ZISWAF serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga.	Lembaga pemerintah, perusahaan, dan pemerintah
12	Yayasan BakTI (sejak 2009)	Pengelolaan dan pembangunan di kawasan Indonesia timur	Jaringan pertukaran pengetahuan, platform media, dan kegiatan berbagi pengetahuan melalui Forum Kawasan Indonesia Timur	Lokasi: 12 provinsi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Target: peneliti, BAPPEDA	Mitra pembangunan internasional	Pemerintah daerah, UNICEF, KONEKSI, INKLUSI

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Kerja Sama
13	Yayasan Balita Sehat (Foundation for Mother and Child Health Indonesia) (sejak 2001)	PAUD-HI, social enterprise, peningkatan kapasitas kader posyandu dan guru PAUD	PAUD binaan, Mobile Library	Lokasi: Kep. Riau, DKI Jakarta, Bogor, Timor Tengah Selatan, Timor Barat Target: Ibu dan anak di wilayah pelosok	Donor individu, Bank of America	Lembaga lokal dan internasional
14	Yayasan Buddha Tzu Chi (sejak 1993)	Pendidikan komprehensif dan menyeluruh	Beasiswa pendidikan, bantuan pembangunan sekolah	Lokasi: DKI Jakarta, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua Target: Anak dari keluarga prasejahtera	Dana amal, CSR, penggalangan dana, dana operasional pengurus	Pemerintah daerah, relawan, Kementerian ATR-BPN, dan kementerian/ lembaga lainnya
15	Yayasan Guru Belajar	Pemberdayaan pendidik, pengembangan guru, pemimpin, dan pendampingan sekolah/ madrasah	Kampus Guru Cikal, Kampus Pemimpin Merdeka, Cerita Guru Belajar, Temu Pendidik Nusantara	Lokasi: 82 daerah rural hingga pelosok Target: Guru	Pemberi grant, bootstrap (membuat produk langsung dan dijual ke masyarakat)	50 Dinas Pendidikan daerah, Kementerian Agama, Komunitas Guru Belajar Nusantara
16	Yayasan Indah Berbagi (sejak 2018)	Peningkatan keterampilan	Sekolah Relawan, pelatihan keterampilan, digital marketing	Lokasi: Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Target: Anak muda di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses pelatihan keterampilan	Crowdfunding dan kemitraan dengan swasta	Pemerintah, swasta, masyarakat umum
17	Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi (YKIP) (sejak 2022)	Pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pendidikan minimal 12 tahun	Pemberian beasiswa, pendampingan, dan pelatihan keterampilan	Lokasi: Bali Target: Anak-anak dari keluarga tidak mampu, yatim piatu, korban bencana, dan/ atau disabilitas	Global Giving, crowdfunding, hibah dari institusi dan perusahaan, donatur individu sejak awal berdirinya YKIP	- Kepala daerah - Sekolah - Universitas - Komunitas remaja setempat

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Kerja Sama
18	Yayasan Kitabisa (sejak 2013)	Penggalangan dana pendidikan	Melalui #BisaBantuPendidikan	Lokasi: 38 provinsi Target: Berbagai kalangan	Crowdfunding	
19	Yayasan Pendidikan Astra – Michael D. Ruslim (YPA - MDR) (sejak 2009)	Bantuan edukasi dan transformasi anak sekolah	Membangun karakter, pelatihan guru, pelatihan keterampilan, seni budaya	Lokasi: 14 kabupaten yang terletak di Provinsi Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, NTT, Target: Sekolah di daerah terpencil	Astra International, CSR anak perusahaan Astra	Sekolah binaan, pemerintah daerah, anak perusahaan Astra

2.3 Studi Kasus dan Analisis Dampak Filantropi di Sektor Pendidikan

Pelaksanaan program filantropi banyak menysar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta perdesaan di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki akses sulit terhadap pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan, dan sebagai bukti penerapan prinsip inklusi berkeadilan sosial yang dikenal dengan prinsip *no one left behind* dalam SDGs.

Selain berdasarkan prinsip dan nilai yang dimiliki oleh masing-masing lembaga filantropi, sebagian besar inisiatif program pendidikan yang dimiliki muncul dari masalah yang timbul di masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan akses pendidikan, tingginya angka putus sekolah, kualitas pendidikan yang tidak merata, keterbatasan akses pendidikan inklusif, rendahnya literasi dan numerasi, kurangnya keterampilan vokasi dan kesiapan kerja, serta kurangnya akses teknologi dalam pendidikan. Dukungan data yang tersedia secara publik oleh pemerintah pun sangat membantu lembaga filantropi untuk menentukan inisiatif serta wilayah sasaran calon penerima manfaat. Sehingga data yang akurat mendukung bantuan

yang diberikan tepat sasaran dan manfaat dapat diterima secara maksimal.

Pada sub-bab ini kami akan membahas studi kasus pada lima intervensi yang paling banyak dilakukan oleh 19 lembaga yang kami wawancarai. Intervensi tersebut terkait akses pada pendidikan anak usia dini (PAUD), akses dan kualitas pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi yang mencakup pendidikan vokasi dan sarjana.

2.3.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai Sarana Pembentukan Karakter

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan yang dilalui sebelum pendidikan dasar, berupa upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Pendidikan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁴

Jenjang pendidikan ini memainkan peran krusial dalam membentuk perkembangan anak secara fisik, emosional, sosial, kognitif,

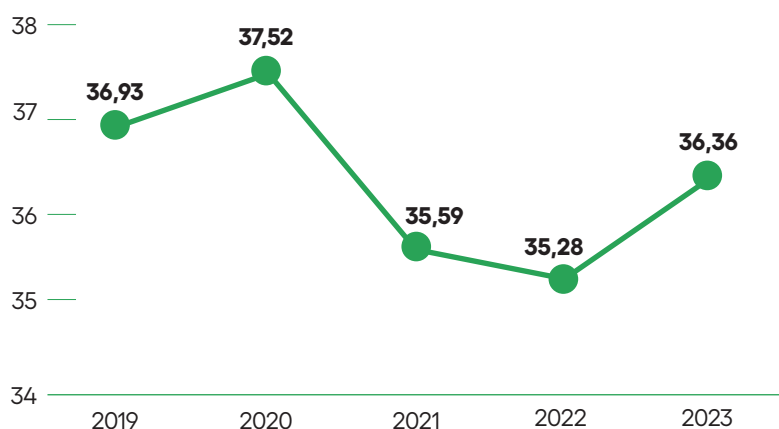
dan linguistik. Laporan Asia Philanthropy Circle juga memaparkan salah satu *best practice* dari Ayala Foundation Inc. terkait intervensi terhadap anak usia dini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun memperkuat ketahanan komunitas. Diantara praktik baik yang diangkat adalah Ayala Foundation Inc. dan Ramon Aboitiz Foundation Inc. (RAFI) yang mengaitkan intervensi anak usia dini dengan upaya menjawab krisis pembelajaran di Filipina sekaligus memperkuat resiliensi komunitas.⁵

Menurut data BPS (2024), angka partisipasi kasar (APK) anak yang mengikuti PAUD fluktuatif, bahkan cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada 2023, APK PAUD hanya 36,36, artinya hanya 36,4% anak usia 3-6 tahun di Indonesia yang mengikuti pendidikan PAUD.⁶ Selain akses lokasi yang terbatas, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan usia dini dinilai masih kurang. Kualitas PAUD dan guru PAUD di Indonesia juga masih jauh dari ideal. Masih banyak guru yang belum memahami perkembangan anak sesuai usianya. Menurut Neraca Pendidikan 2023, hanya 55,7% guru PAUD yang bergelar D4/S1. Angka ini terendah dibandingkan guru pada tingkat pendidikan lainnya.

Pemerintah telah mengembangkan pelayanan terpadu holistik dari sektor terkait untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini yang disebut Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013.⁷ Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satu yang paling menantang adalah aksesibilitas layanan PAUD-HI, terutama di daerah pedesaan.⁸ Selain itu, sebuah studi di Indonesia pada 2022 menyebutkan terdapat empat tantangan implementasi PAUD-HI, yaitu belum maksimalnya pemahaman guru terhadap PAUD-HI, minimnya sosialisasi dari dinas atau pemerintah setempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam layanan PAUD, serta terbatasnya sarana dan prasarana.⁹

Berbagai lembaga filantropi membantu pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut. Misalnya, William & Lily Foundation (WLF) bekerja sama dengan Australia Council for Educational Research (ACER) dan Adaro Foundation telah bekerja untuk meningkatkan akses layanan pengembangan anak usia dini dengan mengimplementasikan program PAUD-HI dengan mengintegrasikan layanan gizi, pendidikan, dan kesejahteraan anak di satu tempat agar berfungsi secara efektif.

Grafik 2.5. Angka Partisipasi Kasar PAUD (2019-2023)



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK

Program dilaksanakan melalui 4 fase dalam rentang waktu 2 tahun (2021—2023) di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kemudian diperluas ke seluruh NTT pada akhir 2023 hingga saat ini. Dalam programnya, WLF menasar aktor kunci pendidikan anak usia dini yang terintegrasi, antara lain guru PAUD, kader posyandu, dan kader Bina Keluarga Balita (BKB). Para aktor tersebut diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya. Berkat adanya intervensi yang dilakukan, WLF dan rekan berhasil mengembangkan modul untuk guru PAUD serta kader posyandu. Pengajar menjadi lebih terarah dalam memberikan pengajaran dan dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan harian (RPPM dan RPPH) yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak.¹⁰

Konsep PAUD-HI juga diterapkan oleh Yayasan Balita Sehat. Yayasan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan layanan posyandu dan pembinaan kesehatan. Melalui pendekatan langsung ke tingkat desa, Yayasan Balita Sehat menjangkau wilayah terpencil yang sama sekali tidak memiliki sekolah PAUD. Mereka bekerja langsung dengan kepala desa, kader posyandu, dan guru PAUD untuk mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakan program.

Saat ini Yayasan Balita Sehat telah memiliki 20 PAUD binaan yang tersebar di Cipete (Jakarta Selatan), Bojonggede (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Timor Barat (Nusa Tenggara Timur). Keberhasilan program terlihat dari dampaknya terhadap anak-anak yang mengikuti PAUD binaan menunjukkan perbedaan signifikan dalam prestasi pendidikan dibandingkan anak-anak yang tidak mengikuti program. Adanya intervensi oleh dua lembaga ini, secara tidak langsung membantu meningkatkan APK PAUD di Provinsi Nusa Tenggara sebesar 6,17% selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2020.

PAUD terbukti dapat mendorong hasil



pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Dalam kajian pustaka yang dilakukan oleh Tanoto Foundation dalam laporan Menembus Batas Potensi Belajar Anak, intervensi pada anak usia dini berperan secara signifikan dalam menentukan kualitas belajar anak. Ditemukan bahwa investasi pada anak usia dini akan memberikan hasil yang maksimal pada jenjang pendidikan selanjutnya. Hal ini diperkuat oleh temuan evaluasi Rumah Anak SIGAP, salah satu inisiatif Tanoto Foundation dalam pengembangan dan pendidikan anak usia dini melalui program SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi), berupa model pengasuhan usia dini berbasis komunitas. Rumah Anak SIGAP ini menasar anak usia 0–3 tahun melalui intervensi penguatan kapasitas pengasuh, penyediaan stimulasi dini, dan pembangunan ekosistem lokal yang mendukung. Evaluasi kuantitatif menggunakan alat ukur Caregiver Reported Early Development Instruments (CREDI)¹¹ menunjukkan bahwa setelah hampir dua tahun mengikuti program, lebih dari 55% anak dalam kelompok intervensi mencapai skor perkembangan di atas rata-rata normatif global.



Selain itu, kualitas praktik pengasuhan juga menunjukkan perbaikan yang konsisten dan signifikan, terutama dalam dimensi *verbal responsivity*, keterlibatan emosional, dan penyediaan materi belajar yang sesuai usia. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika pengasuh memiliki pemahaman dan kapasitas yang baik, mereka mampu menciptakan lingkungan rumah yang kondusif untuk perkembangan karakter dan kesiapan belajar anak. Dengan demikian, pendekatan PAUD yang menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas tidak hanya berdampak pada kesiapan kognitif anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter melalui penguatan interaksi sosial, disiplin emosional, dan pola pengasuhan yang reflektif.

Selain itu, keluarga berperan penting dalam mendukung kualitas pembelajaran anak usia dini hingga tahapan usia selanjutnya. Namun, masih ada sebagian keluarga di Indonesia yang menganggap PAUD bukanlah suatu kebutuhan. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah dan lembaga filantropi dalam mengadvokasi dan

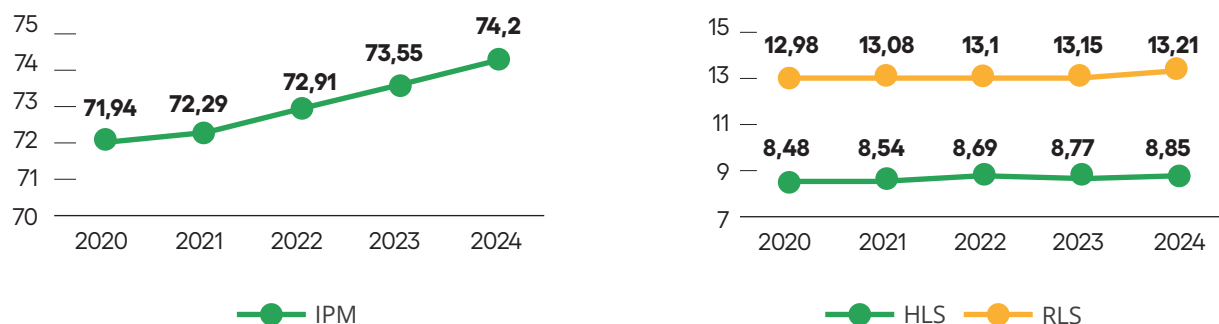
mengintervensi pendidikan anak usia dini sangatlah penting agar perkembangan usia emas anak ini dapat berjalan optimal.

2.3.2 Pendidikan Dasar dan Menengah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dalam lima tahun terakhir. BPS mencatat IPM dari 72,81 di 2020 menjadi 75,02 di tahun 2024. Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) juga turut meningkat. HLS meningkat dari 12,98 (2020) menjadi 13,21 (2024) dan RLS meningkat dari 8,48 (2020) menjadi 8,85 (2024).

Meskipun demikian, capaian RLS ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas, belum menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat). Bahkan angka RLS di Papua Pegunungan hanya 4,21; terendah dibandingkan provinsi lainnya. Artinya rata-rata penduduk di sana tidak menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar.

Grafik 2.56 Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah (2020-2024)



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, 2024

Data-data tersebut menunjukkan jenjang pendidikan dasar dan menengah belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Padahal pemerintah telah menetapkan target wajib belajar 12 tahun sejak 2015. Dalam rentang waktu hampir 10 tahun, Indonesia belum mampu memenuhi target tersebut. Berbagai faktor menyebabkan jenjang pendidikan ini belum dapat dirasakan secara merata, yakni dalam hal akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan.

Adapun pendidikan dasar dan menengah itu sendiri merupakan fondasi utama bagi perkembangan individu. Jenjang pendidikan ini memberikan landasan yang kuat untuk perkembangan intelektual, moral, dan sosial anak-anak. Dengan fondasi pendidikan yang kuat, individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai potensi penuh dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

1. Akses Terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

Anak-anak di daerah terpencil dan kelompok marjinal masih menghadapi kendala dalam mengakses sekolah berkualitas akibat keterbatasan infrastruktur dan tenaga pengajar. Jumlah sekolah yang tidak merata, kondisi kelas yang tidak layak, tenaga pengajar yang jumlahnya

tidak mencukupi, ketimpangan ekonomi turut menyebabkan anak putus sekolah.

Melihat celah tersebut, berbagai lembaga filantropi memiliki program pembangunan sekolah-sekolah dasar dan menengah serta infrastruktur pendukung dengan lokasi dan sasaran yang beragam. Misalnya, Happy Hearts Indonesia memiliki program yang berfokus pada penyediaan akses terhadap pendidikan berkualitas dengan membangun gedung sekolah, perpustakaan, hingga menyediakan akses air bersih di sekolah. Kriteria sekolah yang dibantu adalah sekolah terdampak bencana dan sekolah daerah 3T. Hingga 2024, Happy Hearts telah berhasil membangun 359 sekolah, 27 perpustakaan, dan 8 titik akses air bersih, serta 2 laboratorium komputer.

Selain itu, CT Arsa Foundation membangun Sekolah SMA Unggulan CT Arsa Foundation di Deli Serdang dan Sukoharjo. SMA Unggulan ini menyediakan program beasiswa penuh dengan fasilitas asrama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Sampai saat ini alumni dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation telah tersebar di berbagai PTN dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, CT Arsa Foundation juga membangun fasilitas pendidikan dan perpustakaan di pelosok Indonesia.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan akan guru yang dirasakan oleh sekolah-sekolah di pelosok, Gerakan Indonesia Mengajar dan CT Arsa Foundation mengirimkan relawan pengajar muda dengan membawa bekal pengajaran kreatif. Gerakan Indonesia Mengajar merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik bangsa ke berbagai daerah, khususnya daerah 3T di Indonesia untuk mengisi kekosongan dan mengabdikan sebagai Pengajar Muda (PM) di SD dan masyarakat selama satu tahun. Program ini akhirnya direplikasi oleh berbagai daerah, salah satunya oleh dinas pendidikan di Sumatera Utara untuk diterapkan di daerahnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh CT Arsa Foundation melalui program Pi Mengajar (Pijar) dengan mengirimkan guru muda ke daerah pelosok selama satu tahun. Selain mendidik siswa, mereka juga mendampingi guru lokal dan memberdayakan masyarakat setempat. Relawan diberikan pelatihan intensif yang mencakup



kepemimpinan, psikologi, pendidikan karakter, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Perbaikan Kualitas Pendidikan melalui Peningkatan Kapasitas Guru

Selain akses, rendahnya kualitas pengajaran dan kurikulum yang belum relevan masih terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Tantangan kualitas pengajaran berkaitan erat dengan kualitas guru yang dimiliki saat ini. Kompetensi guru dapat tercermin dari perolehan skor PISA. Pada 2022, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara yang berpartisipasi. Secara keseluruhan, hasil PISA 2022 dapat dikategorikan termasuk yang terendah, setara dengan hasil yang diperoleh pada 2003 dalam membaca dan matematika, dan pada 2006 dalam sains (OECD, 2023:1).¹²

Oleh sebab itu, menciptakan pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan dengan menciptakan guru-guru yang juga berkualitas. Untuk menjawab tantangan kualitas guru secara lebih sistematis, Tanoto Foundation mengembangkan Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) sejak 2018.¹³ Program ini dirancang sebagai inisiatif penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah, melalui pelatihan pedagogi aktif, manajemen sekolah, serta pelibatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PINTAR menggandeng pemerintah pusat dan daerah, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam memperluas dampak dan keberlanjutan program. Pendekatan PINTAR berfokus pada penerapan praktik pembelajaran aktif yang mendorong interaksi dua arah, penggunaan konteks lokal dalam pembelajaran, serta penilaian formatif untuk mendukung perkembangan belajar siswa. Guru-guru didampingi melalui pelatihan tatap muka dan platform pembelajaran daring (e-PINTAR), yang memungkinkan perluasan jangkauan pelatihan



hingga ke daerah dengan keterbatasan akses. Hingga 2023, program ini telah menjangkau 581.072 siswa, melibatkan 41.713 pendidik (guru, kepala sekolah, pengawas sekolah), dan menjalin kemitraan dengan 11.190 sekolah di berbagai wilayah. Selain itu, sebanyak 50.780 calon guru telah mendapat manfaat sejak masa studi di LPTK, serta tersebar di 5 mitra provinsi aktif dan 28 kabupaten mitra aktif.¹⁴ Studi The SMERU Research Institute membuktikan bahwa PINTAR telah meningkatkan praktik pengajaran sebesar 27% dan prestasi siswa hingga 39% di sejumlah mitra sekolah, dibandingkan dengan sekolah yang tidak menerima intervensi.¹⁵

Selain meningkatkan kapasitas guru, Tanoto Foundation aktif mengadvokasi solusi struktural terhadap tantangan distribusi guru yang belum merata. Salah satu inisiatif strategis yang dilakukan adalah mendorong penyerapan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan agar dapat segera mengisi kebutuhan tenaga pengajar di berbagai daerah. Di tingkat nasional, Tanoto Foundation

memberikan dukungan teknis dalam proses koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mempercepat rekrutmen lulusan PPG sebagai aparatur sipil negara. Di tingkat daerah, dialog kebijakan difasilitasi untuk mendorong pemerintah provinsi mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna merekrut guru baru dari lulusan PPG. Fasilitasi ini telah dilakukan di tujuh provinsi, dengan lima di antaranya merupakan wilayah kerja Tanoto Foundation. Selain itu, bersama Kemendikbudristek, Tanoto Foundation berperan dalam pembentukan Konsorsium Pendidikan Daerah.¹⁶

Upaya serupa dalam peningkatan kapasitas guru juga dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Astra–Michael D. Ruslim (YPA-MDR) melalui pembekalan terhadap guru, kepala sekolah, manajemen sekolah, dan komite sekolah. Melalui program Guru Muda Garda Depan (GMGD), YPA-MDR merekrut guru lulusan sarjana pendidikan untuk ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan.



Program ini dilaksanakan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah binaan Astra, melalui keterampilan dan pengetahuan yang komprehensif, untuk menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendorong inovasi di kalangan guru dan siswa. Dampak positif dirasakan oleh sekolah binaan di Rote, Nusa Tenggara Timur. Selama GMGD bergabung dengan sekolah, prestasi akademik dan non-akademik mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat Nasional. Metode pengajaran kreatif dan interaktif yang diterapkan berhasil menumbuhkan minat belajar yang tinggi dan motivasi siswa untuk mencapai prestasi terbaik mereka.¹⁷

Adapun melalui visinya untuk memberdayakan pendidik menjadi penggerak perubahan, Yayasan Guru Belajar (YGB) menginisiasi program pengembangan guru, pemimpin, dan pendampingan sekolah/madrasah untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang menyediakan pengalaman merdeka belajar bagi semua dan setiap anak di Nusantara.¹⁸ YGB sejak tahun 2014 mengadakan forum Temu Pendidik Nusantara. Forum ini dilakukan dengan mempertemukan para pendidik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berbagi praktik baik dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Pada 2024, rangkaian forum Temu Pendidik



Nusantara XI dengan topik “Pemimpin Pendidikan Berdaya” telah dilaksanakan di 50 daerah. Rangkaian kegiatan ini menjadi ajang pembelajaran tahunan bagi guru-guru di nusantara yang mencakup berbagai aktivitas seperti kelas pendidik, kelas penggerak, *talk show* pendidikan, pameran karya murid, Cerdas Cermat guru, pasar solusi pendidikan, dan pemberian Beasiswa Murid Belajar yang diberikan kepada 150 murid dari jenjang dasar, menengah, hingga atas. Forum ini banyak dirasakan manfaatnya oleh para peserta, salah satunya Ibu Ramdani dari SMA Negeri 10 Sinjai yang pernah mengikuti TPN 6. Anak didiknya mengakui bahwa Ibu Ramdani menjadi guru yang lebih berempati setelah mengikuti forum tersebut.¹⁹

YGB juga merancang Kurikulum Pembelajaran dan Kepemimpinan Merdeka Belajar dengan pendekatan praktis, agar pendidik dapat berdaya merancang dan mempraktikkan solusi berlandaskan teori dan sesuai konteks kelas dan daerahnya. Kurikulum ini telah diterapkan di lebih dari 2.200 satuan pendidikan di berbagai penjuru Nusantara.²⁰

Peningkatan kapasitas guru juga dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia dalam program Wahana Literasi. Para guru belajar untuk menggabungkan keterampilan membaca ke dalam kurikulum dan menerima bimbingan yang berkelanjutan. Selain itu, para guru juga diajak belajar menciptakan

lingkungan yang menarik di ruang kelas dan memastikan bahwa anak-anak tetap termotivasi saat belajar membaca.²¹

Di lain sisi, penguatan kapasitas guru sejatinya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang bagaimana kompetensi pedagogis dibentuk secara bertahap sejak interaksi awal anak dengan pengasuh utamanya (orang tua/caregiver utama). Dalam konteks ini, Tanoto Foundation melalui program SIGAP mendesain penguatan sistem pembelajaran dengan peningkatan kapasitas pengasuh anak usia 0–3 tahun serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia 3–6 tahun.²²

Rumah Anak SIGAP menggabungkan berbagai pendekatan untuk memperkuat kapasitas pengasuh anak usia 0–3 tahun di tingkat rumah tangga. Setiap pengasuh mengikuti kelas tematik bulanan yang membahas isu-isu praktis seperti pemberian makan, stimulasi emosi, pengelolaan tantrum, dan pengasuhan tanpa kekerasan. Selain itu, program juga menyelenggarakan sesi bermain bersama anak, kunjungan rumah, dan konsultasi individual. Seluruh kegiatan difasilitasi oleh kader lokal yang telah dilatih secara intensif, memastikan konteks sosial dan budaya pengasuhan tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyampaian materi. Untuk anak usia 3–6 tahun, dukungan Tanoto Foundation difokuskan pada pelatihan guru dan tenaga kependidikan PAUD, peningkatan kapasitas penilik dan pengawas, serta dukungan sarana dan prasarana belajar.

2.3.3 Perbaikan Pendidikan Tinggi melalui Beasiswa

Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada melimpahnya jumlah penduduk usia kerja. Kondisi ini disebut bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Menurut proyeksi BPS, bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada

tahun 2030–2040. Kondisi ini dapat menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja yang ada memiliki keterampilan yang memadai.

Data menunjukkan bahwa angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh penduduk berpendidikan SMP atau lebih rendah (52,3%) dengan proporsi terbesar adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar ke bawah. Sementara itu, individu dengan tingkat pendidikan lanjutan memiliki proporsi terkecil, yakni hanya sebesar 23,2% untuk DI/II/III dan 10,5% untuk lulusan S1/S2/S3.²³ Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan dari sebagian besar angkatan kerja di Indonesia masih sangat rendah.

1. Program Beasiswa Vokasi

Menurut data BPS, kelompok pendidikan SMK memiliki tingkat pengangguran paling tinggi, yakni sebesar 9,01%. Hal ini menunjukkan bahwa, selain ketimpangan akses, kurangnya relevansi pendidikan tinggi khususnya vokasi terhadap kebutuhan pekerjaan juga menjadi persoalan yang dihadapi pada pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Rumah Zakat mengadakan program Rumah Vokasi yang diperuntukkan untuk individu dan kelompok dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yayasan Indah Berbagi juga memiliki program Sekolah Relawan yang menawarkan berbagai pelatihan keterampilan seperti fotografi, videografi, desain, *public speaking*, bahasa Inggris, dan *digital marketing* untuk generasi muda di daerah pinggiran Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki keterbatasan akses pelatihan. Adanya pelatihan melalui Sekolah Relawan ini untuk meningkatkan keterampilan dan menambah penghasilan anak muda di daerah sasaran.

Menyadari kebutuhan untuk mengembangkan tenaga kerja terampil, PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara meluncurkan program beasiswa vokasi



untuk anak-anak di sekitar wilayah operasional AMMAN, khususnya Kabupaten Sumbawa Barat. Beasiswa ini terdiri atas Beasiswa D3 Unggulan AMMAN yang bertujuan untuk membina bakat lokal dan menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri serta program Beasiswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Bekerja sama dengan Politeknik Astra, 50 penerima Beasiswa D3 Unggulan AMMAN dikirimkan ke sana untuk belajar selama 3 tahun sejak 2023. Para penerima manfaat tersebut disebar di berbagai program studi yang selaras dengan tuntutan kebutuhan lapangan. Sementara itu, Beasiswa SMK telah memberikan manfaat kepada lebih dari 190 pelajar sejak 2021. AMMAN juga berkolaborasi dengan mitra strategis, setidaknya ada lima sekolah kejuruan terbaik di Pulau Jawa yang menjadi tujuan belajar penerima beasiswa AMMAN. Kedua beasiswa ini diberikan untuk masyarakat di sekitar wilayah operasional AMMAN melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dengan adanya program beasiswa ini, terlihat peningkatan motivasi dan semangat

belajar peserta didik.

Di sisi lain, kewirausahaan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan vokasi. Kemampuan generasi muda dalam berinovasi dan bergerak di bidang usaha mandiri dapat memberikan potensi terbukanya lapangan kerja. Oleh karena itu, Makadaya memiliki program utama Makadaya Fellowship, sebuah program inkubasi untuk wirausahawan sosial yang diprioritaskan untuk peserta perempuan dan di luar Jawa.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas wirausahawan sosial, serta menciptakan dampak positif untuk masyarakat. Selama 3 tahun, Makadaya telah menginkubasi 17 usaha sosial yang tersebar di 11 provinsi. Dari 17 usaha tersebut, 11 di antaranya didirikan oleh perempuan. Para alumni program ini sudah banyak yang mendapatkan dampak positif dari keikutsertaan dalam program ini. Banyak ide yang tadinya hanya berwujud *prototype*, kini sudah memiliki *roadmap* bisnis yang jelas hingga dapat mempekerjakan masyarakat di sekitarnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Yatim Mandiri melalui program *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC). Program ini diberikan secara gratis untuk generasi muda yatim dhuafa melalui peningkatan *skill*, pengembangan mental mandiri, dan akses untuk dunia kerja atau wirausaha. Sebanyak 1800 pemuda pemudi yatim dhuafa telah menerima program ini dan telah berhasil mandiri secara ekonomi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

2. Program Beasiswa Perguruan Tinggi

Persoalan mendasar pada pendidikan tinggi di Indonesia mencakup 3 hal, yakni ketimpangan akses pendidikan tinggi, ketimpangan dalam hal kualitas, serta kurangnya relevansi pendidikan tinggi. Berdasarkan data BPS, angka partisipasi kasar perguruan tinggi pada 2024 sebesar 32,0, meningkat 1,8% dibandingkan tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia (43,0), Thailand (49,3), dan Singapura (91,1).

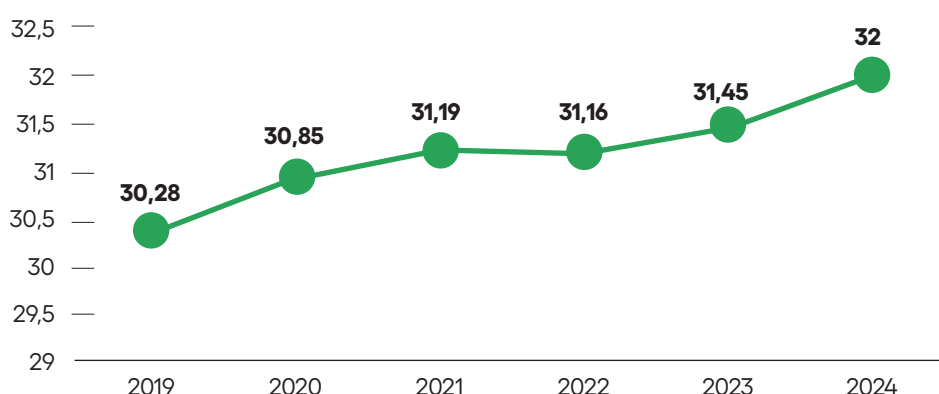
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor ketimpangan pada perguruan tinggi yang masih

dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tidak semua anak bangsa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Kelompok ekonomi miskin masih sangat bergantung kepada akses pendidikan gratis yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, program beasiswa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesempatan anak bangsa untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi.

Sejak 2010, pemerintah sudah menyediakan beasiswa Bidikmisi (kini Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)) untuk peserta berprestasi dengan latar belakang ekonomi kurang sejahtera. Hingga 2024, penerimanya mencapai 985.577 mahasiswa dengan jumlah anggaran mencapai Rp13,9 triliun. Namun, persaingan yang ketat membuat beasiswa tersebut belum dapat dirasakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, berbagai lembaga filantropi juga membuka peluang melalui program beasiswa.

Di bawah naungan mitra pelaksana program Great Edunesia, Dompot Dhuafa memiliki dua program beasiswa yang diperuntukkan untuk level perguruan tinggi. *Pertama*, Beasiswa

Grafik 2.7. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, 2024

ETOS ID, yang sudah hadir sejak 2003. Sejak tahun 2003–2023, total penerima manfaat Beasiswa ETOS ID telah mencapai lebih dari 2500 mahasiswa yang berasal dari 24 kampus unggulan di Indonesia. Beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan, para alumni diharapkan menjadi pribadi yang sukses dan dapat berkontribusi di masyarakat sehingga dapat mengubah status keluarga yang sebelumnya *mustahik* menjadi *muzakki*.

Kedua, Beasiswa BAKTI NUSA diberikan kepada mahasiswa tingkat empat yang telah terlihat rekam jejaknya sebagai aktivis mahasiswa. Beasiswa diadakan untuk mencari bibit pemimpin masa depan. Para penerima manfaat mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kurikulum kepemimpinan serta tugas proyek sosial untuk melatih sikap kepemimpinannya. Total penerima manfaat sejak 2011–2022 mencapai 590 aktivis. Adapun penerima manfaat tidak langsung beasiswa ini, yaitu mereka yang terpapar proyek-proyek sosial para aktivis BAKTI NUSA sebanyak 18.000 orang, serta adik-adik asuh yang dikelola oleh para aktivis sebanyak 781 orang.



Lembaga Amil Zakat lainnya, yakni Rumah Zakat juga memiliki program beasiswa khusus untuk kaum dhuafa yang sangat membutuhkan dukungan ekonomi untuk pendidikan layak serta berkualitas. Beragam beasiswa dapat diakses oleh pelajar SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Beasiswa BAIK adalah program yang diperuntukkan bagi siswa SMA sederajat dan mahasiswa perguruan tinggi yang berfokus pada pendampingan dan melibatkan aktif penerima beasiswa dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi (YKIP) juga menyediakan beasiswa pendidikan untuk kelompok marjinal di wilayah Bali. Beasiswa diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk beasiswa perguruan tinggi. Penerima beasiswa kuliah ini merupakan peserta beasiswa KEMBALI (Kids Education Management in Bali) milik YKIP yang telah lulus SMA. Program ini telah mendanai 15 orang siswa dan menargetkan untuk dapat memberikan kepada 5 orang siswa lainnya pada berbagai bidang keilmuan hingga 2025.

Dalam penyediaan program beasiswa pendidikan tinggi, Tanoto Foundation juga turut menghadirkan program beasiswa yang bersifat komprehensif dan berorientasi kapabilitas melalui program TELADAN (Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan). Sejak 2006, lebih dari 8.500 mahasiswa telah menerima manfaat beasiswa ini, dengan lebih dari 640 scholar aktif tercatat pada 2025, serta ratusan proyek sosial dan penelitian terapan yang telah diimplementasikan. Program TELADAN menekankan pengembangan kepemimpinan dengan pelatihan kepemimpinan berjenjang; dari *lead self*, *lead others*, hingga *professional preparation* yang mencakup bimbingan karier, magang, serta kesempatan menjalankan proyek sosial di masyarakat.²⁴

Selain melalui beasiswa dan pelatihan kepemimpinan lewat TELADAN, Tanoto



Foundation pada 2024 juga meluncurkan Tanoto Foundation Fellowship Program untuk memperkuat *pipeline* kepemimpinan di sektor pendidikan dan pembangunan sosial.²⁵ *Fellowship* ini ditujukan untuk calon pemimpin masa depan yang memiliki aspirasi berkontribusi di sektor sosial. Program tersebut menggabungkan pembelajaran mandiri, pengalaman langsung di lapangan, dan pengembangan proyek inisiatif dalam ekosistem pendidikan.

Kontribusi lembaga filantropi dalam memperbaiki pendidikan tinggi di Indonesia melalui beasiswa telah memberikan dampak signifikan. Dengan berbagai pendekatan program, ribuan anak telah mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas, kemudahan akses, peningkatan keterampilan, hingga peningkatan kesejahteraan. Hasilnya juga tidak terbatas pada individu penerima, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

2.4 Potensi Filantropi Pendidikan di Indonesia

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, aktivitas filantropi menjadi salah satu solusi

yang strategis untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang sudah disebutkan pada sub-bab sebelumnya, filantropi memiliki peran dalam menyerap risiko yang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah. Potensi ini dapat dilihat dari banyaknya partisipasi individu, lembaga, perusahaan dalam mendukung pendidikan melalui berbagai inisiatif.

Pola pendanaan filantropi saat ini masih didominasi oleh pendanaan hibah dari lembaga internasional atau negara lain. Selain itu, sumber pendanaan dari zakat-infaq-shodaqoh oleh lembaga filantropi berbasis agama juga masih mendominasi. Hal ini terjadi karena dalam budaya Indonesia, amal dan sedekah merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Banyak donasi yang diarahkan ke sektor pendidikan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga filantropi tersebut. Potensi pendanaan filantropi untuk pendidikan diperkirakan sebesar 180 miliar per tahun dengan tiga program populer: peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan, beasiswa, dan infrastruktur.²⁶

Selain itu, pertumbuhan korporasi di Indonesia memberikan kontribusi signifikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan

(CSR). Banyak perusahaan besar telah mengalokasikan dana CSR mereka untuk mendukung pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, dan program pelatihan guru. Potensi ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran korporasi akan dampak sosial yang dapat mereka ciptakan.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang baru untuk memperluas filantropi pendidikan. Platform *crowdfunding* seperti Kitabisa.com memungkinkan individu dan kelompok untuk mendukung inisiatif pendidikan secara langsung. Teknologi juga membuka peluang bagi *startup* pendidikan seperti Ruangguru untuk menjangkau siswa di berbagai daerah dengan biaya yang lebih rendah, sehingga berpotensi menjadi bentuk filantropi modern.

Kemudian, kegiatan-kegiatan filantropi juga meningkatkan semangat komunitas lokal di banyak daerah. Masyarakat secara swadaya mendirikan sekolah atau memperbaiki fasilitas pendidikan. Gerakan ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya terbatas, komitmen masyarakat terhadap pendidikan tetap tinggi. Dengan adanya semangat dari komunitas lokal, program-program inisiasi pemerintah maupun lembaga filantropi



dapat berjalan secara berkelanjutan.

Lembaga filantropi pun akan tetap mengupayakan karya terbaiknya agar setiap anak bangsa mendapat dukungan terbaik dalam meraih mimpi mereka melalui jalur pendidikan. Inisiatif-inisiatif baru akan terus diinisiasi oleh tiap-tiap lembaga filantropi, menyelaraskan dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Topik keberlanjutan dan lingkungan paling banyak ditambahkan dalam rencana kurikulum pengajaran. Sebagai contoh, Happy Hearts Indonesia akan memperluas inisiatifnya dengan memberikan pelatihan manajemen sampah di sekolah-sekolah yang mereka bangun kembali. Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi guru dan siswa agar menciptakan generasi yang lebih bertanggung jawab dan sadar terhadap lingkungan. Adapun Yayasan BakTI akan mulai menajajaki isu lingkungan dan perubahan iklim dalam program-programnya.

Kemitraan kolaboratif antar lembaga filantropi dan berbagai pemangku kepentingan akan semakin memperbesar dampak filantropi pendidikan. Hal ini dapat menjadi ruang untuk sama-sama berinvestasi, baik dalam bentuk pendanaan, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi. Keterbukaan data menjadi titik awal untuk mengetahui intervensi apa yang paling efektif untuk dilakukan. Sehingga, lembaga filantropi dapat mengisi berbagai celah yang masih memerlukan dukungan, terutama yang belum dapat dicapai oleh pemerintah secara optimal.

Kegiatan filantropi pendidikan di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar, mengingat berbagai tantangan pendidikan masih dihadapi. Hal ini justru menjadi motivasi untuk memperluas ranah filantropi. Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, filantropi pendidikan dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua anak bangsa.



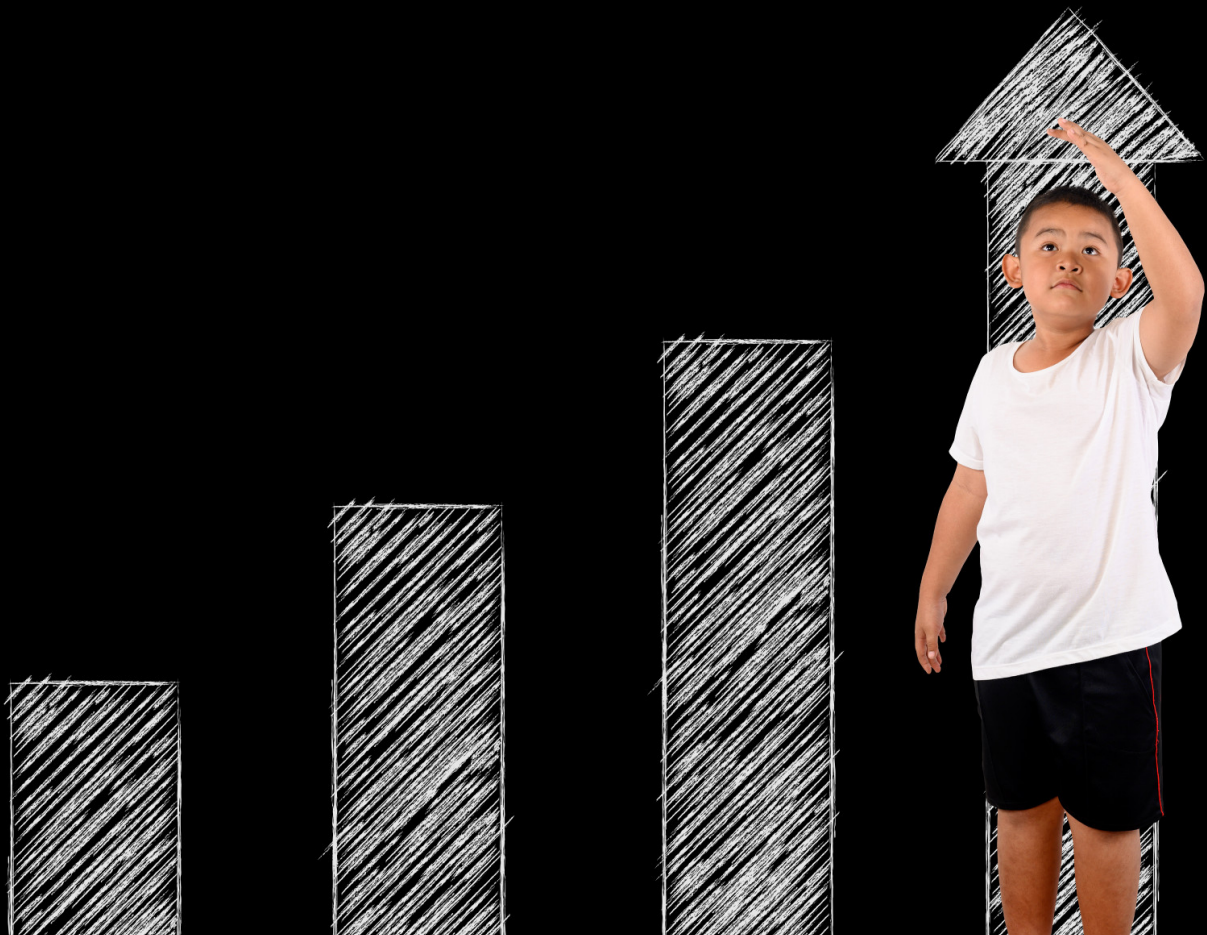
Referensi

1. Ambariani, A., & Suryana, D. (2022). Hambatan Implementasi PAUD berbasis holistik integratif. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5200–5208.
2. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.1599>
3. BPS. (2024). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Provinsi, 2024*. Badan Pusat Statistik.
4. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzOSMy/angka-partisipasi-kasar--apk--anak-yang-mengikuti-pendidikan-anak-usia-dini--paud--menurut-provinsi.html>
5. BPS. (2025). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024*. BPS.
6. JPNN. (2023, June 22). *Guru Muda Garda Depan Membangun Pendidikan di Rote Ndao NTT*. JPNN.Com. <https://www.jpnn.com/news/guru-muda-garda-depan-membangun-pendidikan-di-rote-ndao-ntt>
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *PAUD–SILN Riyadh*. Retrieved May 26, 2025, from <https://siln-riyadh.kemdikbud.go.id/tentang-kami/>
8. Napitupulu, E. L. (2023, December 6). Narasi skor PISA indonesia jangan seolah-olah prestasi. *Harian Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/06/narasi-skor-pisa-indonesia-jangan-seolah-olah-prestasi>
9. OECD. (2023, December 5). *PISA 2022 Results (Volume I and II)–Country Notes: Indonesia*. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html
10. Perhimpunan Filantropi Indonesia. (n.d.). *Klaster Filantropi Pendidikan*. PFI. Retrieved January 15, 2025, from <https://pendidikan.filantropi.or.id/>
11. Tan, C., & Khin, J. (n.d.). *Adaptation & Resilience in Southeast Asia: A Primer for Philanthropy [Full Version]*. Asia Philanthropy Circle. Retrieved February 26, 2025, from <https://asiaphilanthropycircle.org/adaptation-resilience-in-southeast-asia-a-primer-for-philanthropy/>
12. Tanoto Foundation. (2024a, August 15). *Laporan tahunan 2023*. Tanoto Foundation. <https://www.tanotofoundation.org/id/media/publikasi/laporan-tahunan-2023/>
13. Tanoto Foundation. (2024b, November 21). *Dampak Pelayanan Pengasuhan Berbasis Masyarakat pada Tumbuh Kembang Anak*. Tanoto Foundation.
14. <https://www.tanotofoundation.org/en/3d-flip-book/dampak-pelayanan-pengasuhan-berbasis-masyarakat-pada-tumbuh-kembang-anak/>

15. The Global Economy. (2022). *Education spending, percent of GDP by country, around the world*. TheGlobalEconomy.Com. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/education_spending/
16. Wahana Visi Indonesia. (n.d.). *WVI untuk pendidikan*. WVI Untuk Pendidikan | Wahana Visi Indonesia. Retrieved January 16, 2025, from <https://wahanavisi.org/id/tentang/kerja-kami/pendidikan>
17. William & Lily Foundation. (n.d.). *Early Childhood Development*. Retrieved February 26, 2025, from <https://wlf.or.id/id/our-program-id/early-childhood-development-id/>
18. William & Lily Foundation. (2022). *Program PAUD HI - William & Lily Foundation*. <https://www.youtube.com/watch?v=NEIH0TQ7v0U>
19. Yanwardhana, E. (2024, November 29). Prabowo: Anggaran Pendidikan di APBN 2025 Terbesar dalam Sejarah. *CNCB Indonesia*.
20. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241129072754-4-592020/prabowo-anggaran-pendidikan-di-apbn-2025-terbesar-dalam-sejarah>
21. Yayasan Guru Belajar. (n.d.-a). *Kurikulum Yayasan Guru Belajar*. Retrieved January 15, 2025, from <https://yayasangurubelajar.org/kurikulum-yayasan-guru-belajar/>
22. Yayasan Guru Belajar. (n.d.-b). *Temu Pendidik Nusantara XII*. Retrieved January 15, 2025, from <https://tpn.gurubelajar.org/>
23. Yayasan Guru Belajar. (n.d.-c). *Tim Yayasan Guru Belajar*. Retrieved January 15, 2025, from <https://yayasangurubelajar.org/tim-yayasan-guru-belajar/>

Bab 3

Dari Data Ke Dampak: Peran Filantropi Dalam Mengatasi *Stunting* di Indonesia



3.1 Sinergi Pemerintah dan Filantropi Guna Mengatasi *Stunting*

Pembangunan sektor kesehatan memegang peran strategis dalam memastikan dukungan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Investasi pada layanan kesehatan dasar, terutama pada fase awal kehidupan, memberikan *multiplier effect* yang signifikan terhadap penyediaan populasi usia produktif yang sehat, adaptif, dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu indikator kunci yang merefleksikan efektivitas intervensi pada fase ini adalah status gizi anak.

Dalam konteks tersebut, tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak pada periode paling krusial ini masih memerlukan penguatan yang lebih terintegratif. Di Indonesia, prevalensi *stunting* mencapai 19,8% (berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia/SSGI 2024), perlu bergerak cepat mengejar target 14,2% untuk 2029.¹

Istilah *stunting* merujuk pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai.² Dampak *stunting* tidak hanya terbatas pada gangguan fisik dan kognitif, tetapi juga berimplikasi luas terhadap produktivitas individu dan kesejahteraan di masa depan. Anak-anak yang mengalami *stunting* berisiko lebih tinggi terhadap gangguan kesehatan seperti daya tahan tubuh yang rendah dan penyakit kronis pada usia dewasa.

Dampak ini tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga mempengaruhi pembangunan ekonomi secara kolektif. Studi menunjukkan bahwa *stunting* dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 11% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menurunkan pendapatan pekerja dewasa hingga 20%.³ Dalam konteks Visi Indonesia Emas 2045, *stunting*

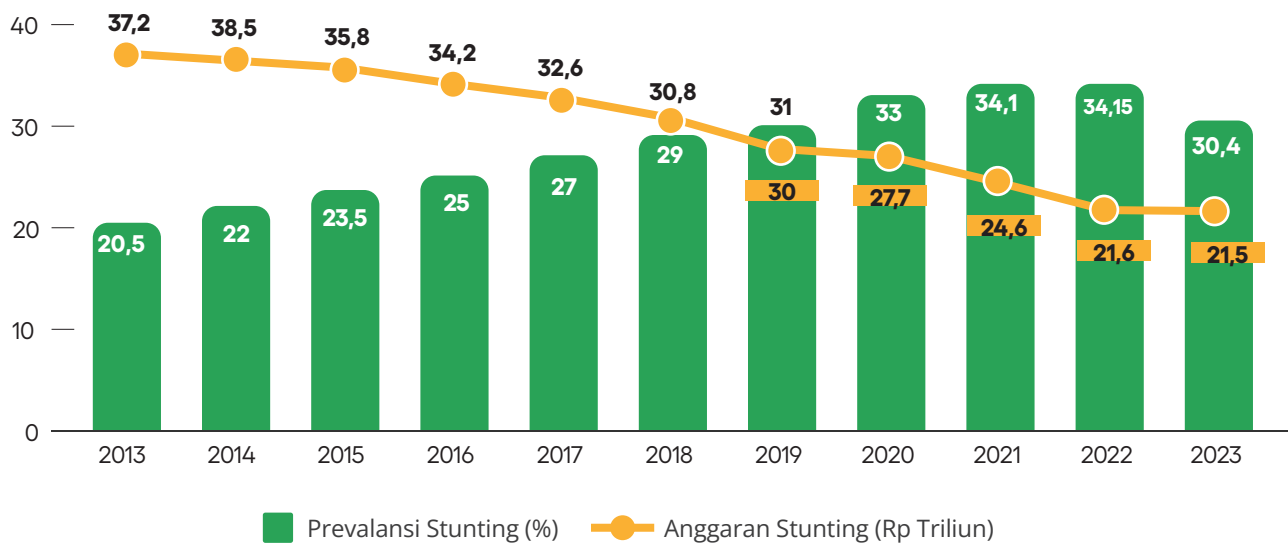


menjadi ancaman serius bagi pembangunan *human capital*, aset penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, prevalensi *stunting* termasuk agenda prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dibanding negara ASEAN lainnya, isu *stunting* menjadi krusial bagi Indonesia karena Indonesia tengah menghadapi bonus demografi sebagai aset kapital Indonesia Emas 2045. Dengan prevalensi mencapai 21,5% di tahun 2023, artinya Indonesia memiliki sekitar 6,5 juta anak *stunting* secara absolut, jauh lebih besar dibandingkan Vietnam (19,3%, 1,45 juta) dan Thailand (11,8%, 0,5 juta), serta tertinggal signifikan dari Brunei Darussalam (10,9%, hanya sekitar 0,004 juta). Isu ini semakin kompleks karena ketimpangan geografis dan sosial yang membatasi akses layanan dasar, terutama di daerah terpencil.

Dalam 10 tahun terakhir, meskipun pemerintah Indonesia terus meningkatkan alokasi anggaran untuk program penurunan *stunting*, hasil yang dicapai belum sepenuhnya sebanding dengan target yang diharapkan. Anggaran untuk penurunan *stunting* meningkat dari Rp 20,5 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 34,15 triliun pada tahun 2022 (lihat Gambar 3.2). Sementara itu, prevalensi *stunting* menurun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 21,6% pada tahun 2022.⁵ Namun, pada 2023, penurunan prevalensi *stunting* hanya tercatat sebesar 0,1% menjadi 21,5%, dan anggaran menurun menjadi Rp 30,4 triliun. Secara agregat, pertumbuhan anggaran rata-rata sekitar

Grafik 3.1 Potret Belanja Anggaran Stunting dan Capaian Prevalensi Stunting (2013-2023)



SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (KEMENKO PMK), 2023

5,9% per tahun, sementara penurunan prevalensi *stunting* sekitar 1,57% per tahun.

Melihat lebih jauh capaian prevalensi stunting di 2023, selain hanya menurun 0,1% dari 2022, terdapat temuan bahwa disparitas antar wilayah masih tinggi. Berdasarkan SKI 2023, terdapat 23 provinsi dengan prevalensi *stunting* di atas prevalensi *stunting* nasional. Selain itu, Jawa Barat dan Banten, dua provinsi dengan populasi terbesar (22% dari total penduduk), mencatat prevalensi *stunting* yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Adapun penurunan *stunting* terbesar terjadi di Bali dengan capaian prevalensi 7,2%, diikuti Jambi (13,5%), Riau (13,6%), Lampung (14,9%), dan Sulawesi Tenggara (30,3%). Sementara peningkatan *stunting* terbesar terjadi di NTT dengan catatan prevalensi sebesar 37,9%, diikuti Papua (33,6%) dan Sulawesi Barat (30,3%).

Di bawah Asta Cita 4, pemerintahan Prabowo-Gibran menekankan pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam aspek kesehatan dan penurunan prevalensi *stunting*. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas

Tabel 3.1. Tren Stunting Balita Berdasarkan SKI 2023

Penurunan Stunting Terbesar		Peningkatan Stunting Terbesar	
Bali	7.2%	NTT	37.9%
Jambi	13.5%	Papua	33.6%
Riau	13.6%	Sulawesi Barat	30.3%
Lampung	14.9%	Sulawesi Tenggara	30.3%
Prevalensi Stunting Nasional			21.5%

Sumber: SKI Kementerian Kesehatan, 2023

hidup dan kesehatan masyarakat melalui program makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren, serta pemberian bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan sebagai penunjang kesehatan ibu dan anak. Melalui program Hasil Terbaik Cepat poin ke-4, Prabowo-Gibran berencana menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di setiap kabupaten.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan

permasalahan dalam penurunan *stunting*, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Filantropi di sektor kesehatan hadir dalam mengisi celah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pemerintah. Sebagai negara dengan tingkat dermawan yang tinggi menurut *World Giving Index 2024*, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sektor filantropi dalam mengatasi tantangan kesehatan.⁵ Dengan adanya kerjasama yang solid antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun filantropi, penanggulangan *stunting* dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Bagian ini akan mengulas *key stakeholder* filantropi di bidang kesehatan dalam pencegahan *stunting*, studi kasus relevan dan analisis dampak filantropi di isu kesehatan serta potensi filantropi kesehatan di Indonesia.

3.2. Key Stakeholder Filantropi Pencegahan *Stunting* Di Indonesia

Lembaga filantropi berperan penting dalam mendukung program-program kesehatan yang fokus pada perbaikan gizi, akses layanan kesehatan dasar, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan

stunting. Dukungan dari berbagai pihak dalam ekosistem ini memberikan dorongan besar untuk mempercepat upaya pemerintah dalam mengatasi masalah *stunting*. Untuk itu, kami telah melakukan wawancara dengan lembaga filantropi di bidang kesehatan, baik yang merupakan anggota maupun non-anggota PFI, dengan beragam jenis organisasi. Selain itu, kami juga mewawancarai lembaga non-filantropi yang menghimpun dana donor dan menjalankan kegiatan filantropi di sektor kesehatan.

Secara operasional program, terdapat 15 lembaga filantropi dan 1 lembaga non filantropi (Yayasan Cipta) yang memiliki program penanganan *stunting* dengan intervensi beragam. Sementara itu, terdapat 1 lembaga filantropi kesehatan lainnya yaitu YKAKI lebih menitikberatkan pada program pendidikan dan kesehatan untuk pengentasan dan pemulihan penyakit kanker anak di Indonesia. Dalam kiprahnya, lembaga-lembaga ini telah menghadirkan program yang mendekatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, serta mendorong

Tabel 3.2. Background Narasumber Organisasi Filantropi di Sektor Kesehatan

Status Keanggotaan	Cakupan Wilayah	Jenis Organisasi					Grand Total
		Corporate Foundation	CSR	Faith-based Organization	Independent	Family foundation	
Anggota PFI	Nasional			3	4		7
	Regional				1		1
Anggota PFI Total				3	4		7
Non-Anggota PFI	Lokal		2				2
	Nasional	1	2		2		5
	Nasional dan Internasional			1		1	
Non-Anggota PFI Total		1	4		4		9
Grand Total		1	4	3	8	0	15

Sumber: IDI yang diselenggarakan oleh PFI dan Katadata bersama 17 lembaga filantropi bidang kesehatan, 2024

program yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu kesehatan dasar.

Dari proses wawancara tersebut, kami telah mengidentifikasi fokus program penanganan

stunting dari masing-masing lembaga filantropi ke dalam 6 kategori yang mencakup intervensi pada kesehatan ibu dan anak, intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih, program pemberian makanan tambahan (PMT), advokasi

Tabel 3.3 Fokus Program Key Stakeholder Filantropi Kesehatan di Indonesia

No	Lembaga Filantropi	Intervensi pada kesehatan ibu dan anak	Program pemberian makanan tambahan (PMT)	Advokasi kebijakan kepada pemerintah	Pemberdayaan masyarakat lokal	Intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih	Intervensi lainnya
1	Bebas Stunting Indonesia						
2	Cita Sehat Foundation						
3	Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)						Pemanfaatan Teknologi, Edukasi dan Layanan Kesehatan
4	CTArsa Foundation						
5	Doctors Without Borders (MSF Indonesia)						Posyandu Remaja, Edukasi Kesehatan Reproduksi, Kapasitas Pembangunan Kesehatan
6	Dompot Dhuafa						Konsultasi dan Layanan Kesehatan
7	MNC Peduli						Edukasi dan Layanan Kesehatan
8	PLN Peduli						Edukasi Kesehatan
9	PT Amman Mineral Nusa Tenggara						Layanan dan Kapasitas Pembangunan Kesehatan
10	Rumah Zakat						Edukasi Kesehatan
11	Tanoto Foundation						Edukasi dan riset Kesehatan
12	Yayasan Bina Swadaya						Edukasi Kesehatan

No	Lembaga Filantropi	Intervensi pada kesehatan ibu dan anak	Program pemberian makanan tambahan (PMT)	Advokasi kebijakan kepada pemerintah	Pemberdayaan masyarakat lokal	Intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih	Intervensi lainnya
13	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia						Layanan Kesehatan, Bedah Rumah Anak Stunting
14	Yayasan Cipta						Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana
15	Yayasan Kitabisa						Kampanye dan Fundraising Dana Kesehatan
16	Yatim Mandiri						Edukasi dan Layanan Kesehatan
17	Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)						Edukasi, konsultasi dan layanan kesehatan bagi anak pengidap kanker

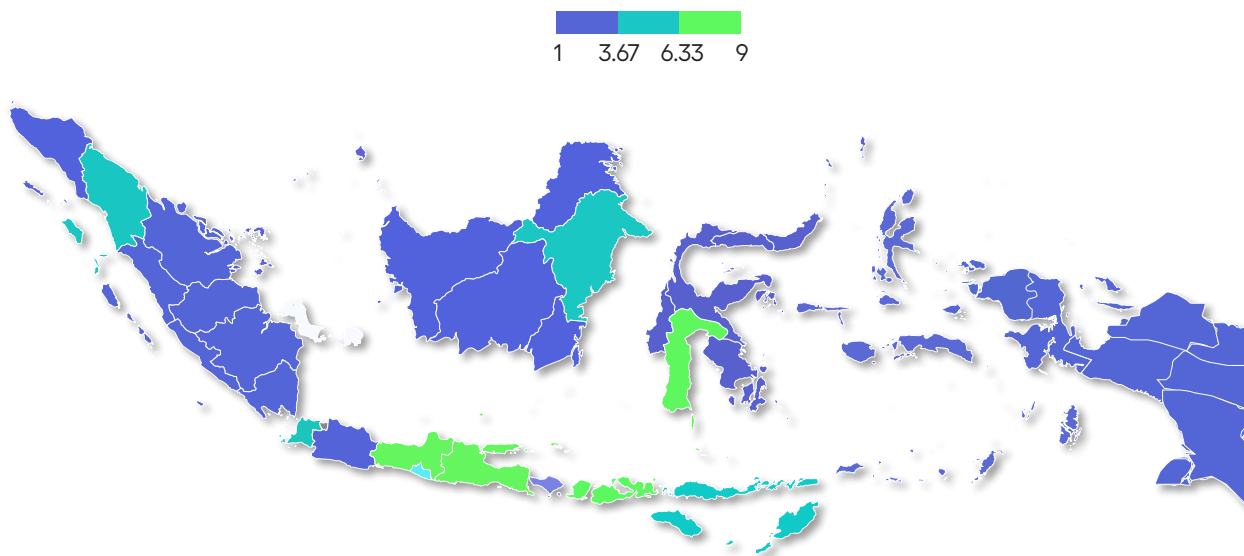
kebijakan kepada pemerintah, pemberdayaan masyarakat lokal, dan intervensi lainnya.

Terdapat berbagai macam fokus program yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Dari 16 lembaga filantropi kesehatan yang kami wawancarai, beberapa program kesehatan menjadi program utama yang banyak dilakukan

organisasi filantropi di Indonesia. Program utama tersebut berfokus pada penurunan stunting di berbagai wilayah Indonesia dengan pendekatan seperti intervensi berbasis komunitas, penguatan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut peta persebaran lembaga filantropi di Indonesia yang berfokus pada kesehatan khususnya penanganan *stunting*.



Grafik 3.2. Peta Persebaran Lembaga Filantropi Kesehatan di Indonesia



SUMBER: LANSKAP FILANTROPI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, 2024

Berikut ringkasan fokus program, kegiatan utama, dan lokasi serta target populasi yang dituju oleh lembaga filantropi kesehatan yang kami wawancarai.

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
1	Bebas Stunting Indonesia (sejak 2023)	Intervensi langsung di masyarakat untuk penurunan <i>stunting</i>	Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), intervensi gizi, layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, dan pemberdayaan komunitas	Lokasi: Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi di Indonesia (Bondowoso, Kudus, Magetan, NTT, NTB, Surabaya, Pandeglang, Purbalingga, dan lainnya) Target Populasi: Masyarakat umum di wilayah tersebut, dengan fokus pada keluarga dan anak-anak yang berisiko mengalami <i>stunting</i> .	CSR dan independen filantropis	Pemerintah daerah, komunitas lokal

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
2	Bina Swadaya (sejak 1967)	Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan gizi berbasis bahan pangan lokal	Penyediaan makanan tambahan dan edukasi gizi untuk keluarga anak <i>stunting</i> , pelatihan gizi bagi siswa, ekosistem perubahan perilaku berbasis komunitas	Lokasi: Mekarsari, Depok. Target Populasi: Keluarga dengan anak-anak yang berisiko mengalami <i>stunting</i> , siswa, dan komunitas lokal di area tersebut.	Donasi, kemitraan dengan sektor swasta	Sekolah, komunitas lokal
3	Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) (sejak 2014)	Penguatan layanan kesehatan primer dan pencegahan <i>stunting</i>	Program Pencerah Nusantara — Pelatihan tenaga kesehatan, pelacakan tumbuh kembang anak, penyediaan makanan tambahan berbasis lokal, keterlibatan pemerintah daerah, penguatan layanan Posyandu	Lokasi: Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kendal, Manggarai NTT, dan beberapa daerah di Sulawesi serta Papua. Target Populasi: Anak-anak di Posyandu, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah yang terlibat dalam program penanggulangan <i>stunting</i> di lebih dari 280 Posyandu di daerah dengan prevalensi <i>stunting</i> tinggi.	Perusahaan, lembaga donor, dan lembaga filantropi, dan sebagian kecil dari <i>crowdfunding</i>	Pemerintah daerah, Posyandu/ Puskesmas, komunitas lokal, lembaga peneliti independen, lembaga swasta dan lembaga filantropi lainnya



No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
4	Cita Sehat Foundation (sejak 2008)	Intervensi gizi balita dan intervensi gizi ibu hamil	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait gizi, pemberdayaan masyarakat, intervensi gizi balita, optimalisasi 1000 HPK, dan revitalisasi sarana & prasarana	Lokasi: Sumatera Utara, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Gorontalo, NTB, NTT. Target Populasi: Ibu hamil, anak balita, dan keluarga dengan status ekonomi rendah/rentan (ditentukan berdasarkan daerah dengan kantong kemiskinan tinggi) yang berisiko mengalami <i>stunting</i> .	Lembaga filantropi dan perusahaan, dengan sebagian kecil dari sumber pribadi.	Kemitraan lokal termasuk Puskesmas, Posyandu, komunitas lokal, perusahaan, akademisi dan kemitraan interlokal.
5	CTArsa Foundation (sejak 2005)	Memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal	Gerakan Bersama Cegah Stunting — Penyuluhan gizi, penyediaan makanan bergizi untuk balita, advokasi kebijakan kesehatan	Lokasi: Daerah terpencil dengan prevalensi <i>stunting</i> tinggi di Deli Serdang, Sukoharjo, Remote Area (Wamena, Sumba, Lelogama, Nunuanah, Tana Toraja). Target Populasi: Balita, ibu hamil, dan komunitas lokal yang berisiko mengalami <i>stunting</i> .	Pendiri lembaga dan membuka peluang donasi dari perusahaan, BUMN dan masyarakat umum	Puskesmas, klinik, relawan, pemerintah daerah, perusahaan, BUMN

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
6	Dompot Dhuafa (sejak 1993)	Pengelolaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat <i>dhuafa</i> .	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk memberikan konsultasi dan layanan kesehatan gratis di daerah terpencil, santunan nutrisi untuk anak kurang gizi dan <i>stunting</i> serta pembangunan MCK dan fasilitas sanitasi untuk eliminasi <i>stunting</i> .	Lokasi: Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Papua. Target Populasi: Berdasarkan 8 golongan asnaf zakat, terutama fakir, miskin, dan <i>fisabilillah</i> .	Zakat, infaq, sedekah, CSR, <i>crowdfunding</i> , dan wakaf produktif.	Puskesmas, pemerintah, swasta, komunitas lokal, mitra pengelola zakat
7	Edufarmers International (sejak 2005)	Pendekatan usaha agrikultur untuk konsumsi protein hewani dalam penurunan <i>stunting</i>	Program ZeroStunting — Distribusi telur kepada anak-anak yang mengalami <i>stunting</i> melalui kampanye "Satu Hari Satu Telur". Kegiatan lainnya mencakup pengumpulan dan validasi data balita <i>stunting</i> , melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kebijakan setempat, pemantauan harian & bulanan, melaksanakan lokakarya tentang gizi dan kesehatan, serta evaluasi proses dan dampak di akhir program.	Lokasi: Kabupaten Malang, Kabupaten Maros, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Batang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sukabumi, dan DKI Jakarta. Target Populasi: Anak-anak yang mengalami <i>stunting</i> , petani lokal, dan keluarga mereka.	Japfa Foundation, perusahaan swasta, BUMN (program CSR), grant lembaga internasional dan <i>crowdfunding</i> .	Petani lokal, komunitas lokal, pemerintah daerah, lembaga sosial masyarakat, sektor swasta, mitra peternak, Puskesmas dan Posyandu.

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
8	MNC Peduli (sejak 1987)	Pencegahan <i>stunting</i>	Pemberian alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan dan tumbuh kembang anak, penyuluhan mengenai gizi dan pencegahan <i>stunting</i> , pemberian makanan bergizi, serta bantuan fasilitas Posyandu.	Lokasi: DKI Jakarta dan NTB. Target Populasi: Keluarga prasejahtera khususnya yang tidak memiliki akses BPJS.	<i> Holding:</i> Pendanaan dari <i>holding company</i> dan <i>founder</i> . <i> Unit Bisnis:</i> Alokasi dana dari unit bisnis MNC Group. <i> Masyarakat:</i> Dukungan publik untuk program kesehatan seperti hernia dan katarak. <i> Kemitraan:</i> Kolaborasi dengan korporasi dan NGO untuk efektivitas program.	Korporasi, NGO, pemerintah daerah/pusat, Posyandu/ Puskesmas.
9	Rumah Zakat (sejak 1998)	Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan (Program <i>stunting</i> dan layanan ramah lansia), Lingkungan dan Kemanusiaan.	Program Desa Berdaya — Edukasi gizi melalui kader kesehatan, pendampingan keluarga dalam akses bahan pangan bergizi secara berkelanjutan	Lokasi: 33 provinsi. Target Populasi: Keluarga yang membutuhkan, dan komunitas lokal di area tersebut.	Donasi individu, komunitas, korporasi, serta zakat dan infaq yang diberikan oleh umat Muslim.	Kader kesehatan, komunitas lokal, Posyandu/ Puskesmas, sektor swasta, pemerintah.
10	Yatim Mandiri (sejak 1994)	Pemberdayaan anak-anak yatim dan dhuafa di bidang pendidikan dan kesehatan dengan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan dan potensi di masing-masing daerah melalui metode Participatory Rural Appraisal (PRA).	Layanan sehat mandiri, yatim berseri, gita kesehatan, ceria pendampingan <i>stunting</i> , dan bunda balita sehat.	Lokasi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kep Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Target Populasi: Yatim dan <i>dhuafa</i> .	Donasi tetap ataupun tidak tetap dari korporasi dan individu	Lembaga pendidikan, perusahaan, swasta dan pemerintah

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
11	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia (sejak 1993)	Memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta menciptakan lingkungan sehat untuk mencegah <i>stunting</i> dan meningkatkan kesejahteraan.	Program Jamban Sehat (3.500 jamban) dan Bedah Rumah Anak <i>Stunting</i> .	Lokasi: DKI Jakarta, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Target: 3.000 unit rumah layak huni dalam 3 tahun ke depan di wilayah kritis sebagai bagian dari upaya pencegahan <i>stunting</i> .	Dana amal dari celengan bambu, penggalangan dana, dan donasi digital (QRIS, kartu kredit, <i>e-commerce</i>), serta dukungan CSR dari perusahaan seperti Sinarmas dan Agung Sedayu.	Pemerintah daerah, Puskesmas, Kementerian, TNP2K, dan komunitas lokal.
12	Yayasan Cipta* (sejak 2008)	Strategi komunikasi untuk isu-isu kesehatan masyarakat, termasuk <i>stunting</i> , kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.	Pelatihan gizi untuk keluarga rentan <i>stunting</i> , advokasi anggaran kesehatan di daerah, penguatan layanan kesehatan lokal.	Lokasi: Daerah dengan kebijakan kesehatan terbatas di 19 kabupaten di 7 provinsi. Target Populasi: Keluarga rentan <i>stunting</i> , tenaga kesehatan lokal, dan pemerintah daerah di area tersebut.	Hibah, donasi	Pemerintah pusat dan daerah serta kerjasama utama termasuk dengan USAID, PT RAPP, Tanoto Foundation, dan Koalisi Fortifikasi Indonesia.
13	Yayasan Kitabisa (sejak 2013)	Pemberdayaan masyarakat dan penggalangan dana untuk berbagai isu sosial termasuk kesehatan.	Program Kitabisa Peduli — Kampanye kesehatan untuk ibu dan anak, penggalangan dana untuk penanggulangan <i>stunting</i>	Lokasi: Wilayah seluruh Indonesia. Target Populasi: Ibu dan anak, masyarakat umum, dan komunitas <i>online</i> di seluruh Indonesia.	Penggalangan dana individu dan <i>blended financing</i> (kontribusi dari perusahaan dan zakat). Setiap kampanye bersifat berkelanjutan tanpa batas waktu.	Komunitas lokal, perusahaan, NGO



No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
14	PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sejak 1990-an)	Inisiatif kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi berbasis lokal untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Human Development</i> • <i>Economic Empowerment</i> • <i>Sustainable Tourism</i> • Kesehatan: Infrastruktur Sanitasi, fasilitas kesehatan, layanan medis dan pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). 	<p>Lokasi: wilayah operasional perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB</p> <p>Target Populasi: Ring 1: Komunitas di sekitar lokasi tambang</p> <p>Ring 2: Kecamatan yang lebih jauh di KSB.</p> <p>Ring 3: Komunitas di luar KSB yang mendapat pendanaan terbatas.</p>	CSR perusahaan	Pemerintah daerah, Puskesmas/ Posyandu, komunitas lokal, lembaga non profit.
15	PLN Peduli (n/a)	Mengatasi permasalahan terkait issue sosial di sekitar ring 1 aset PLN melalui pemetaan profil risiko dan permasalahan sosial.	<p>Penanganan stunting terintegrasi, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan/ workshop edukasi kesehatan • Pembagian nutrisi makanan tambahan • Pemeriksaan kesehatan anak • Pemeriksaan kesehatan ibu • Program pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk penanggulangan <i>stunting</i> 	<p>Lokasi: Desa prioritas stunting di sekitar ring 1 aset PLN (contoh: Tanjung Priok, Jakarta Utara)</p> <p>Target Populasi: Komunitas yang kurang terlayani.</p>	Anggaran TJSL PLN tahun berjalan	BUMN lain maupun NGO/ lembaga/ organisasi.

No	Nama Organisasi	Fokus Program	Kegiatan Utama	Lokasi/Target Populasi	Sumber Pendanaan	Mitra Kerja Sama
16	Tanoto Foundation (sejak 1981)	Mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi prevalensi <i>stunting</i> di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendidikan anak usia dini • Peningkatan kesehatan ibu • Penguatan kolaborasi dengan pemerintah, mitra pembangunan, mitra pelaksana, dan organisasi lokal dalam upaya pencegahan <i>stunting</i> • Pembangunan Rumah Anak SIGAP sebagai pusat pendidikan serta pengasuhan anak usia dini. 	Lokasi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Singapura Target Populasi: Anak usia dini, keluarga mereka, dan komunitas lokal di daerah 3T.	Dana keluarga Tanoto	Pemerintah Indonesia (pusat dan daerah), mitra pembangunan, mitra pelaksana, organisasi lokal.

3.3. Studi Kasus dan Analisis Dampak Filantropi di Sektor Kesehatan

Melalui berbagai program dan intervensi, lembaga filantropi mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas kesehatan ibu dan anak, terutama di wilayah-wilayah yang rentan. Dengan pendekatan berbasis pemetaan masalah lokal, lembaga filantropi turut mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka *stunting* dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Sebagian besar inisiatif yang dilakukan lembaga filantropi didasarkan pada masalah yang ditemukan di masyarakat, seperti jumlah balita terdiagnosa *stunting*, daerah/wilayah tinggi *stunting*, minimnya akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya kesadaran gizi, dan terbatasnya infrastruktur sanitasi. Program-program ini juga sering kali berfokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),

serta wilayah pedesaan dengan akses sulit terhadap layanan kesehatan dasar. Dengan demikian, filantropi menjadi elemen kunci dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-2 (Tanpa Kelaparan) dan tujuan ke-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Upaya pencegahan dan penanganan *stunting* yang dilakukan filantropi turut berkontribusi pada pencapaian *universal health coverage* (UHC), memastikan setiap individu, terutama anak-anak, memiliki akses terhadap layanan kesehatan esensial tanpa menghadapi kendala finansial maupun geografis.

Selain mendukung intervensi langsung seperti pemberian makanan tambahan (PMT) atau penyediaan fasilitas sanitasi, banyak organisasi filantropi yang mengintegrasikan pendekatan holistik dalam program-programnya. Mereka tidak hanya menargetkan perbaikan gizi tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan, seperti pengelolaan pangan lokal, pemanfaatan

teknologi untuk pemantauan tumbuh kembang anak, hingga pelatihan kader kesehatan di daerah terpencil.

Dengan memanfaatkan data akurat yang tersedia secara publik dan rekomendasi dari pemerintah dan/atau Puskesmas setempat, lembaga filantropi dapat menentukan *beneficiary* program secara lebih efektif. Data ini memungkinkan intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh penerima program. Melalui kolaborasi lintas sektor, filantropi membuktikan bahwa penanganan *stunting* bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan upaya bersama untuk masa depan yang lebih sehat dan inklusif bagi Indonesia.

Kami mewawancarai 16 lembaga filantropi yang aktif dalam pencegahan dan penanganan *stunting* untuk memahami lebih dalam program-program yang telah dan sedang dilaksanakan. Kami



juga mengeksplorasi dampak yang dihasilkan terhadap penerima manfaat, khususnya anak-anak dan ibu, serta masyarakat di sekitarnya. Ruang lingkup inisiatif yang dijalankan oleh lembaga-lembaga ini mencakup intervensi pada kesehatan ibu dan anak, program pemberian makanan tambahan (PMT), advokasi kebijakan kepada pemerintah, pemberdayaan masyarakat lokal, intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih, dan intervensi lainnya.

3.3.1. Intervensi pada Kesehatan Ibu dan Anak

Indonesia telah menunjukkan komitmen besar dalam mengatasi masalah *stunting* melalui intervensi kesehatan ibu dan anak, terutama dalam periode krusial 1.000 HPK. Masa ini dianggap sebagai fondasi penting dalam memastikan anak tumbuh optimal, bebas dari risiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama *stunting*. Upaya ini tidak hanya mencakup program-program kesehatan spesifik tetapi juga melibatkan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan ini memberikan panduan menyeluruh untuk menyinergikan berbagai upaya di tingkat kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan target ambisius menurunkan prevalensi *stunting* dari 21,6% pada 2022 menjadi 14% pada 2024.⁶

Program intervensi mencakup langkah-langkah spesifik seperti pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, serta distribusi PMT untuk ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).⁷ Selain itu, pemberian imunisasi, pemantauan tumbuh kembang balita, dan edukasi mengenai pola asuh serta kebersihan lingkungan juga menjadi bagian integral dari pendekatan ini.



Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 34,15 triliun pada 2022 dan Rp 30,4 triliun pada 2023.⁸ Dana ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan asupan gizi bagi kelompok rentan. Namun, efektivitas penggunaan dana ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat. Saat ini pemerintah juga telah meluncurkan aplikasi bernama *Digital E-Assistance for Stunting Information* (DESI) untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*.⁹ Selain itu, kedepannya, pemerintah berencana menjalankan program Masyarakat Bergerak untuk Gizi (MBG). Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), MBG diharapkan dapat menurunkan angka *stunting* secara signifikan. Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.¹⁰ Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi ibu hamil dan balita, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui

edukasi tentang pentingnya pola makan bergizi serta pemberdayaan ekonomi keluarga agar mereka dapat mengakses bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.

Berbagai lembaga filantropi hadir dan turut berperan membantu pemerintah dalam mengatasi *stunting*. Sebanyak 14 lembaga filantropi berkontribusi dalam program intervensi kesehatan ibu dan anak, di antaranya: Bebas Stunting Indonesia, Cita Sehat Foundation, CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives), CT Arsa Foundation, Dompot Dhuafa, PLN Peduli, Rumah Zakat, Tanoto Foundation, Yayasan Bina Swadaya, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Yayasan Cipta, Yayasan Kitabisa, Yatim Mandiri. Terdapat organisasi filantropi kerap memulai intervensi dengan fokus pada 1.000 HPK dengan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat lokal dalam setiap program. Misalnya, Yayasan Bina Swadaya tidak hanya memberikan edukasi tentang nutrisi tetapi juga membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui pelatihan pengelolaan pangan berbasis lokal. Program Bahan Makanan Sehat Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang dijalankan Bina Swadaya menawarkan pendekatan berbasis

komunitas yang berfokus pada edukasi gizi dan intervensi langsung kepada keluarga yang terdampak *stunting*. Program ini mengambil lokasi percontohan di Kelurahan Mekarsari, Depok, dengan melibatkan Puskesmas, Posyandu, dan sekolah.

Bina Swadaya memulai program ini dengan mengidentifikasi keluarga dengan anak *stunting* melalui data Posyandu. Intervensi langsung berupa pemberian makanan tambahan selama sembilan minggu dilengkapi dengan pelatihan kepada orang tua tentang cara memanfaatkan bahan pangan lokal, seperti jagung, ubi jalar, dan kacang hijau.¹⁰ Di sisi lain, program ini melibatkan lebih dari 2.500 siswa dalam kampanye edukasi gizi di sekolah, menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya pola makan sehat. Meskipun dampak langsung pada peningkatan berat badan anak masih minimal (rata-rata kenaikan 0,48 kg dari target 2,4 kg), program ini berhasil menciptakan perubahan pola pikir orang tua dan anak tentang pentingnya konsumsi gizi



seimbang. Partisipasi aktif sekolah, Posyandu, dan komunitas juga memperkuat keberlanjutan program ini. Salah satu keberhasilan unik dari program ini adalah pelibatan pedagang makanan di sekitar sekolah dalam menyediakan makanan bergizi yang sesuai dengan pedoman gizi. Bina Swadaya menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang dalam pencegahan *stunting* tidak hanya terletak pada intervensi langsung tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Pelibatan multi-stakeholder, termasuk sekolah dan pedagang lokal, memperlihatkan model kolaborasi yang efektif.

Kemudian intervensi pada HPK juga dilakukan oleh Rumah Zakat, yang mengintegrasikan program PMT berbasis lokal dengan edukasi gizi di wilayah pedesaan. Rumah Zakat menyelenggarakan berbagai program yang terintegrasi dalam bidang kesehatan ibu dan anak.

Beberapa komponen utama program mereka antara lain:

1. Edukasi Kesehatan dan Kesadaran Gizi

Rumah Zakat melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak-anak, serta dampak buruk kekurangan gizi terhadap perkembangan anak. Program edukasi ini melibatkan tenaga medis lokal dan kader kesehatan untuk memberikan informasi yang tepat mengenai pola makan yang bergizi.

2. Bantuan Pangan Bergizi

Program ini memberikan paket makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak-anak berisiko *stunting*. Paket ini mencakup bahan pangan kaya protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dalam laporan tahunan Rumah Zakat, disebutkan bahwa lebih dari 100.000 keluarga telah menerima bantuan pangan gizi dari lembaga ini setiap tahun.



3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Rumah Zakat juga bekerja sama dengan Puskesmas dan klinik-klinik setempat untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi ibu hamil dan anak-anak. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan deteksi dini masalah kesehatan yang berpotensi menyebabkan *stunting*.

4. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Rumah Zakat melibatkan masyarakat lokal, terutama ibu-ibu, dalam pelatihan mengenai pengelolaan gizi dan kesehatan keluarga. Selain itu, mereka juga dilatih untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

Rumah Zakat telah memberikan dampak signifikan di daerah-daerah yang rentan terhadap *stunting*, terutama di daerah-daerah dengan prevalensi *stunting* yang tinggi. Berdasarkan data yang diungkapkan dalam laporan tahunan Rumah Zakat, sebanyak 15.000

ibu hamil dan 30.000 anak di beberapa daerah telah menerima manfaat langsung dari program-program kesehatan yang mereka jalankan pada tahun 2022. Prevalensi *stunting* di wilayah dampingan Rumah Zakat dilaporkan menurun hingga 10-15% setelah implementasi program selama satu tahun.

Lebih lanjut, Rumah Zakat juga mengimplementasikan pendekatan berbasis data dengan menggunakan indikator kesehatan lokal untuk menilai efektivitas program mereka. Hal ini melibatkan pengumpulan data kesehatan di tingkat desa, yang memungkinkan mereka untuk mengukur perubahan status gizi dan kesehatan masyarakat secara lebih terukur.

Adapun CISDI menjalankan program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) yang bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di daerah dengan keterbatasan akses. Program ini berfokus pada penguatan kapasitas Puskesmas dan pemberdayaan tenaga kesehatan lokal, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan

kesehatan, mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta mencegah *stunting*. PUSPA mengintegrasikan penguatan Puskesmas dengan pelatihan lebih dari 1.000 tenaga kesehatan di Bekasi dan Depok. Program ini melibatkan Puskesmas Responsif, Inklusif, Masyarakat Aktif Bermakna (PN PRIMA), yang memfasilitasi penggunaan aplikasi PN PRIMA *mobile app* untuk memantau kegiatan penyaringan kesehatan. Aplikasi ini memungkinkan kader kesehatan untuk melakukan pelaporan secara efisien dan terkoordinasi, serta menyelaraskan dengan sistem pemerintah yang ada.

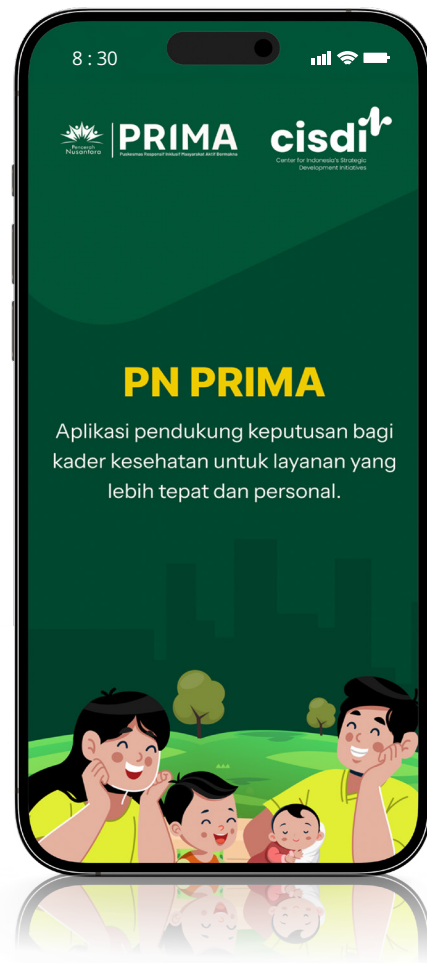
Dalam laporan CISDI 2023, PUSPA berhasil meningkatkan pencapaian layanan kesehatan dasar sebagai berikut:

- Penyaringan hipertensi: Mencapai 75,60% dari target sebelumnya 13,6%.
- Diabetes melitus: Meningkat menjadi 84,76% dari 20%.
- Pemantauan ibu hamil: Mencapai 88,74% dari 0%.
- Imunisasi dasar lengkap: Tercatat 70,75% dari 0%.
- Pendidikan kepada keluarga: Program ini berhasil mengedukasi 109.745 keluarga.

Dengan menggunakan aplikasi digital, PUSPA berhasil menjangkau 33.550 individu untuk penyaringan kesehatan.

3.3.2. Program PMT dengan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Hampir semua organisasi filantropi menjalankan program PMT. Namun terdapat lembaga yang menggunakan pendekatan optimalisasi potensi petani lokal, salah satunya Edufarmers International. Edufarmers International memanfaatkan ekosistem lokal untuk mendistribusikan protein hewani, seperti telur, yang disuplai oleh petani setempat. Strategi ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak tetapi juga memperkuat ekonomi petani.



Edufarmers International memulai program ZeroStunting pada September 2022, yang bertujuan untuk menangani *stunting* dengan pendekatan berbasis nutrisi dan agrikultur. Pada tahun 2023, program ini telah dilaksanakan di 10 kota/kabupaten, termasuk di antaranya Kabupaten Malang, Maros, dan DKI Jakarta. Dalam kurun waktu tersebut, ZeroStunting berhasil menurunkan prevalensi *stunting* sebesar rata-rata 17,1%.¹²

Program ini berfokus pada pemberian protein hewani, khususnya telur ayam, dengan konsep *One Day One Egg*—setiap penerima manfaat diberikan satu telur per hari untuk konsumsi. Selain distribusi telur, program ini mencakup berbagai kegiatan lain, seperti validasi data balita *stunting*, sosialisasi kepada pemangku kebijakan, serta pemantauan harian dan bulanan. Edukasi tentang gizi seimbang, pola asuh yang baik, dan

cara memasak telur secara sehat dan higienis juga menjadi bagian dari program ini, dengan harapan masyarakat bisa mengimplementasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari.

ZeroStunting juga melibatkan pemantauan berkala terhadap BB dan TB balita, dengan bantuan kader pPosyandu, untuk memastikan perkembangan anak berjalan dengan baik. Selain itu, program ini bertujuan untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan media guna mendukung tercapainya Indonesia ZeroStunting.

Selain Edufarmers International, PLN Peduli mengambil pendekatan yang serupa dengan mengintegrasikan solusi ketahanan pangan lokal dalam upaya pencegahan *stunting*. Program *Ketapang Kuning* di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam menghasilkan sumber protein hewani yang berkelanjutan melalui budidaya ikan bioflok. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada perbaikan gizi tetapi juga peningkatan kemandirian ekonomi komunitas. Model bioflok yang diterapkan melibatkan kelompok masyarakat dalam budidaya ikan nila, dengan hasil panen dijual melalui warung gizi komunitas. Pendekatan ini dilengkapi dengan aplikasi digital *Setapak Gizi*, yang memungkinkan orang tua melacak status gizi anak-anak mereka. Warung gizi tidak hanya menyediakan ikan hasil panen tetapi juga susu dan sayuran bergizi dengan harga terjangkau, yang didukung subsidi silang dari kelompok masyarakat yang lebih mampu.

Program *Ketapang Kuning* ini berhasil menurunkan angka *stunting* di komunitas target, dengan 17 dari 22 anak yang sebelumnya masuk kategori *stunting* berat keluar dari kategori tersebut dalam waktu enam bulan. Lebih dari itu, kelompok masyarakat yang terlibat dalam program ini mencatat peningkatan pendapatan rata-rata sebesar Rp 59 juta per tahun. Program ini juga menciptakan perubahan perilaku, di mana keluarga mulai mengalokasikan sebagian

pendapatan untuk pembelian makanan bergizi.

3.3.3. Advokasi Kebijakan Kepada Pemerintah

Intervensi kebijakan untuk pencegahan *stunting* memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk advokasi yang kuat untuk mengubah kebijakan publik dan memperkuat program-program nasional yang berkaitan dengan masalah ini. Lembaga filantropi yang aktif dalam melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah adalah Bebas Stunting Indonesia, CISDI, Yayasan Buddha Tzu Chi dan Tanoto Foundation. Lembaga-lembaga ini menggunakan pendekatan advokasi kebijakan yang melibatkan pengukuran data, kolaborasi dengan pemerintah, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran serta dukungan untuk program pencegahan *stunting*.

Salah satu upaya CISDI dalam advokasi kebijakan adalah melalui pendekatan berbasis data yang mengedepankan perbaikan kualitas data di tingkat pPosyandu dan Puskesmas. Melalui inisiatifnya, CISDI mengembangkan sistem pengukuran tinggi badan balita dan manajemen data *stunting* yang terintegrasi. Program ini bertujuan untuk mempermudah pengumpulan data secara *real-time* yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi kebijakan terkait kesehatan dan gizi. Dalam hal ini, CISDI berkolaborasi dengan pemerintah lokal dan nasional dalam memfasilitasi penggunaan data, ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Dengan menggunakan platform digital dan aplikasi berbasis teknologi, CISDI memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk merancang kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif dalam menanggulangi *stunting*. Dalam hal ini, CISDI memanfaatkan aplikasi digital untuk melacak tumbuh kembang anak di Posyanduposyandu. Teknologi ini memungkinkan kader kesehatan mendeteksi risiko *stunting* lebih dini dan merancang intervensi yang lebih tepat



sasaran.¹³ Pada tingkat kebijakan, CISDI bekerja untuk memastikan bahwa pengukuran *stunting* dilakukan secara terstandarisasi dan terintegrasi di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk menjamin keberlanjutan program dan kepastian data yang lebih akurat dalam memantau status gizi anak-anak Indonesia.

Sementara itu, terdapat lembaga non filantropi, yaitu Yayasan Cipta, yang juga terlibat dalam program advokasi berbasis masyarakat yang berfokus pada pengaruh kebijakan di tingkat nasional dan lokal. Melalui kerjasama dengan *Johns Hopkins Center for Communication Programs*, Yayasan Cipta berusaha mengintervensi kebijakan publik terkait kesehatan dan perencanaan keluarga, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional, kabupaten, dan desa. Program ini juga berupaya untuk meningkatkan alokasi sumber daya dan perbaikan layanan kesehatan di tingkat lokal. Yayasan Cipta telah berhasil meningkatkan pendanaan untuk program kesehatan di tingkat daerah, serta memperbaiki akses terhadap metode kontrasepsi jangka panjang melalui peningkatan dukungan kebijakan. Selain itu, Yayasan Cipta mengembangkan platform edukasi daring yang

memberikan pelatihan kepada kader kesehatan di daerah terpencil, sehingga informasi yang digunakan selalu teranyar.¹⁴

Konsep advokasi kebijakan serupa juga diterapkan oleh BESTI.¹⁵ BESTI mengadopsi pendekatan advokasi kebijakan yang didasarkan pada analisis komprehensif dan kajian mendalam terkait prevalensi *stunting*. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi daerah target. Temuan dari riset tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan *policy brief*, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah guna mengarahkan prioritas kebijakan. Salah satu fokus utama dari advokasi ini adalah mendorong kebijakan peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka mitigasi *stunting*. Sejak 2018, lembaga filantropi ini telah mencapai hasil yang signifikan dalam upaya penurunan angka *stunting*. Sebagai contoh, di Pandeglang, angka *stunting* berhasil turun dari 41,5% menjadi sekitar 30% dalam kurun waktu enam bulan. Hasil serupa tercatat di Kabupaten Kudus, di mana program tersebut berhasil direplikasi di seluruh desa, yang mengakibatkan penurunan angka *stunting* hingga 15%.

Sementara itu, advokasi kebijakan Tanoto Foundation dijalankan melalui kemitraan di berbagai tingkat: internasional, nasional, hingga daerah. Pada level internasional, Tanoto Foundation menjadi salah satu pendiri dan pelopor *Multi-Donor Trust Fund on Investing in Human Capital* (2019–2024) bersama World Bank dan Gates Foundation.¹⁶ Konsorsium ini berfokus memperkuat kebijakan nasional di bidang gizi dan kesehatan anak, termasuk percepatan penurunan *stunting*. Dari kemitraan ini lahir sejumlah instrumen kebijakan, seperti *dashboard* pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan, strategi komunikasi perubahan perilaku (SBCC/ StraCom), serta model koordinasi lintas sektor yang kemudian diadopsi pemerintah. Kerja sama internasional juga telah dijalankan bersama UNICEF melalui program “*Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia*” (2021–2025), yang berfokus pada *Social and Behavior Change Communication* (SBCC) guna memperkuat kebijakan dan praktik pemerintah.¹⁷ Pada fase pertama di 2021, program ini menghasilkan pedoman operasional untuk pemerintah provinsi dalam mendampingi dan mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten. Memasuki fase kedua (2022–2025), intervensi diperluas ke Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan target melatih lebih dari 10.000 tenaga kesehatan serta menjangkau sekitar 4,5 juta orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak.¹⁷

Pada level nasional, Tanoto Foundation bekerja sama erat dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Kantor Staf Presiden/TNP2K untuk memastikan hasil intervensi dan instrumen penurunan *stunting* diadopsi ke dalam kebijakan publik.¹⁸ Kolaborasi ini menghasilkan berbagai capaian, antara lain modul pencegahan *stunting*, *digital parenting*, modul pengasuhan anak, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan kader Posyandu dan penguatan program BKB EMAS.

Pada modul pengasuhan anak, sejak 2023 Tanoto



Foundation bersama BKKBN mengembangkan SiBima Kelas BKB EMAS, yakni kelas digital berbasis modul pengasuhan anak usia dini.¹⁹ Melalui platform Belajar Mandiri, program ini ditujukan untuk Penyuluh KB, kader Bina Keluarga Balita (BKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan orang tua sebagai pengasuh anak, dengan fokus pada pengasuhan selama 1.000 HPK. Hingga awal 2024, tercatat lebih dari 4.300 peserta telah mengakses kelas ini, yang memuat materi tentang fungsi keluarga, kesehatan ibu dan anak, stimulasi perkembangan anak, peran ayah, hingga pola hidup bersih dan sehat. Inovasi digital tersebut diperkuat dengan dukungan mitra akademisi dan profesi, seperti Fakultas Ekologi Manusia IPB, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), serta Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).¹⁸

Adapun pengembangan pelatihan kader Posyandu, Tanoto Foundation bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Kesehatan. Hingga tahun 2024 Tanoto Foundation telah

berhasil memasukkan 78 modul pelatihan kader Posyandu ke dalam Plataran Sehat, *platform* manajemen pembelajaran resmi Kemenkes.¹⁹ Selain itu, Tanoto Foundation mendukung integrasi data kesehatan melalui SATUSEHAT dan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK), yang memungkinkan pencatatan dan pemantauan kesehatan secara real-time di tingkat Posyandu dan Puskesmas, sekaligus memperkuat sistem pemantauan tumbuh kembang anak berbasis data.²⁰

3.1.1. Intervensi Infrastruktur Sanitasi dan Air Bersih

Salah satu faktor penting dalam pencegahan *stunting* adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang memadai. Program intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga filantropi dan pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan anak



yang optimal. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program nasional telah menetapkan target untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, isu swasembada air merupakan agenda prioritas 2 nasional (termasuk melalui pembangunan sektor air minum, sanitasi dan persampahan).²⁴

Pada tahun 2019, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 3/2017 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mencakup upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk air bersih dan sanitasi, untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Kesehatan mengembangkan program-program nasional terkait penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah yang menjadi prioritas untuk pengurangan *stunting*.

Anggaran untuk sanitasi dan air bersih di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2023, anggaran untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi mencapai sekitar IDR 9,5 triliun, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi, serta pengelolaan sumber daya air di daerah-daerah prioritas *stunting*.²⁵ Anggaran ini juga mencakup pelatihan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi.

Beberapa lembaga filantropi, seperti Amman Mineral, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat, memainkan peran penting dalam intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih. Lembaga-lembaga ini seringkali berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengimplementasikan proyek yang berfokus pada penyediaan air bersih dan pembangunan sanitasi yang layak.



Amman Mineral, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), berfokus pada pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di daerah-daerah yang rawan terhadap masalah *stunting*.²⁶ Program mereka melibatkan pembangunan sumur bor, penyediaan instalasi air bersih, serta pembangunan fasilitas sanitasi di beberapa desa yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap air bersih yang aman. Pada tahun 2022, Amman Mineral melaporkan telah mengalokasikan lebih dari IDR 10 miliar untuk pembangunan infrastruktur air bersih di 12 desa di Nusa Tenggara Barat yang memiliki prevalensi *stunting* tinggi. Program ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup lebih dari 20.000 keluarga.

Dompot Dhuafa juga berfokus pada pembangunan akses air bersih di daerah-daerah yang terkena dampak *stunting*. Salah satu contoh program mereka adalah Program Cerdas Bersih Sehat, yang menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih kepada lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. Mereka juga bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan. Pada tahun 2022, Dompot Dhuafa

mencatatkan lebih dari 100.000 penerima manfaat dari program air bersih dan sanitasi mereka, yang berkontribusi pada penurunan angka *stunting* di beberapa daerah.

Rumah Zakat melaksanakan program Desa Berdaya yang tidak hanya mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga menyediakan akses terhadap sanitasi dan air bersih. Salah satu keberhasilan program ini adalah pembangunan sumber mata air bersih dan WC sehat di beberapa desa yang memiliki prevalensi *stunting* yang tinggi. Rumah Zakat juga memberikan edukasi tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk mencegah penyakit yang dapat memperburuk status gizi anak. Melalui program ini, lebih dari 80 desa telah menikmati akses sanitasi dan air bersih yang layak pada 2022.

Program *High Five* di bawah naungan Yayasan Cipta juga fokus pada peningkatan sanitasi dan kebersihan di tingkat masyarakat. Program ini berkontribusi pada inisiatif Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang bertujuan untuk mengeliminasi buang air besar sembarangan dan mempromosikan perilaku hidup bersih, pengolahan air bersih, serta

pengelolaan sampah. Di kawasan perkotaan, program ini berdampak pada lebih dari 12.000 rumah tangga, yang melibatkan sekitar 48.000 individu, dengan penekanan pada perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola perbaikan sanitasi secara mandiri.

Program-program ini menunjukkan dampak yang signifikan dalam pencegahan *stunting*, terutama di daerah yang sebelumnya sulit mengakses air bersih dan sanitasi. Sebagai contoh, daerah yang sebelumnya memiliki masalah sanitasi yang buruk dan kekurangan akses air bersih, setelah dilaksanakan program, mengalami penurunan prevalensi *stunting* hingga 10-12% dalam dua tahun pertama implementasi program.

Selain itu, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak juga mengurangi angka kejadian diare dan infeksi saluran pencernaan pada anak-anak, yang merupakan faktor risiko utama dalam *stunting*. Keterlibatan masyarakat dalam perawatan dan pemeliharaan infrastruktur juga memastikan keberlanjutan program, yang merupakan kunci utama keberhasilan jangka panjang.

3.3.4. Intervensi Lainnya

Selain inisiatif yang telah disebutkan sebelumnya, sejumlah lembaga juga telah melaksanakan berbagai intervensi di bidang kesehatan yang mencakup program-program seperti Posyandu Remaja, edukasi kesehatan reproduksi, serta pembangunan kapasitas sektor kesehatan. Layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai dari konsultasi medis hingga bedah rumah anak *stunting*, turut menjadi fokus utama lembaga filantropi. Beberapa lembaga juga mengadakan kampanye dan *fundraising* untuk mendukung peningkatan layanan dan edukasi kesehatan, serta upaya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang lebih luas.

Salah satu program unggulan Yayasan



Buddha Tzu Chi Indonesia, misalnya, “Rumah Bedah Stunting,” berfokus pada renovasi rumah keluarga dengan anak *stunting* untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Program ini mencakup perbaikan sanitasi, akses air bersih, ventilasi udara yang memadai, dan edukasi pola hidup sehat bagi keluarga penerima manfaat. Melalui program ini, Yayasan Buddha Tzu Chi meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memberikan akses ke lingkungan rumah yang lebih bersih dan sehat, yang berdampak positif pada pertumbuhan anak-anak mereka. Hingga saat ini, program Rumah Bedah Stunting telah membantu ratusan keluarga di berbagai wilayah Indonesia, dengan hasil signifikan berupa peningkatan kondisi kesehatan dan penurunan angka *stunting* di komunitas sasaran.

Adapun Yatim Mandiri menawarkan edukasi dan layanan kesehatan bagi anak yatim dan dhuafa melalui berbagai program kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian bantuan gizi, dan penyuluhan kesehatan di

panti asuhan serta lingkungan sekitar. Program kesehatan Yatim Mandiri telah meningkatkan kesehatan anak yatim dengan menyediakan akses pemeriksaan medis yang sebelumnya sulit dijangkau. Edukasi kesehatan yang mereka berikan juga membantu anak-anak memahami pentingnya kebersihan dan gizi seimbang. Sejauh ini, ribuan anak yatim dan dhuafa telah menerima manfaat dari program kesehatan Yatim Mandiri, yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis dan distribusi paket gizi untuk meningkatkan status kesehatan mereka.

MNC Peduli menjalankan berbagai program edukasi dan layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan medis bagi masyarakat kurang mampu, serta kampanye kesehatan yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Program-program MNC Peduli telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit. Melalui kampanye kesehatan, mereka juga berhasil mendorong pola hidup sehat di komunitas. MNC Peduli telah melaksanakan ratusan kegiatan layanan kesehatan gratis di berbagai daerah di Indonesia,

yang melibatkan ribuan penerima manfaat dari berbagai lapisan masyarakat.

3.4. Menyiapkan Anak Siap Belajar Dimulai dari Penanganan *Stunting*

Stunting tidak lagi dilihat sebagai akibat langsung dari kekurangan gizi atau infeksi semata, melainkan sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Kerangka konseptual UNICEF menempatkan *stunting* sebagai gejala dari ketimpangan struktural yang melibatkan praktik pengasuhan, ketersediaan pangan bergizi, akses terhadap layanan kesehatan dasar, sanitasi lingkungan, hingga situasi sosial-ekonomi rumah tangga.²⁷ Ketimpangan ini paling terasa di negara-negara berkembang, di mana anak-anak hidup dalam lingkungan yang tidak menunjang tumbuh kembang optimal. Grantham-McGregor et al. (2007) memperkirakan bahwa lebih dari 200 juta anak di bawah usia lima tahun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (khususnya di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara) tidak mencapai potensi perkembangan mereka.²⁸ Kondisi tersebut sebagian besar disebabkan oleh kombinasi kemiskinan,



kesehatan yang buruk, dan kecukupan gizi yang tidak terpenuhi. Dalam konteks tersebut, *stunting* menjadi indikator penting untuk menggambarkan akumulasi hambatan yang menghambat kesiapan anak dalam mengikuti proses pendidikan.

Memahami keterkaitan erat antara *stunting* dan kesiapan pendidikan inilah yang mendorong Tanoto Foundation mengembangkan program SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi). Salah satu bentuk inisiatif dalam program ini adalah Rumah Anak SIGAP, sebuah model intervensi pengasuhan berbasis masyarakat untuk menjawab kesenjangan layanan pengembangan anak usia dini, khususnya pada kelompok usia 0–3 tahun. Rumah Anak SIGAP berakar pada tiga strategi utama: meningkatkan pengetahuan dan praktik pengasuhan anak usia di bawah tiga tahun (BATITA), memperluas akses terhadap layanan stimulasi awal yang berkualitas, dan membangun ekosistem pendukung yang melibatkan pemerintah desa hingga pemangku kebijakan daerah. Program ini dilaksanakan sejak 2020 di 16 desa dan kelurahan di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Pandeglang (Banten), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).

Rumah Anak SIGAP dilaksanakan oleh fasilitator yang direkrut dan dilatih secara kolaboratif oleh Tanoto Foundation bersama pemerintah desa/kelurahan. Kegiatan utamanya meliputi kelas tematik untuk pengasuh, sesi bermain bersama anak, konsultasi individual, kunjungan rumah, serta layanan stimulasi spesifik bagi anak yang menunjukkan risiko keterlambatan. Modul yang digunakan disusun berdasarkan tahapan perkembangan anak dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Fokus program bukan pada pemberian materi atau bantuan langsung, melainkan pada transformasi praktik pengasuhan dalam rutinitas harian.

Selain memberikan stimulasi perkembangan anak secara langsung (sebagaimana yang diulas

pada bab 2), intervensi dalam Rumah Anak SIGAP berdampak signifikan terhadap perbaikan praktik pengasuhan yang berkaitan erat dengan pencegahan *stunting*. Berdasarkan analisis dampak melalui metode Most Significant Change (MSC) terdapat perubahan yang lebih dalam dan kontekstual di tingkat pengasuh. Dari 64 cerita perubahan yang dikumpulkan, mayoritas menggambarkan pergeseran signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan praktik pengasuhan.²⁹ Banyak pengasuh yang awalnya mengandalkan mitos dan praktik turun-temurun, seperti larangan konsumsi ikan selama kehamilan atau anggapan bahwa anak akan berbicara “dengan sendirinya”, mengaku mulai mengubah cara pandang dan cara mengasuh anak setelah mengikuti kegiatan SIGAP. Sebagian besar juga menyebutkan bahwa interaksi dalam kelas dan sesi bermain bersama membantu mereka mengelola stres pengasuhan, merasa lebih percaya diri, dan mulai melibatkan anggota keluarga lain dalam mendukung tumbuh kembang anak.³⁰

Perubahan perilaku paling dominan dilaporkan dalam aspek sosial-emosional anak, yang mudah diamati melalui ekspresi, respon anak terhadap interaksi, dan kemampuan berkomunikasi. Disusul kemudian oleh perkembangan kognitif dan bahasa, yang kerap dipicu oleh kegiatan membaca buku, menyebutkan nama benda, dan bercerita. Temuan ini sejalan dengan sejumlah studi yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif pengasuh dalam membangun kesiapan belajar anak.^{31,32} Sebaliknya, aspek motorik masih menunjukkan peningkatan yang terbatas, menunjukkan perlunya modul yang lebih eksplisit dan penguatan kapasitas fasilitator dalam mengenalkan stimulasi fisik harian.

Program SIGAP juga berhasil memetakan akar persoalan pengasuhan anak di wilayah sasaran. Melalui wawancara dengan fasilitator, koordinator lapangan, kepala desa, dan pengasuh, ditemukan bahwa rendahnya kualitas pengasuhan tidak hanya disebabkan oleh minimnya informasi, tetapi juga oleh kondisi

sosial ekonomi rumah tangga, pendidikan ibu yang rendah, tekanan mental, serta minimnya dukungan sosial. Dalam konteks ini, Rumah Anak SIGAP berfungsi bukan hanya sebagai pusat layanan stimulasi, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat bertemunya informasi, dukungan emosional, dan penguatan kapasitas keluarga secara menyeluruh.

Hasil evaluasi terhadap Rumah Anak SIGAP menegaskan bahwa perubahan praktik pengasuhan pada tahun-tahun pertama kehidupan anak dapat dicapai melalui intervensi yang dirancang secara tepat sasaran. Dampak program terlihat paling kuat pada dimensi sosial-emosional dan kemampuan bahasa anak, serta meningkatnya responsivitas dan kepercayaan diri pengasuh. Temuan analisa dampak Rumah Anak SIGAP menunjukkan bahwa tantangan pengasuhan di Indonesia tidak hanya terletak pada ketiadaan akses layanan, tetapi juga pada kesenjangan pengetahuan, tekanan sosial dalam rumah tangga, serta absennya ruang dialog untuk orang tua.

3.5. Potensi Filantropi Kesehatan di Indonesia

Filantropi kesehatan telah menjadi salah satu fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, dengan alokasi dana yang meningkat untuk memperbaiki sistem kesehatan global, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Salah satu faktor pendorong utama dalam perkembangan filantropi kesehatan adalah meningkatnya kesadaran terhadap ketidaksetaraan akses kesehatan setelah pandemi COVID-19.

Dari sisi global, sejumlah organisasi filantropis dan/atau lembaga multilateral memfokuskan pendanaan mereka untuk memperkuat sistem kesehatan. Contohnya, *Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents* (GFF) telah menggalang lebih dari \$445 juta USD pada 2023 untuk disalurkan pada penguatan layanan kesehatan primer, terutama untuk perempuan dan anak-anak di daerah yang paling sulit dijangkau.³³ Adapun Bank Dunia dan WHO meluncurkan *Financial Intermediary Fund* (FIF) pada 2022 untuk memperkuat kapasitas negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam merespons krisis kesehatan global.³⁴

Di Indonesia, sektor kesehatan termasuk 3 program prioritas yang dijalankan oleh organisasi filantropi (sebagaimana disajikan di Gambar 1.2 Chapter 1).³⁵

Fokus ini sejalan dengan kebutuhan dan tantangan Indonesia saat ini terkait disparitas aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekitar 56% masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan seringkali memiliki akses terbatas ke fasilitas kesehatan.³⁶ Sebanyak 15 provinsi belum dilengkapi dengan rumah sakit kelas A,³⁷ sementara 171 kecamatan (sebagian besar di Papua) masih kekurangan Puskesmas.³⁸

Selain itu, teknologi digital membuka peluang baru bagi filantropi kesehatan di Indonesia. Platform *crowdfunding* seperti *Kitabisa.com* telah memungkinkan individu untuk langsung mendukung program kesehatan yang mendesak, seperti pengobatan dan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Teknologi juga memperluas akses melalui layanan *telemedicine* dan aplikasi kesehatan digital yang dapat menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang lebih rendah.

Referensi

1. **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.** (2025). *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*. <https://kemkes.go.id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198> (diakses pada 16 Januari 2025).
2. **Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian DPR Republik Indonesia.** (2023). *Stunting Indonesia: Akar masalah dan solusinya*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-14-II-P3DI-Juli-2023-196.pdf (diakses pada 16 Januari 2025).
3. **Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia.** (2023). *The potential of economic loss due to stunting in Indonesia*. <https://scholarhub.ui.ac.id/eki/vol8/iss1/6/> (diakses pada 16 Januari 2025).
4. **Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.** (2023). *APBN targetkan percepatan penurunan stunting melalui tiga intervensi*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-targetkan-percepatan-penurunan-stunting-melalui-tiga-intervensi> (diakses pada 16 Januari 2025).
5. **Katadata Insight Center.** (2023). *10 negara paling dermawan di dunia 2023, Indonesia juara*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/5530a2bc04aefb0/10-negara-paling-dermawan-di-dunia-2023-indonesia-juara> (diakses pada 15 Januari 2025).
6. **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.** (2023a). *11 intervensi spesifik atasi stunting telah dilaksanakan di daerah, 2 di antaranya melebihi target*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230623/1543354/11-intervensi-spesifik-atasi-stunting-telah-dilaksanakan-di-daerah-2-di-antaranya-melebihi-target/> (diakses pada 15 Januari 2025).
7. **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia.** (2023). *Perpres percepatan penurunan stunting untuk perbaikan gizi Indonesia*. <https://www.bappenas.go.id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg> (diakses pada 15 Januari 2025).
8. **Portal Informasi Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.** (2023). *Fokus anggaran untuk mencapai target penurunan stunting*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7327/fokus-anggaran-untuk-mencapai-target-penurunan-stunting?lang=1> (diakses pada 15 Januari 2025).
9. **Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Republik Indonesia.** (2024). *Rakornas percepatan penurunan stunting 2024 bahas berbagai hal, mulai dari refleksi hingga luncurkan layanan digital E-Assistance for Stunting Information*. <https://stunting.go.id/rakornas-percepatan-penurunan-stunting-2024-bahas-berbagai-hal-mulai-dari-refleksi-hingga-luncurkan-layanan-digital-e-assistance-for-stunting-information/> (diakses pada 15 Januari 2025).
10. **ANTARA News.** (2024). *Kemenko PMK: MBG diharapkan bisa turunkan stunting secara signifikan*. <https://www.antaraneews.com/berita/4474641/kemenko-pmk-mbg-diharapkan-bisa-turunkan-stunting-secara-signifikan> (diakses pada 15 Januari 2025).

11. **Bina Swadaya.** (2023). *Laporan Keberlanjutan 2023*. <https://binaswadaya.org/laporan-keberlanjutan-2023/> (diakses pada 15 Januari 2025).
12. **Edufarmers Foundation.** (2023). *"Edufarmers 2023 Impact Report Officially Released!"*. <https://www.edufarmers.org/edufarmers-2023-impact-report-officially-released-> (diakses pada 15 Januari 2025)
13. **CISDI.** (2023). *Laporan Tahunan*. <https://cisdi.org/akuntabilitas/laporan-tahunan> (diakses pada 15 Januari 2025).
14. **Yayasan Cipta.** (2024). *Laporan Tahunan Yayasan Cipta Tahun 2024*. <https://www.yayasancipta.org/reports/> (diakses pada 15 Januari 2025).
15. **Bebas Stunting Indonesia.** (n.d.). *Pencegahan stunting*. <https://www.bebasstunting.org/> (diakses pada 15 Januari 2025).
16. **Tanoto Foundation.** (2025a). *Tanoto Foundation, World Bank & Bill & Melinda Gates Foundation fight stunting*. <https://www.tanotofoundation.org/en/news/tanoto-foundation-world-bank-bill-melinda-gates-foundation-fight-stunting/> (diakses pada 23 September 2025).
17. **UNICEF Indonesia.** (2025). *Tanoto Foundation and UNICEF continue partnership to reduce stunting prevalence*. <https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/tanoto-foundation-and-unicef-continue-partnership-reduce-stunting-prevalence> (diakses pada 23 September 2025).
18. **Tanoto Foundation.** (2025b). *Cegah stunting, Tanoto Foundation jalin kerja sama dengan BKKBN*. <https://www.tanotofoundation.org/id/news/cegah-stunting-tanoto-foundation-jalin-kerja-sama-dengan-bkkbn/> (diakses pada 23 September 2025).
19. **Orang Tua Hebat.** (2025). *Kolaborasi BKKBN dan Tanoto Foundation*. <https://www.orangtuahebat.id/kolaborasi-bkkbn-dan-tanoto-foundation/> (diakses pada 23 September 2025).
20. **Indonesia Satu.** (2025). *Kolaborasi Kemenkes dan Tanoto Foundation digitalisasi sistem 1,5 juta kader posyandu*. <https://indonesiasatu.co/detail/kolaborasi-kemenkes---tanoto-foundation-digitalisasi-sistem-1-5-juta-kader-posyandu> (diakses pada 23 September 2025).
21. **Liputan6.** (2025). *Kolaborasi Kemenkes dan Tanoto Foundation sasar digitalisasi sistem untuk 1,5 juta kader posyandu*. <https://www.liputan6.com/news/read/5549558/kolaborasi-kemenkes-dan-tanoto-foundation-sasar-digitalisasi-sistem-untuk-15-juta-kader-posyandu> (diakses pada 23 September 2025).
22. **Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.** (2024). *Kebijakan pembangunan air minum, sanitasi, dan persampahan*. <https://www.dml.or.id/wp-content/uploads/2024/12/2024.11.28-Kebijakan-Air-Minum-dan-Sanitasi-.pdf> (diakses pada 15 Januari 2025).
23. **Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia.** (2024). *Policy brief kolaborasi KPSPAM dan BUMDES: Strategi pengelolaan dan keberlanjutan Pamsimas*. https://komens.bappenas.go.id/public/storage/files/1711416407_06%20Policy%20Brief%20Kolaborasi%20KPSPAM%20dan%20BUMDES%20Strategi%20Pengelolaan%20dan%20Keberlanjutan%20Pamsimas.pdf (diakses pada 15 Januari 2025).

24. **PT Amman Mineral Internasional Tbk.** (2024). *Laporan Tahunan AMMAN 2024*. <https://www.amman.co.id/id/laporan-tahunan/> (diakses pada 15 Januari 2025).
25. **UNICEF.** (n.d.). *Conceptual framework on maternal and child nutrition*. <https://www.unicef.org/documents/conceptual-framework-nutrition> (diakses pada 23 Juni 2025).
26. **Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., Strupp, B., & the International Child Development Steering Group.** (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet*, 369(9555), 60–70. [https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(07\)60032-4.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(07)60032-4.pdf) (diakses pada 23 Juni 2025).
27. **Tanoto Foundation.** (2024). *Dampak pelayanan pengasuhan berbasis masyarakat pada tumbuh kembang anak: Studi dampak program Rumah Anak SIGAP melalui metode Most Significant Change (MSC)*. <https://www.tanotofoundation.org/en/3d-flip-book/dampak-pelayanan-pengasuhan-berbasis-masyarakat-pada-tumbuh-kembang-anak/> (diakses pada 23 Juni 2025).
28. **Fantuzzo, J., McWayne, C., Perry, M. A., & Childs, S.** (2004). Multiple dimensions of family involvement and their relations to behavioral and learning competencies for urban, low-income children. *School Psychology Review*, 33(4), 467–480. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00759/full> (diakses pada 23 Juni 2025).
29. **Topor, D. R., Keane, S. P., Shelton, T. L., & Calkins, S. D.** (2010). Parent involvement and student academic performance: A multiple mediational analysis. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 38(3), 183–197. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3020099/> (diakses pada 23 Juni 2025).
30. **Global Financing Facility.** (n.d.). *Global and country leaders commit funding towards improving health and rights for 250 million women, children and youth*. <https://www.globalfinancingfacility.org/news/press-release/global-and-country-leaders-commit-funding-towards-improving-health-and-rights> (diakses pada 15 Januari 2025).
31. **World Bank.** (2022). *New fund for pandemic prevention, preparedness and response formally established*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/09/new-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response-formally-established> (diakses pada 15 Januari 2025).
32. **Perhimpunan Filantropi Indonesia.** (2024). *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*. <https://filantropi.or.id/download/indonesia-philanthropy-outlook-2024/> (diakses pada 15 Januari 2025).
33. **Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.** (2022). *Jumlah penduduk menurut wilayah, daerah perkotaan/perdesaan, dan jenis kelamin, Indonesia, tahun 2022*. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/1/0> (diakses pada 15 Januari 2025).
34. **Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.** (n.d.). *Dashboard Rumah Sakit – Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online*. https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/dashboard_rs?id=0 (diakses pada 15 Januari 2025).
35. **ANTARA News.** (2025). *Kemenkes: Fasyankes belum merata, 171 kecamatan belum ada puskesmas*. <https://www.antaranews.com/berita/3463977/kemenkes-fasyankes-belum-merata-171-kecamatan-belum-ada-puskesmas> (diakses pada 15 Januari 2025).



Bab 4

Kesimpulan dan Rekomendasi



4.1. Kesimpulan

Filantropi di Indonesia memainkan peran yang krusial dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, didorong oleh peran sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan individu dalam mendanai berbagai inisiatif sosial. Namun, sektor ini masih menghadapi ketidakmerataan distribusi bantuan, baik dari sisi geografis maupun pendanaan. Sebagian besar program filantropi terkonsentrasi di daerah dengan infrastruktur yang lebih baik, seperti di Jawa dan Sumatera. Sementara, daerah-daerah di luar pulau utama seperti Papua, NTT, dan Kalimantan masih tertinggal dalam hal akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Temuan utama di sektor pendidikan menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana untuk pendidikan di Indonesia cukup besar, tantangan ketimpangan kualitas dan akses pendidikan masih belum teratasi sepenuhnya. Distribusi guru yang tidak merata, dengan mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa dan minimnya tenaga pengajar di wilayah seperti Papua Pegunungan, memperbesar kesenjangan akses pendidikan.

Selain itu, kondisi infrastruktur sekolah juga menjadi tantangan besar. Kerusakan ruang kelas SD, baik ringan, sedang, maupun berat, menjadi hambatan serius yang mengganggu proses belajar dan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Program-program filantropi telah berperan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di daerah tertinggal dengan memberikan beasiswa, pendidikan vokasional, dan pemberdayaan guru. Namun, masalah infrastruktur dan keterbatasan SDM yang ada di banyak daerah tetap menjadi hambatan utama

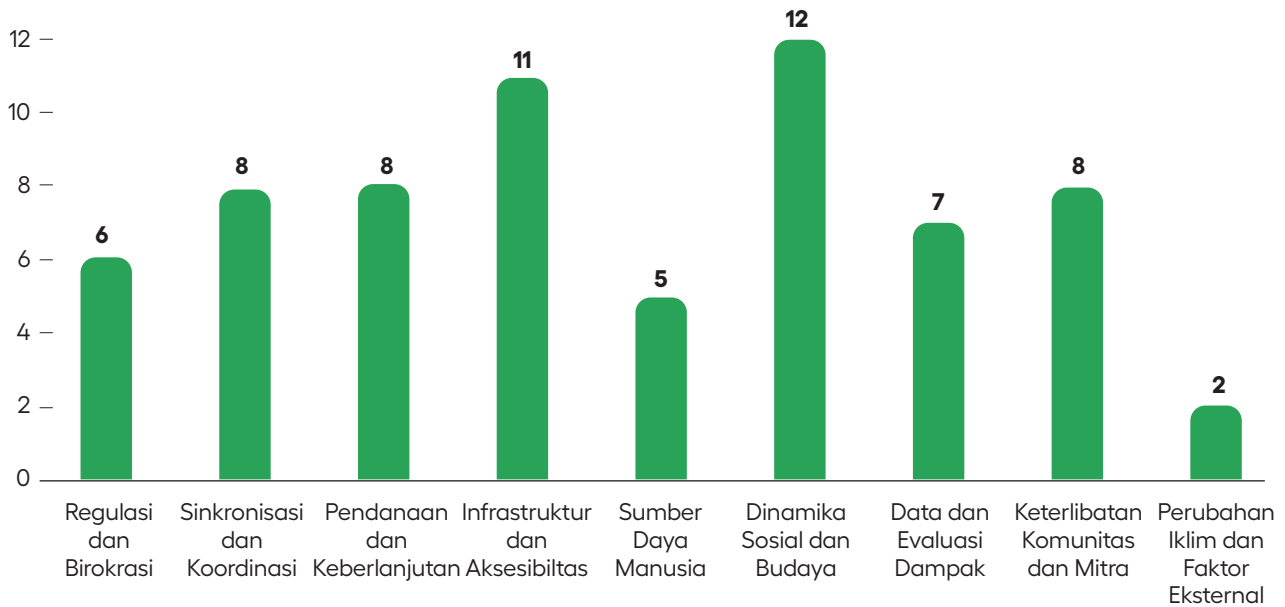
dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Sementara di sektor kesehatan, stunting di Indonesia pada 2023 masih menjadi tantangan dengan angka 21,5%, belum mencapai target 14% pada 2024. Data ini menegaskan pentingnya sektor filantropi dalam mengisi kekosongan yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. Saat ini beberapa lembaga filantropi kesehatan telah berfokus pada program pengurangan angka stunting dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar, dengan beberapa inisiatif telah berhasil mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Namun, inisiatif-inisiatif ini masih belum optimal karena pendanaan yang fluktuatif, terbatasnya akses di daerah 3T, ketidakmerataan distribusi bantuan serta kekurangan tenaga medis terlatih di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang signifikan.

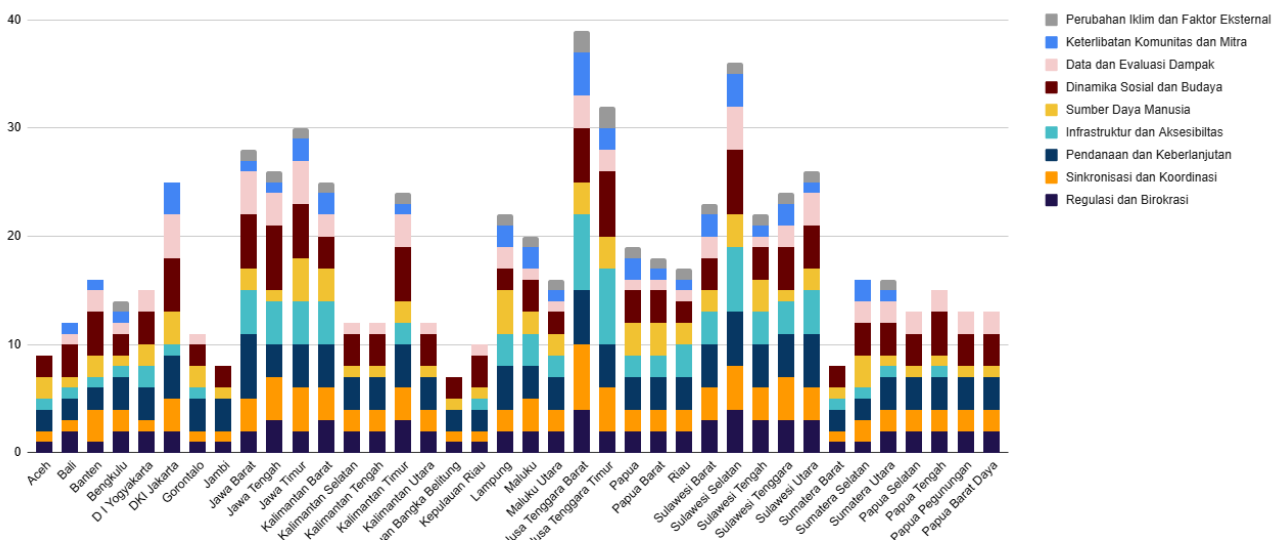
Di samping itu, masih terdapat sejumlah peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor filantropi, seiring dengan berkembangnya teknologi dalam pendidikan dan kesehatan. Ada potensi besar untuk menggunakan platform digital untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Selain itu, semakin banyaknya perusahaan dan individu yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR membuka peluang untuk menciptakan pendanaan yang lebih berkelanjutan dan lebih transparan.

Meskipun sektor filantropi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, berbagai tantangan menjadi penghalang untuk mencapai potensi maksimalnya. Berdasarkan wawancara terhadap 28 lembaga filantropi baik sektor pendidikan maupun kesehatan, ditemukan tantangan utama meliputi pendanaan dan keberlanjutan, regulasi dan birokrasi, sinkronisasi dan koordinasi, infrastruktur dan aksesibilitas hingga keterlibatan komunitas dan mitra.

Grafik 4.1. Tantangan Program Pendidikan dan Kesehatan *Key Stakeholder* Filantropi di Indonesia



Grafik 4.2. Peta Persebaran Tantangan Program Pendidikan dan Kesehatan *Key Stakeholder* Filantropi di Indonesia



1. Pendanaan dan Keberlanjutan

Pendanaan merupakan tantangan utama dalam filantropi di Indonesia. Sebagian besar program bergantung pada donor individu, CSR perusahaan, atau hibah dari lembaga internasional. Ketergantungan ini membuat

pendanaan bersifat fluktuatif dan rentan terhadap kondisi ekonomi global. Selain itu, minimnya mekanisme pendanaan jangka panjang, seperti dana abadi (*endowment funds*), menghambat keberlanjutan program, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan investasi jangka panjang.

Contohnya, Yayasan Kitabisa menghadapi kesenjangan pendanaan yang meningkat akibat penarikan global *fund* di Indonesia, serta tantangan dalam pelaksanaan program yang kadang tidak sesuai tujuan awal kampanye. Sementara itu, Yayasan Indah Berbagi (YIB) menghadapi keterbatasan pendanaan dan rendahnya minat donatur untuk program kesehatan.

2. Regulasi dan Birokrasi

Hambatan administratif menjadi kendala signifikan yang sering memperlambat pelaksanaan program filantropi. Proses perizinan yang panjang dan rumit mengurangi efektivitas, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, regulasi yang tumpang tindih menciptakan ketidakpastian bagi lembaga filantropi dalam mengelola dana dan menjalankan program. Contohnya, Doctors Without Borders membutuhkan waktu hingga satu tahun untuk menyelesaikan MoU pada program *emergency hub* dan Yayasan Buddha Tzu Chi menghadapi keterlambatan pengiriman bantuan bencana akibat proses perizinan yang lambat.

Selain masalah birokrasi yang ada, tantangan lebih lanjut datang dari undang-undang yang sudah tidak relevan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1961 tentang pengumpulan dana filantropi, yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Meskipun ada beberapa peraturan turunan yang sudah diterapkan, peraturan tersebut belum dapat menjawab dinamika pengumpulan dana dan barang yang semakin berkembang, terutama dengan adopsi teknologi dan platform digital dalam penggalangan dana.

3. Sinkronisasi dan Koordinasi

Kurangnya sinkronisasi antara lembaga filantropi dan pemerintah, serta di antara lembaga

filantropi sendiri, masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas program-program filantropi di Indonesia. Contohnya, William & Lily Foundation mencatat perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga filantropi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Yayasan BaKTI juga menghadapi tantangan terkait koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah terpencil sangat terbatas sehingga menghambat pelaksanaan program.

4. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program filantropi. Minimnya fasilitas transportasi, akses internet, dan infrastruktur fisik lainnya menghambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program yang dirancang untuk masyarakat di wilayah 3T. Contohnya, Happy Hearts Indonesia menghadapi kendala logistik dalam pengiriman bahan bangunan untuk membangun sekolah di daerah terpencil, dan Cita Sehat Foundation mengalami hambatan komunikasi akibat sinyal yang buruk di daerah pedalaman Papua.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan tenaga profesional terlatih di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu tantangan utama. Distribusi tenaga kerja yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil memperburuk kesenjangan layanan. Selain itu, kualitas SDM di lapangan sering kali bervariasi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan. Contohnya, Rumah Zakat mencatat bahwa kualitas relawan di Indonesia Timur masih membutuhkan pelatihan tambahan dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) menghadapi kekurangan dokter spesialis kanker anak yang sangat dibutuhkan untuk program kesehatan mereka.

6. Dinamika Sosial dan Budaya

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan seringkali menghambat penerimaan program filantropi. Selain itu, perubahan generasi, baik dalam kepemimpinan lembaga filantropi maupun dalam struktur organisasi yang lebih luas, menjadi tantangan signifikan dalam menjaga keberlanjutan program. Pergantian kepemimpinan atau perubahan dalam tenaga relawan dan profesional seringkali mempengaruhi efektivitas dan kontinuitas suatu program. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa lembaga filantropi yang menghadapi tantangan terkait dengan pergantian generasi dalam struktur manajerial dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, Yayasan Pendidikan Astra (YPA-MDR) menghadapi tantangan terkait ketergantungan pada kepala sekolah dalam menjalankan program pendidikan mereka. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola dan memimpin program-program pendidikan di sekolah-sekolah mitra. Selain itu, Yayasan Buddha Tzu Chi mencatat bahwa beberapa penerima manfaat menolak bantuan karena merasa tidak membutuhkannya.



7. Perubahan Iklim dan Faktor Eksternal

Dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, menghambat pelaksanaan program, terutama di daerah yang rawan. Bencana seperti banjir dan kekeringan sering kali merusak infrastruktur fisik, sehingga mengganggu keberlanjutan program filantropi. Contohnya, Happy Hearts Indonesia mencatat bahwa hujan lebat memperlambat proses konstruksi sekolah di daerah yang rawan bencana dan Wahana Visi Indonesia menghadapi kekeringan di beberapa wilayah yang berdampak pada ketersediaan air bersih.

8. Data dan Evaluasi Dampak

Kurangnya data yang akurat dan terintegrasi menjadi tantangan utama dalam merencanakan dan mengevaluasi program filantropi. Data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan seringkali menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Contohnya, Yayasan Buddha Tzu Chi mencatat ketidaksesuaian antara data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan realitas di lapangan dan Cita Sehat Foundation menghadapi kesulitan dalam menemukan SDM yang memahami indikator stunting untuk pengukuran dampak program.

9. Keterlibatan Komunitas dan Mitra

Minimnya keterlibatan komunitas lokal dan mitra sering kali menghambat keberlanjutan program filantropi. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program filantropi membuat pelaksanaan program menjadi kurang optimal. Contohnya, William & Lily Foundation menghadapi kesulitan dalam menemukan mitra lokal yang kompeten untuk mendukung program mereka dan Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi (YKIP) harus terus memberikan edukasi kepada orang tua siswa untuk melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan diatas dan memperkuat lembaga filantropi di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan yang terlibat:

Tabel 4.1. Rangkuman Rekomendasi Kebijakan

No.	Rekomendasi Kebijakan	Penjelasan	Langkah Kebijakan
1.	Penyusunan kebijakan pendanaan yang berkelanjutan	Filantropi perlu mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan yang fluktuatif dan mendorong pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang mengalokasikan CSR untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
2.	Pembaruan dan penyederhanaan regulasi serta proses birokrasi	Penting untuk mengintegrasikan peraturan dalam undang-undang khusus filantropi yang lebih modern, guna mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi. Proses perizinan yang berbelit-belit menghambat efisiensi filantropi. Regulasi yang rumit juga memperlambat pengalihan dana untuk program yang mendesak.	<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan peraturan dalam undang-undang khusus filantropi untuk mengurangi hambatan birokrasi / merevisi undang-undang yang sudah lama 1961 karena sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dan di implementasikan. Meskipun ada peraturan turunan namun belum dapat menjawab dinamika pengumpulan uang dan barang di Indonesia. Menyusun undang-undang khusus filantropi yang menyatukan regulasi terkait pengumpulan dana dan transparansi. Membentuk mekanisme perizinan cepat (fast-track) untuk program tanggap darurat, seperti bencana atau krisis kesehatan.
3.	Memperluas jangkauan program filantropi ke wilayah terpencil	Daerah seperti Papua, NTT, dan Kalimantan masih kurang dalam hal program filantropi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan alokasi pendanaan untuk wilayah dengan IPM rendah. Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga filantropi untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah yang terisolasi.
4.	Penguatan SDM di daerah terpencil	Kekurangan tenaga terlatih di daerah terpencil membatasi keberhasilan program filantropi.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan insentif bagi tenaga profesional yang bekerja di daerah terpencil, seperti tunjangan khusus dan fasilitas tempat tinggal Mengembangkan program pelatihan intensif bagi guru dan tenaga kesehatan lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka.
5.	Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan	Infrastruktur yang rusak atau tidak memadai menghalangi efektivitas program filantropi.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk renovasi sekolah dan rumah sakit di daerah tertinggal. Memperkenalkan program pembangunan infrastruktur berbasis teknologi, seperti penyediaan akses internet di fasilitas digital di daerah terpencil.
6.	Pemanfaatan teknologi dalam implementasi program	Teknologi dapat meningkatkan efektivitas program, namun banyak filantropi yang belum memanfaatkan teknologi untuk menjangkau daerah terpencil.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kebijakan untuk mempercepat adopsi teknologi dalam program filantropi seperti platform e-learning untuk pendidikan dan telemedicine untuk kesehatan. Memberikan pelatihan kepada lembaga filantropi dalam penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan dan dampak.

No.	Rekomendasi Kebijakan	Penjelasan	Langkah Kebijakan
7.	Peningkatan kualitas dan keakuratan data	Keakuratan data adalah faktor krusial dalam merancang dan melaksanakan program filantropi yang efektif.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah perlu memperkuat sistem pengumpulan dan verifikasi data di tingkat daerah, termasuk memperbaharui data kemiskinan dan kesehatan secara berkala Mengintegrasikan teknologi seperti big data, machine learning, dan survei berbasis aplikasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan relevan. Pemerintah dan lembaga filantropi harus menggabungkan data sekunder (misalnya, data DTKS) dengan survei lapangan dan data berbasis komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi di daerah tertentu Menetapkan indikator yang lebih spesifik dan terukur untuk masalah sosial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan kesehatan ibu dan anak, sehingga program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
8.	Penguatan monitoring dan evaluasi program filantropi	Tanpa sistem evaluasi yang jelas, sulit untuk mengukur dampak jangka panjang program filantropi.	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dengan indikator terukur, seperti pengurangan angka stunting atau peningkatan angka partisipasi sekolah. Membentuk lembaga pengawas independen untuk menilai efektivitas program filantropi di seluruh Indonesia.
9.	Meningkatkan kolaborasi antara lembaga filantropi dengan mitra lokal dan pemerintah	Kolaborasi yang efektif antara lembaga filantropi dengan mitra lokal dan pemerintah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari program.	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga filantropi harus mengidentifikasi dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra lokal, yang tidak hanya berbasis pada pendanaan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola dan melanjutkan program secara mandiri. Pelatihan berkelanjutan kepada mitra lokal untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola program dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan inisiatif secara mandiri. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga filantropi untuk memastikan bahwa program yang dijalankan selaras dengan kebijakan pemerintah dan dapat mengakses sumber daya yang tersedia.
10.	Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang isu-isu sosial di komunitas/ masyarakat	Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan edukasi tentang dampak jangka panjang dari program filantropi menjadi hal yang sangat penting.	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dan lembaga filantropi perlu mengembangkan program edukasi yang menyeluruh, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial dan pentingnya partisipasi mereka dalam program filantropi Menyusun kampanye sosialisasi yang berkelanjutan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari program filantropi, serta bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam mewujudkan tujuan bersama.

4.3 Indonesia Emas 2045: Mengarahkan Filantropi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan

Indonesia Emas 2045 adalah visi strategis yang mengarahkan Indonesia untuk menjadi negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia memerlukan SDM yang berkualitas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, sektor filantropi memainkan peran yang sangat penting, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi pondasi utama untuk menciptakan SDM unggul.

Filantropi dalam sektor pendidikan harus berfokus pada pengembangan pendidikan berbasis teknologi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Salah satu pendekatan yang perlu diperkuat adalah *e-learning*, yang memungkinkan anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau untuk tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Filantropi perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menyediakan platform pendidikan digital yang inklusif dan merata.

Pemberdayaan pendidikan berbasis teknologi tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga akan mempersiapkan generasi mendatang dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis digital. Filantropi juga dapat memainkan peran dalam pengembangan kurikulum berbasis keterampilan digital dan pelatihan guru untuk memastikan bahwa tenaga pendidik siap mengajar dengan metode yang lebih interaktif dan berbasis teknologi.

Di sektor kesehatan, filantropi harus berfokus pada pemanfaatan teknologi kesehatan, seperti *telemedicine*, untuk meningkatkan akses

layanan kesehatan di daerah-daerah yang belum terjangkau. *Telemedicine* memungkinkan konsultasi medis jarak jauh, yang sangat penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T. Selain itu, filantropi juga perlu mendukung penyuluhan kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakit, dengan prioritas pada stunting, yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam memastikan kualitas hidup generasi mendatang.

Program-program kesehatan filantropi juga harus mencakup peningkatan akses gizi yang lebih baik untuk ibu hamil dan anak-anak, serta menyediakan pelayanan kesehatan preventif yang terjangkau dan merata. Dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Indonesia akan memiliki SDM yang lebih sehat dan produktif, yang merupakan prasyarat utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Filantropi di Indonesia tidak hanya harus berfokus pada program-program jangka pendek yang merespons masalah segera, tetapi juga harus berinvestasi dalam fondasi jangka panjang. Ini termasuk penguatan kapasitas lokal, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta inovasi dalam teknologi. Kebijakan yang mendukung sektor ini harus bersifat inklusif, memperhatikan kebutuhan daerah-daerah tertinggal, dan memastikan bahwa program filantropi dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Untuk itu, kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta sangat penting. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem filantropi yang lebih kuat dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Sektor swasta, dengan sumber daya dan inovasi yang dimilikinya, dapat membantu mempercepat implementasi teknologi dan program filantropi yang lebih efektif.



📍 Jl. Angkasa No.55, RT.7/RW.5, Gn. Sahari
Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10720

☎ +62 21 6287234

✉ info@filantropi.or.id